



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018 TAHUN 2025

Audited



Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2025

+123-456-7890



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pertanian adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran (BA 018) Tahun 2025 (Audited) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara pada Kementerian Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pimpinan dalam pengambilan keputusan serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Jakarta, 17 Mei 2026
Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



REPRESENTASI MANAJEMEN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Mei 2026

Nomor : R-113.1/KU.140/M/05/2026
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan
Kementerian Pertanian Tahun 2025

**Yth. Plt. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta 10210**

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Kementerian Pertanian memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Kementerian Pertanian telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK Kementerian Pertanian Tahun 2025;
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 *Audited* sebagai asersi final Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian,



Andi Murtan Sulaiman



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran (BA 018) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 17 Mei 2026

Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Representasi Manajemen	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	53
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	121
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	139
F. Pengungkapan Penting Lainnya	147
VI. Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1	Peraturan Bantuan Pemerintah Sesuai Karakteristik Eselon I
Lampiran A.2.1	Rincian Perbandingan Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Per 31 Desember 2025
Lampiran A.2.2	Kode dan Nama Satker Kementerian Pertanian Tahun 2025
Lampiran B.1.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.1.2	Anggaran dan Realisasi PNBPN Lainnya Kementerian Pertanian untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.1.2.1	Pendapatan Lain-Lain Kementerian Pertanian per 31 Desember 2025
Lampiran B.1.2.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.3.1	Jumlah dan Komposisi Pegawai Kementerian Pertanian 31 Desember 2025
Lampiran B.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.4.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.4.2	Rincian Jenis Bantuan Pemerintah Berdasarkan Program untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran C.1	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2025 – Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.2	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2025 – Bendahara Penerimaan
Lampiran C.3	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2025 –Rekening Lainnya
Lampiran C.9.1	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025
Lampiran C.9.2	Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk Ditjen LIP Per 31 Desember 2025
Lampiran C.10	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2025
Lampiran C.11	Rincian Piutang Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024
Lampiran C.12.1, C.12.2, dan C.12.3	Daftar Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2025
Lampiran C.13.1	Rincian Barang Persediaan per 31 Desember 2025
Lampiran C.13.2	Persediaan yang Tidak dikuasai pada modul persediaan
Lampiran C.19 dan C.19.1	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025
Lampiran C.23	Rincian Piutang TP/TGR per 31 Desember 2025
Lampiran C.24	Rincian Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025
Lampiran C.25	Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran C.26	Rincian Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran C.27 dan C.27.1	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025
Lampiran C.29	Penjelasan Rincian Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025
Lampiran C.31	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025
Lampiran C.32	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025

Lampiran E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran E.3.2	Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran E.3.3	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran E.3.4	Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran E.4.3.1	Rincian Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran E.4.3.2	Rincian Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran E.4.3.3	Rincian selisih Transfer Masuk/Transfer Keluar
Lampiran E.4.4	Rincian Pengesahan Hibah Langsung yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran F.1.1	Progress Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang tersaji sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran F.1.2	Progress Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara (intrakomptable dan ekstrasomptable) sampai dengan 31 Desember 2025
Lampiran F.2	Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional Tahun 2025
Lampiran F.3.1, F.3.2, dan F.3.3	Rincian Sengketa BMN lingkup Kementerian Pertanian
Lampiran F.5.1, F.5.2, dan F.5.3	Rincian Data Hibah Langsung, Hibah terencana dan Data Pinjaman Luar Negeri
Lampiran F.6.1, dan F.6.2	Monitoring status Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025
Lampiran F.7.1, dan F.7.2.	Rincian mengenai jenis barang, merek, jumlah unit, nilai, serta pihak penerima
Lampiran F.8.	Rincian Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Kementerian Pertanian Tahun 2025
Lampiran F.9.	Monitoring Daftar Temuan Dan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Serta Tindak Lanjut Atas Temuan BPK Tahun 2025
Lampiran F.12.1 dan F.12.2	Monitoring Penyelesaian Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Berupa Uang dan Persediaan tidak dikuasai
Lampiran F.12.3	Rincian monitoring hasil reviu pertanggungjawaban Belanja Banpem oleh Itjen pada aplikasi BASTBANPEM
Lampiran F.12.4	Monitoring persediaan Banpem yang tidak dikuasai terutama untuk bantuan benih dan bantuan alsintan pasca panen pada Ditjen Tanaman Pangan



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A.2.1	Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja Tahun 2025	12
Tabel A.2.2	Rincian Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian TA 2025	12
Tabel A.2.3	Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2025	13
Tabel A.2.4	Pendekatan Subtansi Biologis dan Transformasi Biologis	32
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBK TA 2025	35
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025	35
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	39
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program	39
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	40
Tabel B.2.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 Berdasarkan Eselon I	40
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis	41
Tabel B.2.2.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Eselon I	41
Tabel B.2.2.3	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon I	42
Tabel B.2.2.4	Rincian Selisih Realisasi dengan Nilai Kontrak BASTBANPEM	43
Tabel B.2.2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen TP	43
Tabel B.2.2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Horti	44
Tabel B.2.2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Bun	45
Tabel B.2.2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PKH	45
Tabel B.2.2.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PSP	46
Tabel B.2.2.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah BPPSDMP	47
Tabel B.2.2.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah BRMP	47
Tabel B.2.2.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen LIP	48
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	48
Tabel B.2.3.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Eselon I	48
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	49
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I	49
Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	50
Tabel B.2.3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I	50
Tabel B.2.3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025	51
Tabel B.2.3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Berdasarkan Eselon I	51
Tabel B.2.3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025	51
Tabel B.2.3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Eselon I	51
Tabel B.2.3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025	52
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024	53
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	53
Tabel C.1.1	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024	54
Tabel C.2.1	Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024	58
Tabel C.2.2	Daftar Setoran Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025	59
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel C.3.2	Saldo Kas Lainnya dari Hibah pada Eselon I BRMP	61

Tabel C.4.1	Saldo Kas pada BLU per 31 Desember dan 2024	63
Tabel C.4.2	Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU	63
Tabel C.5.1	Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember dan 2024	64
Tabel C.5.2	Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya	64
Tabel C.5.3	Rekening Deposito Satker BLU BIB Lembang	65
Tabel C.5.4	Rekening Deposito Satker BLU BBIB Singosari	65
Tabel C.6.1	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember dan 2024	65
Tabel C.7.1	Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024	66
Tabel C.7.2	Saldo Uang Muka Belanja per Kontrak pada Eselon I Ditjen Perkebunan	67
Tabel C.7.3	Saldo Uang Muka Belanja per Kontrak pada Eselon I Ditjen LIP-Jambi	67
Tabel C.7.4	Saldo Uang Muka Belanja per Kontrak pada Eselon I Ditjen LIP-Merauke	67
Tabel C.8.1	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024	68
Tabel C.8.2	Daftar Setoran Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025	68
Tabel C.9.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember dan 2024	69
Tabel C.9.2	Rekapitulasi Perhitungan Kualitas Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2025	69
Tabel C.9.3	Saldo Piutang Bukan Pajak Terkait Temuan BPK terhadap Usulan Jurnal Koreksi per 31 Desember 2025	70
Tabel C.9.4	Saldo Piutang Bukan Pajak Per Satker 10 Propinsi Ditjen LIP per 31 Desember 2025	71
Tabel C.9.5	Saldo Piutang Bukan Pajak Per Satker Ditjen LIP per 31 Desember 2025	72
Tabel C.10.1	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	75
Tabel C.10.2	Rekapitulasi Perhitungan Kualitas Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2025	76
Tabel C.11.1	Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024	77
Tabel C.11.2	Rekapitulasi Perhitungan Kualitas Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025	77
Tabel C.12.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024	77
Tabel C.13.1	Saldo Persediaan per Eselon I per 31 Desember 2025 dan 2024	79
Tabel C.13.2	Rincian Persediaan Menurut Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	79
Tabel C.14	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	81
Tabel C.14.1	Rekapitulasi Transfer Keluar dan Transfer Masuk Aset Tetap pada Kementerian Pertanian	83
Tabel C.14.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	84
Tabel C.14.3	Rincian Tanah Berdasarkan Eselon I	85
Tabel C.14.4	Rincian Tanah Bersertifikat	85
Tabel C.14.5	Rincian Tanah Belum Bersertifikat	86
Tabel C.14.6	Rincian Tanah Bersertifikat Tidak sesuai Ketentuan	86
Tabel C.14.7	Rincian Tanah Bersertifikat dikuasai Pihak Ketiga	87
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	88
Tabel C.15.2	Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I	95
Tabel C.16.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	95
Tabel C.16.2	Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I	98
Tabel C.17.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	98
Tabel C.17.2	Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I	100

Tabel C.18.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	100
Tabel C.18.2	Rincian Aset Tetap Lainnya berdasarkan Eselon I	102
Tabel C.19.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	103
Tabel C.20.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	104
Tabel C.21.1	Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	105
Tabel C.21.2	Aset Properti Investasi pada Eselon I BRMP per 31 Desember 2025	105
Tabel C.22.1	Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	106
Tabel C.23	Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024	106
Tabel C.23.1	Saldo Piutang Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	107
Tabel C.24.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	107
Tabel C.25.1	Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	108
Tabel C.26.1	Saldo Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	108
Tabel C.27	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	109
Tabel C.27.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	109
Tabel C.27.2	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	111
Tabel C.28.1	Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024	112
Tabel C.28.2	Monitoring Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025	112
Tabel C.29.1	Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024	113
Tabel C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024	114
Tabel C.31	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	115
Tabel C.31.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024	116
Tabel C.31.2	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 per Eselon I	116
Tabel C.31.3	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 per Eselon I	116
Tabel C.32.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	117
Tabel C.33.1	Saldo Uang Muka Dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 per Eselon I	117
Tabel C.34	Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	119
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	121
Tabel D.1.1	Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024	121
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO	122
Tabel D.1.3	Selisih Realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan Pendapatan BLU di LO	122
Tabel D.2	Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional pada LO	123
Tabel D.2.1	Perbandingan Pendapatan PNBPN Lainnya (Khusus Kegiatan Operasional) di LRA dengan LO	123
Tabel D.2.2	Selisih Pendapatan PNBPN Lainnya (Khusus Kegiatan Operasional)	124
Tabel D.3.1	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	125
Tabel D.3.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO	125
Tabel D.3.3	Selisih Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2024 di LRA dengan LO	126
Tabel D.5.1	Beban Barang dan Jasa Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	127

Tabel D.5.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	127
Tabel D.5.3	Selisih Belanja/Beban Barang dan Jasa di LRA dengan LO	128
Tabel D.6	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	129
Tabel D.6.1	Selisih Belanja/Beban Pemeliharaan di LRA dengan LO	129
Tabel D.7	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	130
Tabel D.7.1	Selisih Belanja/Beban Perjalanan Dinas di LRA dengan LO	130
Tabel D.8.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	131
Tabel D.8.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	131
Tabel D.8.3	Penjelasan selisih Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	131
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	132
Tabel D.10.1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	133
Tabel D.11	Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	134
Tabel D.12	Beban Pelepasan Aset Non Lancar Kementerian Pertanian Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	135
Tabel D.13.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	135
Tabel D.14.1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	137
Tabel D.14.2	Beban Persediaan Rusak/Usang pada Ditjen PKH	137
Tabel E.4.3	Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar Per Eselon I	141
Tabel E.4.4	Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025	142
Tabel E.4.5	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025	143
Tabel E.4.6	Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025	145
Tabel F.1.3.1	Rincian Satuan Kerja Likuidasi Ditjen Hortikultura Tahun 2025	147
Tabel F.1.3.2	Mutasi Persediaan Satuan Kerja Inaktif Per 31 Desember 2025	148
Tabel F.1.3.3	Mutasi Piutang Satuan Kerja Inaktif Per 31 Desember 2025	149
Tabel F.1.3.4	Progress Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara	150
Tabel F.1.4.1	Likuidasi Satker Dijen Perkebunan	150
Tabel F.2.1	Rincian Prioritas Nasional 02	152
Tabel F.2.2	Rincian Prioritas Nasional 05	152
Tabel F.3.1	Perkembangan Aset-aset yang bermasalah lingkup Kementerian Pertanian	152
Tabel F.4	Data Alokasi dan Realisasi Anggaran SBSN TA.2025 Lingkup Kementerian Pertanian	153
Tabel F.5.1	Rekapitulasi Proyek Pinjaman TA 2025	154
Tabel F.5.2	Rekapitulasi Komitmen Pinjaman Tahun 2025	154
Tabel F.5.3	Rekapitulasi Realisasi Pinjaman Alokasi Pusat TA 2025	155
Tabel F.5.4	Rekapitulasi Realisasi Pinjaman Alokasi Daerah/Ongranting TA 2025	155
Tabel F.5.5	Rekapitulasi Tujuan Pinjaman Tahun 2025	155
Tabel F.5.6	Rekapitulasi Komitmen Hibah Terencana TA 2025	156
Tabel F.5.7	Rekapitulasi Realisasi Hibah Terencana TA 2025	157

Tabel F.5.8	Rekapitulasi Komitmen Hibah Langsung TA 2025	157
Tabel F.5.9	Rekapitulasi Nilai Komitmen Hibah Langsung TA 2025	158
Tabel F.6.1	Rekapitulasi Data Sistem Informasi Manajemen Aset terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP)	159
Tabel F.7.1	Rencana Alih Status BMN TA 2024	160
Tabel F.7.2	Rekapitulasi Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AL, TNI AU, POLDA dan UNHAN TA.2024	160
Tabel F.7.3	Rencana Alih Status BMN TA. 2025	161
Tabel F.9	Progres Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024	162
Tabel F.10	Rincian Utang/Kewajiban Pembiayaan Syariah	163
Tabel F.11	Daftar BLU yang menggunakan Saldo Awal Kas BLU Tahun 2025	164
Tabel F.12	Monitoring Proses Pemindahtanganan Persediaan Banpem	166



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp143.052.642.385,00 atau mencapai 182,21% dari anggaran sebesar Rp78.510.750.000,00 serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp358.308.297.589,00 atau 242,23% dari anggaran sebesar Rp147.923.343.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.093.847.776.203,00 atau mencapai 78,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp31.930.741.034.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, Kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp86.158.544.866.312,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.940.300.737.970,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp75.332.641.275.051,00; Properti Investasi sebesar Rp15.025.103.529,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp5.129.199.784,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp6.865.448.549.978,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.764.588.918.029,00 dan Rp83.393.955.948.283,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp334.321.607.936,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp18.421.684.192.926,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp18.087.362.584.990,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp167.864.066.864,00 dan Rp0,00 sehingga Kementerian Pertanian pada Tahun 2025 mengalami Defisit-LO sebesar Rp17.919.498.518.126,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp78.679.371.187.770,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp17.919.498.518.126,00. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp208.928.206.725,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.843.011.485.364,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp83.393.955.948.283,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	78.510.750.000	143.052.642.385	182.21	77.937.552.304
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	147.923.343.000	358.308.297.589	242.23	270.709.790.703
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		226.434.093.000	501.360.939.974	221.42	348.647.343.007
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	1.725.282.786.000	1.671.162.845.883	96.86	1.610.654.035.767
Belanja Barang	B.2.2	29.730.142.566.000	22.975.378.699.349	77.28	12.311.018.139.605
Belanja Modal	B.2.3	475.315.682.000	447.306.230.971	94.11	384.063.214.931
JUMLAH BELANJA NEGARA		31.930.741.034.000	25.093.847.776.203	78.59	14.305.735.390.303



Jakarta, 17 Mei 2026
Menteri Pertanian.

Andi Amran Sulaiman



NERACA

II. NERACA

KEMENTERIAN PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.663.534.525	50.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	63.675.107	347.500
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	7.261.575.654	8.998.694.303
Kas pada BLU	C.4	37.031.048.393	13.662.013.011
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	136.140.383.548	119.140.383.548
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	1.267.803.895	143.811.096.406
Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>)	C.7	45.627.931.810	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	193.264.700	21.971.215
Piutang Bukan Pajak	C.9	271.894.760.120	15.654.555.309
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.10	10.228.755.441	9.596.500.361
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.11	1.495.000.633	1.573.354.605
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.12	(14.568.988.702)	(15.841.267.306)
Persediaan	C.13	3.442.001.992.846	409.128.324.634
JUMLAH ASET LANCAR		3.940.300.737.970	705.795.973.586
ASET TETAP			
Tanah	C.14	69.798.086.740.797	70.638.305.210.953
Peralatan dan Mesin	C.15	5.400.260.235.357	6.166.681.514.547
Gedung dan Bangunan	C.16	6.025.454.140.262	6.851.935.669.462
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	682.135.640.758	744.888.902.341
Aset Tetap Lainnya	C.18	65.264.761.207	65.822.305.906
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	144.438.352.432	22.005.998.264
Akumulasi Penyusutan	C.20	(6.782.998.595.762)	(7.227.166.439.667)
JUMLAH ASET TETAP		75.332.641.275.051	77.062.473.161.806
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	16.291.624.283	20.616.099.283
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	(1.266.520.754)	(1.210.822.830)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		15.025.103.529	19.405.276.453
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.23	4.312.662.979	5.919.522.531
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.24	(1.876.635.726)	(3.642.577.725)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	13.400.531.398	17.698.195.995
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.26	(10.707.358.867)	(7.799.817.990)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		5.129.199.784	12.175.322.811
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.27	138.718.675.259	130.810.261.648
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.28	6.522.750.952.581	409.728.652.688
Aset Lain-lain	C.29	637.327.963.396	1.191.863.907.620
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.30	(433.349.041.258)	(504.942.181.850)
JUMLAH ASET LAINNYA		6.865.448.549.978	1.227.460.640.106
JUMLAH ASET		86.158.544.866.312	79.027.310.374.762

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.31	2.754.262.971.515	343.453.809.501
Pendapatan Diterima Dimuka	C.32	8.221.603.744	4.435.377.491
Uang Muka dari KPPN	C.33	1.663.534.525	50.000.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.34	440.808.245	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.764.588.918.029	347.939.186.992
JUMLAH KEWAJIBAN		2.764.588.918.029	347.939.186.992
EKUITAS			
Ekuitas	C.35	83.393.955.948.283	78.679.371.187.770
JUMLAH EKUITAS		83.393.955.948.283	78.679.371.187.770
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		86.158.544.866.312	79.027.310.374.762

Jakarta, 17 Mei 2026

Menteri Pertanian.



Andi Amran Sulaiman



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

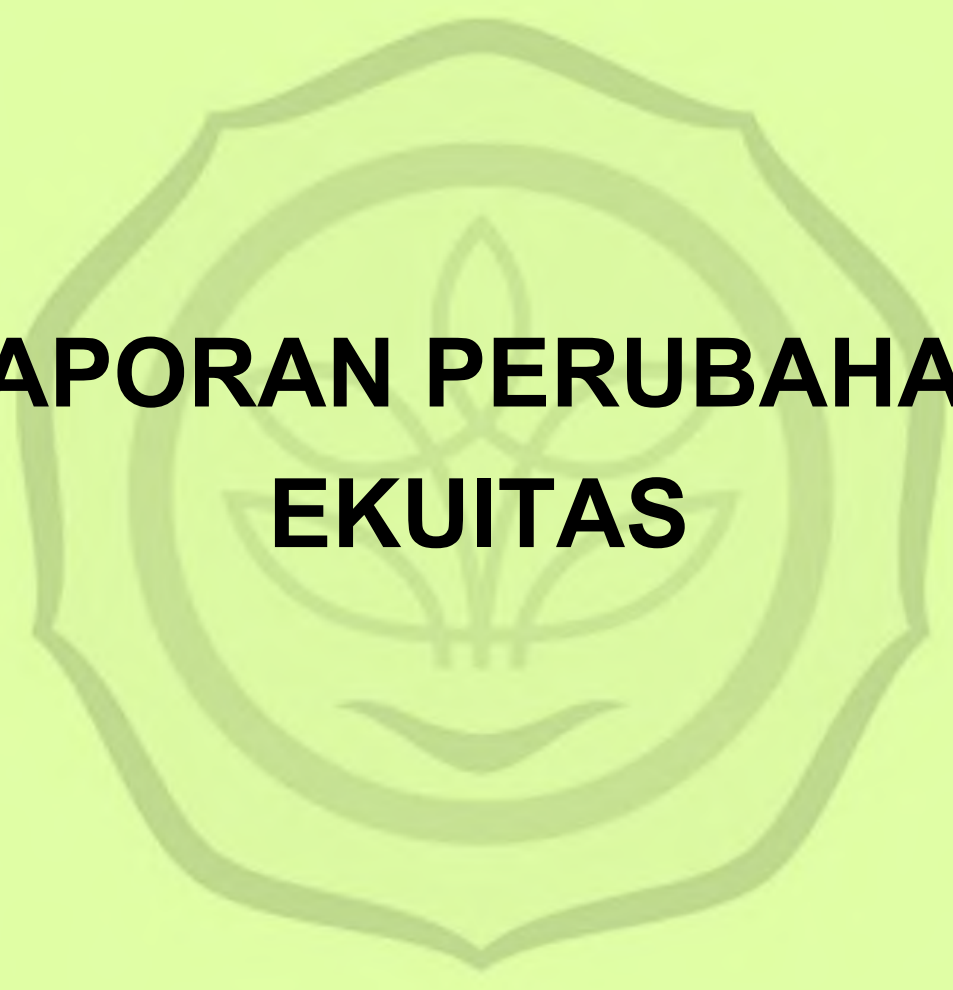
Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	141.455.461.277	67.914.777.523	73.540.683.754	108,284
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	192.866.146.659	161.498.555.071	31.367.591.588	19,423
JUMLAH PENDAPATAN		334.321.607.936	229.413.332.594	104.908.275.342	45,729
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	1.701.817.215.861	1.640.535.271.082	61.281.944.779	3,735
Beban Persediaan	D.4	450.517.032.648	616.959.675.138	(166.442.642.490)	(26,978)
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.944.571.797.909	2.283.771.581.716	(339.199.783.807)	(14,853)
Beban Pemeliharaan	D.6	304.627.113.944	267.611.609.289	37.015.504.655	13,83
Beban Perjalanan Dinas	D.7	851.202.004.298	1.217.982.535.208	(366.780.530.910)	(30,114)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	12.718.677.925.651	8.517.423.102.082	4.201.254.823.569	49,325
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	450.552.506.101	585.994.707.547	(135.442.201.446)	(23,113)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(281.403.486)	1.281.893.404	(1.563.296.890)	(121,952)
JUMLAH BEBAN		18.421.684.192.926	15.131.560.375.466	3.290.123.817.460	21,743
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18.087.362.584.990)	(14.902.147.042.872)	(3.185.215.542.118)	21,37
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(96.786.044.006)	(61.155.343.194)	(35.630.700.812)	58,263
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	10.421.012.464	8.215.529.847	2.205.482.617	26,845
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	107.207.056.470	69.370.873.041	37.836.183.429	54,542
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		264.650.110.870	(3.434.838.138)	268.084.949.008	(7.804,879)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	275.352.144.509	222.869.182.816	52.482.961.693	23,549
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	10.702.033.639	226.304.020.954	(215.601.987.315)	(95,271)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		167.864.066.864	(64.590.181.332)	232.454.248.196	(359,891)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(17.919.498.518.216)	(14.966.737.224.204)	(2.952.761.294.012)	19,729

Jakarta, 17 Mei 2026
Menteri Pertanian.



Andi Amran Sulaiman



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	78.679.371.187.770	80.516.531.240.504
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(17.919.498.518.126)	(14.966.737.224.204)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	(208.928.206.725)	(111.219.974.474)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	4.499.172.050	2.976.452.651
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	1.225.086.475	277.856.080.690
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	(28.364.016.803)	(314.374.396.815)
Koreksi Lain-lain	E.3.4	(186.288.448.447)	(77.678.111.000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	22.843.011.485.364	13.240.797.145.944
Ditagikan Ke Entitas Lain	E.4.1	24.970.967.162.661	14.187.548.576.691
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	(358.452.939.629)	(270.709.790.703)
Transfer Keluar	E.4.3	(4.620.684.069.753)	(2.815.774.979.103)
Transfer Masuk	E.4.4	2.516.230.436.770	1.768.317.823.937
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	334.106.974.080	336.876.125.622
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	(319.685.765)	(127.847.525)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	1.163.607.000	34.667.237.025
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	4.714.584.760.513	(1.837.160.052.734)
EKUITAS AKHIR	E.6	83.393.955.948.283	78.679.371.187.770



Jakarta, 17 Mei 2026
Menteri Pertanian.

Andi Amran Sulaiman



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 adalah:

Visi

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi

- Meningkatkan Kesejahteraan Petani.
- Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian.
- Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia.
- Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia, serta
- Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat.

Untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Berikut merupakan kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Kementerian Pertanian:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pertanian.
2. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan dan irigasi pertanian.
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan hilirisasi hasil tanaman pangan.
5. Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Horti) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas hortikultura dan hilirisasi hasil hortikultura.
6. Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Bun) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas perkebunan dan hilirisasi hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan.
8. Inspektorat Jenderal (Itjen) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian..
9. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pada Semester I Tahun 2025 terdapat kejadian penting berkaitan dengan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu Perubahan nomenklatur organisasi semula Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, Brigade Alsintan, Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan Brigade Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan/Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan/Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun (Karlabin);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan
5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri,

mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian di atas, sudah diterbitkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis Bantuan Pemerintah sesuai dengan karakteristik Eselon I terkait. Peraturan tersebut dapat dijelaskan pada **Lampiran A.1**.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-86/PB/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (*Audited*) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Kementerian Pertanian seperti Eselon I, dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 8 Mei 2026.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2025 Kementerian Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp29.373.984.361.000,00. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Realokasi Anggaran berupa :
 - a. Pemanfaatan anggaran internal (blokir anggaran perjadi/sisa efisiensi) untuk peningkatan produk jagung.
 - b. *Refocusing* Anggaran Peningkatan Produksi Gula.
 - c. Realokasi Akibat Reorganisasi pada Eselon I Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian & Museum Tanah dan Pertanian pada Eselon I BPPSDMP.

- d. Pemanfaatan Blokir Anggaran Perjalanan Dinas untuk kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan strategis lainnya yaitu telah dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung.
 - e. Pemanfaatan Blokir Anggaran Perjalanan Dinas untuk kebutuhan belanja pegawai Tahap II dilakukan dalam rangka terlaksananya proses pengangkatan dan penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Kementerian Pertanian TA 2025, diperlukan pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai pada Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk peningkatan produksi hilirisasi komoditas perkebunan sebesar Rp2.460.466.481.000,00.
 3. Penyesuaian Non Rupiah Murni sebesar Rp96.290.192.000,00.

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* jumlah Pagu Anggaran Akhir yang tercatat sebesar Rp31.930.741.034.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Pertanian Tahun 2025 *Audited* dapat dilihat pada **Lampiran A.2.1.**

**Tabel A.2.1 Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Anggaran (Rp)
2025	377	31.930.741.034.000
2024	578	15.618.991.468.000
2023	555	14.808.873.722.000
2022	555	16.443.954.161.000

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 sebanyak 377 satker (DIPA) sebagaimana tabel berikut. Satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 tersaji pada **Lampiran A.2.2.**

Tabel A.2.2 Rincian Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian TA 2025

No	Nama Eselon I	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
		KP		KD		DK		TP		
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	Setjen	4	0	0	0	0	0	0	0	4
2	Itjen	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Ditjen TP	1	0	2	0	34	0	33	0	70
4	Ditjen Horti	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Ditjen Bun	1	0	4	0	0	0	0	0	5
6	Ditjen PKH	1	0	23	0	0	0	38	0	62
7	Ditjen PSP	1	0	0	0	36	0	37	0	74
8	BRMP	1	0	63	0	0	0	0	0	64
9	BPPSDMP	1	0	24	0	38	0	0	0	63
10	Ditjen LIP	1	0	0	0	0	0	32	0	33
Jumlah		13	0	116	0	108	0	140	0	377

Keterangan:

M : Menyampaikan LK

TM : Tidak Menyampaikan LK

Nilai anggaran untuk Dana Dekonsentrasi Tahun 2025 yang dikelola oleh 108 satker adalah Rp19.676.579.000,00, sedangkan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024 yang dikelola oleh 140 satker adalah sebesar Rp11.625.872.230.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel A.2.3 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2025

Eselon I	Dana Dekonsentrasi		Tugas Pembantuan	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Ditjen TP	8.626.579.000	8.523.756.145	15.703.934.000	14.909.324.902
Ditjen PKH	0	0	28.520.639.000	25.300.866.784
Ditjen PSP	5.350.000.000	1.920.164.305	1.241.020.672.000	1.191.637.388.510
BPPSDMP	5.700.000.000	5.634.244.825	0	0
Ditjen LIP	0	0	10.340.626.985.000	7.908.978.350.692
Jumlah	19.676.579.000	16.078.165.275	11.625.872.230.000	9.140.825.930.888

Sesuai ketentuan Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bahwa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga agar mengungkapkan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN Dan Prioritas Nasional Tahun 2025, serta berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kementerian Pertanian terdapat Alokasi Anggaran untuk terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) sebanyak 2 Prioritas Nasional dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

- Prioritas Nasional II** : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. kegiatan prioritas, yang tersebar di Kementerian Pertanian dengan pagu mencapai Rp16.137.598.750.000 dan realisasi sebesar Rp12.201.294.313.779,00 atau 75,61%.
- Prioritas Nasional V** : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Pelaksanaannya difokuskan pada kawasan kelapa dan kawasan sagu, yang tersebar di Kementerian pertanian dengan pagu mencapai Rp88.083.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp88.057.398.957,00 atau 99,97%.

Dalam alokasi anggaran PN tidak termasuk alokasi anggaran untuk Dukungan Manajemen, sedangkan dalam alokasi anggaran Banpem termasuk alokasi anggaran untuk Dukungan Manajemen dan alokasi tersebut masuk dalam akun belanja 526xxx (tidak terpisahkan).

Perbedaan antara realisasi Bantuan Pemerintah pada akun 526 dan realisasi Rincian Output Prioritas Nasional (PN) terletak pada fokus pengukurannya. Realisasi akun 526 berorientasi pada penyerapan anggaran atau aspek keuangan, yaitu sejauh mana dana bantuan pemerintah telah dicairkan dan dibayarkan sesuai mekanisme APBN. Sementara itu, realisasi Output PN berorientasi pada capaian kinerja dan target pembangunan, yaitu sejauh mana output kegiatan benar-benar telah terlaksana, diterima, dan dimanfaatkan oleh

penerima manfaat. Akibat perbedaan pendekatan tersebut, realisasi akun 526 dapat lebih tinggi dibanding capaian Output PN.

Kondisi ini biasanya terjadi karena secara administratif pembayaran bantuan sudah selesai, namun distribusi fisik, verifikasi penerima, atau pelaporan capaian output masih dalam proses. Selain itu, kedua indikator juga menggunakan sumber data yang berbeda, di mana akun 526 berbasis sistem keuangan seperti SAKTI dan OM-SPAN, sedangkan Output PN berbasis sistem monitoring kinerja seperti KRISNA dan e-Monev.

Artinya, realisasi akun 526 mencerminkan kinerja penyerapan anggaran, sedangkan realisasi Output PN mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dengan demikian terkait munculnya perbedaan realisasi PN dan Belanja 526 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi output PN mengukur capaian fisik untuk jenis RO yg masuk PN saja.
2. Capaian 526 mengukur realisasi anggaran banper baik PN maupun non PN

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi pemerintah pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 mengacu pada PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima

atau dibayarkan oleh Pemerintah. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO) adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut.

a. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

Pengukuran :

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dengan menggunakan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO yaitu Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

Pendapatan PNB-LO terdiri dari Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO

dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

- b. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

c. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

d. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya

kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material

harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Definisi:

Uang Muka Belanja adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya. Pembayaran uang muka umumnya terjadi pada transaksi uang muka pembelian aset. Dalam hal pembayaran uang muka telah dilakukan dan sampai dengan akhir periode pelaporan belum terdapat realisasi pekerjaan atas pembayaran uang muka dimaksud, maka atas nilai pekerjaan yang belum terealisasi tersebut diakui sebagai Uang Muka Belanja.

Pengakuan:

Atas pembayaran uang muka yang telah dilakukan dan telah diterima prestasi atau realisasi pekerjaan maka entitas mengakui Aset/KDP/Beban Jasa sesuai dengan jenis aset atau pekerjaan yang diadakan.

Pengukuran:

Uang Muka Belanja dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Uang Muka Belanja disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

8) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

9) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk

dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

10) Persediaan Tidak dikuasai

Persediaan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan BMN, tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap

dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang

maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Apabila penerimaan pembiayaan berbasis syariah menghasilkan Persediaan/Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya, maka pengakuan, pengukuran, penyajian aset secara umum juga diterapkan pada saat aset dikuasai dan/atau dimiliki, digunakan oleh pemerintah, dan dapat diukur secara andal.

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Kementerian Pertanian pada prinsipnya belum menerapkan PSAK 69 secara langsung dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP/LKKL), karena entitas pemerintah pusat menggunakan:

- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual;
- PMK Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Namun secara substansi, kegiatan pertanian di Kementan memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan ruang lingkup **PSAK 69 Agrikultur**, khususnya terkait: 1) hewan hidup; 2) tanaman produktif; 3) benih; 4) bibit; 5) ternak pengembangbiakan; 6) komoditas biologis; 7) hasil panen; 8) persediaan biologis.

Karena itu, praktik pengelolaan di Kementan dapat disebut sebagai “adopsi substansi PSAK 69 dalam kerangka SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah.”

Bentuk Praktik PSAK 69 Di Kementan

A. Pengakuan “aset biologis” sebagai persediaan

Contoh : 1) benih padi; 2) bibit sapi; 3) ayam; 4) kambing; 5) bibit hortikultura. Di Kementan dicatat sebagai Persediaan berdasarkan : 1) SAP; 2) PMK 100; 3) juknis persediaan.

Praktik Nyata Di Kementan

Contoh 1 — Benih Bantuan Pemerintah

Saat pengadaan:

Dicatat sebagai:

- Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat.

Saat distribusi:

Jika belum BAST:

- tetap masuk dalam kelompok BMN;
- dapat menjadi “Persediaan Tidak Dikuasai”.

Saat BAST selesai:

- mutasi keluar;
- hibah selesai;
- penghentian pengakuan.

Contoh 2 — Ternak Bantuan

Ternak:

- sapi;
- kambing;
- ayam.

Dicatat sebagai:

- persediaan;
- atau ekstrakomptabel

Risiko biologis:

- mati;
- sakit;
- berkembang biak.

Dalam praktik:

- dilakukan opname fisik;
- berita acara kematian;
- pengungkapan kehilangan/susut.

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan baru terkait Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman) PMK No 85 Tahun 2025 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual No 20 Agrikultur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan isi PSAP 20 dengan fokus utama adalah pengaturan akuntansi agrikultur, termasuk pengaturan aset biologis, produk agrikultur, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Dari sudut pandang Kementerian Pertanian, implementasi PSAP 20 akan sangat berdampak pada:

- benih;
- bibit;
- ternak;
- tanaman;
- hasil produksi pertanian;
- persediaan biologis;
- bantuan pemerintah berbasis agrikultur;
- barang untuk diserahkan ke masyarakat.

Langkah-Langkah Kementan Mempersiapkan PSAP 20

I. Pemetaan Objek Agrikultur Kementan

Langkah 1 — Identifikasi seluruh aset biologis

Kementan harus memetakan:

- benih;
- bibit;
- ternak
- tanaman produktif;
- tanaman belum menghasilkan;
- hasil panen;
- hasil pembibitan;
- produk agrikultur;
- aset biologis ternak
- aset biologis tanaman
- bantuan pemerintah

Tujuan:

Menentukan mana yang:

- masuk persediaan;
- masuk aset tetap (ekstrakomptabel)

Output:

- daftar aset biologis kmentan
- mapping per Eselon I lingkup kementan
- klasifikasi akun SAKTI

II. Penyesuaian Kebijakan

Langkah 2 — Revisi atau Penyusunan Kebijakan

Perlu revisi:

- Permentan Persediaan;
- Finalisasi Draft Permentan terkait Aset Biologis;
- SOP BMN (Aset Tetap dan Persediaan);

Karena PSAP 20 memperkenalkan pendekatan substansi biologis dan transformasi biologis. Hal yang harus diatur.

Tabel A.2.4. Pendekatan Substansi Biologis dan Transformasi Biologis

No	Area	Pengaturan
1	Hewan hidup	Pengakuan
2	Tanaman hidup	Klasifikasi
3	Produk panen	Reklasifikasi
4	Kematian ternak	Penurunan nilai
5	Benih rusak	Pengungkapan
6	Bantuan biologis	Pengungkapan
7	Bantuan pemerintah	Pengungkapan

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK). Kementerian Pertanian melakukan pencatatan atas aset hewan dan tumbuhan sebagai aset ekstrakomtabel karena sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pada Bab VIII, Bagian Kedua Kapitalisasi BMN Berupa Aset Tetap pasal 40 bahwa Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca, dikecualikan dari ketentuan untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (*probable*). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pada saat pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual, pemerintah mengambil kebijakan untuk hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antarentitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, dan koreksi nilai aset non revaluasi yang disebabkan karena kesalahan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp501.360.939.974,00 atau 221,41% dari anggaran sebesar Rp226.434.093.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU				
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	78.510.750.000	130.593.980.134	166,34	68.067.903.784
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	2.196.986.434	0,00	661.950.754
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	10.261.675.817	0,00	9.207.697.766
425	Pendapatan PNBPA Lainnya				
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	61.324.681.000	89.601.760.021	146,11	79.013.569.995
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	61.618.340.000	82.006.251.894	133,09	67.274.292.792
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	72.200
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	16.011.545.000	15.693.606.822	98,01	11.480.119.728
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	8.956.126.000	12.521.641.295	139,81	7.327.732.554
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	12.490.565.612	0,00	7.721.282.898
4258	Pendapatan Denda	0	6.922.330.235	0,00	6.941.039.258
4259	Pendapatan Lain-Lain	12.651.000	139.072.141.710	1.099.297,62	90.951.681.278
Jumlah		226.434.093.000	501.360.939.974	221,42	348.647.343.007

Realisasi PNBPA TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran**

B.1.1**B.1.1. Pendapatan BLU**

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp143.052.642.385,00 dan Rp77.937.552.304,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp143.052.642.385,00 atau 182,21% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp78.510.750.000,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp65.115.090.081,00 atau 83,55% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	32.500.000.000	30.927.857.870	31.344.566.652	(416.708.782)
	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	26.151.250.000	18.110.949.544	22.788.758.685	(4.677.809.141)
	PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA	19.859.500.000	81.555.172.720	13.934.578.447	67.620.594.273
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA	0	2.196.986.434	661.950.754	1.535.035.680

Uraian Pendapatan	Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan BLU Lainnya	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	0	5.156.620.772	5.287.022.227	(130.401.455)
	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	0	2.085.245.601	1.798.392.859	286.852.742
	PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA	0	3.019.809.444	2.122.282.680	897.526.764
	Jumlah	78.510.750.000	143.052.642.385	77.937.552.304	65.115.090.081

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pendapatan yang bersumber jasa layanan satker berdasarkan tugas dan fungsi satker masing-masing. Terjadinya peningkatan dari tahun 2024 disebabkan :
 - Peningkatan pendapatan penjualan obat hewan yang sangat signifikan khususnya penjualan vaksin PMK, dimana terdapat dukungan dari Eselon I untuk belanja penggunaan vaksin PDN dan penjualan vaksin unggas melalui mekanisme kerjasama ke PT SHS dan PT Samawa (BBVetma Pusvetma).
 - Terjadi peningkatan dari tahun 2024 disebabkan peningkatan penerimaan semen beku dan bimtek sebesar Rp494.688.089,00 dari tahun 2024 dengan total penerimaan tahun 2025 sebesar Rp29.016.713.667,00 dan kenaikan dari layanan Tempat Uji Kompetensi sebesar Rp.506.096.600,00 dari total penerimaan tahun 2025 sebesar Rp1.270.597.100,00 (BBIB Singosari).
- Pendapatan hasil kerjasama BLU merupakan pendapatan yang didapatkan dari hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga atas pemanfaatan lahan yang dimiliki satker. Terjadinya peningkatan dari tahun 2024 disebabkan :
 - Pendapatan imbal hasil atas kerjasama dengan klinik hewan radian, penyewaan lapangan tenis, ghraha, guest house, lahan parkir dan kost. Selain itu terdapat kerjasama penjualan seed PMK ke PT Biotis (BBVetma Pusvetma).
 - Peningkatan dengan nilai sebesar Rp627.643.583,00 dari penerimaan kerjsama kafe sebesar Rp152.874.710,00 dan penerimaan dari kerjasama sapi perah sebesar Rp474.768.873,00 (BBIB Singosari).
- Pendapatan BLU Lainnya merupakan pendapatan yang bersumber dari penerimaan selain dari penerimaan selain berdasarkan tugas fungsi satker dan hasil kerjasama diantara nya dapat berupa pendapatan jasa giro bank.

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp358.308.297.589,00 atau 242,23% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp147.923.343.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp87.598.506.886,00 atau 32,36% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain :

- Kenaikan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya yang berasal dari Perolehan hasil Pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, dan daging).
- Adanya pendapatan sewa diterima dimuka dari Bank penyewa dan sewa auditorium gedung D dan F.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berupa pengembalian atas Temuan Hasil

Pemeriksaan BPK dan Itjen.

4. Penihilan kontrak transaksi RPATA 2024 yang dikembalikan ke kas negara.
5. Penambahan nilai deposito akibat meningkatnya suku bunga bank dan meningkatnya pemanfaatan fasilitas ruangan oleh pihak internal maupun eksternal dan penambahan pendapatan atas lelang sapi afkir BLU dan potong paksa pada tahun 2025 serta penerimaan dari pekerjaan tahun 2024.

PNBP Lainnya ada juga yang bersumber dari Temuan Pemeriksaan BPK Tahun sebelumnya antara lain :

1. Pengembalian TGR atas Tindak Lanjut Temuan audit BPK pembangunan gedung SBSN TA. 2024 (BVet Medan).
2. Pendapatan Hasil Penjualan Benih Jagung Kelas FS, Ubi Kayu dan Buah Jeruk sesuai Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 (BPMP Babel).
3. Pembayaran Tunjangan Umum, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Kinerja Pegawai Sedang Dalam Masa Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan.
4. Kelebihan Pembayaran Ongkos Kirim Pengadaan Belanja Barang 526.
5. Pengembalian biaya avtur pesawat Tahun 2020.
6. Pengembalian kelebihan pembayaran atas hasil uji pupuk yg tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 dijelaskan pada **Lampiran B.1.2.**

Dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 (*Audited*) sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp89.601.760.021,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll), penjualan peralatan dan mesin.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp82.006.251.894,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Mutu Pestisida
 - b. Pengujian Pupuk
 - c. Pengujian Hama dan Penyakit
 - d. Pengujian Laboratorium Virologi
 - e. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
 - f. Diagnosis Penyakit Hewan
 - g. Pengujian Mutu Pakan
 - h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - i. Pengujian Alat Mesin Pertanian
 - j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
 - k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
 - l. Analisis Gas Rumah Kaca
 - m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
 - n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
 - o. Pengujian Bakteriologi
 - p. Pengujian Virologi

- q. Pengujian Patologi
 - r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
 - s. Pengujian Parasitologi
 - t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
 - u. Sertifikasi produk penggunaan tanda – standar nasional Indonesia (SPPT SNI)
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Kementerian Pertanian. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp15.693.606.822,00 berasal dari empat eselon I.
4. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp12.521.641.295,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
- Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBP untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut.
- a. Satuan Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Perizinan Pertanian, Setjen, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 58,00%
 - b. Ditjen TP, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 66,05%
 - c. Ditjen Bun, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 80,00%
 - d. Ditjen PKH, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 67,00%
 - e. BSIP, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 95,00%
 - f. BPPSDMP, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 86,00%
 - g. Barantan, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 70,00%
5. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp12.490.565.612,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
6. Pendapatan Denda sebesar Rp6.922.330.235,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
7. Pendapatan lain-lain sebesar Rp139.072.141.710,00 dijelaskan pada **Lampiran B.1.2.1**

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

- 1. PP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
- 2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerja sama pemanfaatan mengacu pada PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

1. Realisasi akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu secara signifikan terdapat pada Eselon I Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PKH, dan Ditjen PSP
2. Pada Ditjen PSP Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp69.238.399.208,00 merupakan pengembalian atas belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu, yang diantaranya berasal dari kegiatan bantuan pemerintah, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa tahun anggaran yang lalu. Adapun Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu paling besar berasal dari pengembalian atas kegiatan ekstensifikasi lahan, pengolahan lahan optimasi lahan rawa, SID Cetak Sawah serta Kelebihan Pembayaran PIB dan Pelaksanaan Pelatihan Alsintan Prapanen.
3. Pada Ditjen Tanaman Pangan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp53.708.890.637,00 diantaranya berasal dari setoran pengembalian ongkos kirim, kemahalan harga atas pengadaan pestisida serta pengembalian RPATA sebesar Rp46.011.538.900,00.
4. Pada Ditjen PKH Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp2.777.543.860,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang, denda keterlambatan pengadaan sapi, pengembalian uang lembur dan honorarium.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2.2**

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp25.093.847.776.203,00 atau 78,59% dari anggaran belanja sebesar Rp31.930.741.034.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	1.725.282.786.000	1.671.162.845.883	96,86	1.610.654.035.767
Belanja Barang	29.730.142.566.000	22.975.378.699.349	77,28	12.311.018.139.605
Belanja Modal	475.315.682.000	447.306.230.971	94,11	384.063.214.931
Jumlah	31.930.741.034.000	25.093.847.776.203	78,59	14.305.735.390.303

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	561.706.039.000	559.584.832.381	99,62	866.367.926.764
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	4.600.594.725.000	2.805.196.309.940	60,97	1.330.818.066.028
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	23.374.342.696.000	18.530.161.800.203	79,28	9.034.113.804.328
Program Dukungan Manajemen	3.394.097.574.000	3.198.904.833.679	94,25	3.074.435.593.183
Jumlah	31.930.741.034.000	25.093.847.776.203	78,59	14.305.735.390.303

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.788.112.385.900,00 atau 75,41%, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain :

1. Alokasi belanja pegawai untuk pengangkatan pegawai ASN P3K;
2. Alokasi belanja barang untuk belanja diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam rangka mewujudkan swasembada pangan melalui kegiatan optimalisasi lahan, cetak

sawah, pompanisasi tadah hujan, penyediaan alat mesin pertanian, benih padi, jagung, serelia dan aneka kacang dan umbi mendukung peningkatan produksi pertanian serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ;

3. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas pertanian.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.671.162.845.883,00 dan Rp1.610.654.035.767,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp60.508.810.116,00 atau 3,76% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya pengangkatan pegawai ASN PPPK dan CPNS serta beberapa pegawai yang mengalami perpindahan jabatan ke jabatan fungsional selama periode Tahun 2025. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian Pusat dan UPT sebanyak 13.446 orang. Terdiri dari Struktural, Fungsional Khusus dan Fungsional Umum. Jumlah dan komposisi pegawai per eselon 1 berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada **Lampiran B.3.1.**

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	785.907.953.000	778.559.933.446	99,07	812.010.241.027
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	1.222.746.000	1.130.407.000	92,45	2.101.997.040
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	7.280.000.000	6.802.023.398	93,43	580.454.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	74.705.402.000	72.761.462.319	97,40	16.630.144.066
Belanja Lembur	9.552.010.000	9.047.509.050	94,72	10.642.863.000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	846.614.675.000	802.861.510.670	94,83	768.688.336.634
Jumlah	1.725.282.786.000	1.671.162.845.883	96,86	1.610.654.035.767

**Tabel B.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025
Berdasarkan Eselon I**

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
SETJEN	934.042.972.000	888.180.296.584	95,09	847.214.475.738	40.965.820.846
ITJEN	21.940.715.000	20.921.208.615	95,35	20.736.907.340	184.301.275
DITJEN TP	46.394.994.000	43.947.710.489	94,73	41.685.222.539	2.262.487.950
DITJEN HORTI	28.198.017.000	28.079.483.968	99,58	26.174.025.069	1.905.458.899
DITJEN BUN	60.116.639.000	59.411.904.464	98,83	54.304.940.135	5.106.964.329
DITJEN PKH	156.393.232.000	155.324.278.505	99,32	142.525.366.684	12.798.911.821
DITJEN PSP	27.207.216.000	26.811.280.123	98,54	24.596.095.885	2.215.184.238
BRMP	288.149.673.000	286.518.181.887	99,43	278.366.436.945	8.151.744.942
BPPSDMP	162.839.328.000	161.968.501.248	99,47	141.726.778.856	20.241.722.392
BARANTAN	0	0	0,00	33.323.786.576	(33.323.786.576,00)
Jumlah	1.725.282.786.000	1.671.162.845.883	96,86	1.610.654.035.767	60.508.810.116

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.975.378.699.349,00 dan Rp12.311.018.139.605,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian Belanja Barang	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	354.347.365.000	344.658.061.387	97,27	402.410.324.400
Belanja Barang Non Operasional	802.694.545.000	705.488.172.583	87,89	937.693.104.057
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	814.450.000	814.450.000	0,00	746.304.000
Belanja Barang Persediaan	1.306.839.910.000	828.643.661.637	63,41	181.892.238.900
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	937.964.146.000	787.075.149.401	83,91	638.107.654.894
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	290.997.375.000	287.035.077.915	98,64	253.706.454.618
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	1.038.343.485.000	829.592.683.852	79,90	1.195.464.724.239
Belanja Perjalanan LN	18.599.965.000	17.035.800.459	91,59	13.703.796.779
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	108.861.464.000	95.214.733.764	87,46	87.673.708.069
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda				
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	9.589.214.752.000	7.643.036.720.501	79,70	4.286.042.708.467
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	102.119.000
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	15.281.465.109.000	11.436.784.187.850	74,84	4.313.475.002.182
Jumlah	29.730.142.566.000	22.975.378.699.349	77,28	12.311.018.139.605

Rincian realisasi Belanja Barang untuk masing - masing Eselon I disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Eselon I

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
SETJEN	298.133.863.000	284.204.638.716	95,33	274.962.371.779	9.242.266.937,00
ITJEN	100.795.789.000	87.133.426.147	86,45	54.546.962.777	32.586.463.370,00
DITJEN TP	3.575.183.288.000	3.191.944.156.496	89,28	3.055.453.693.925	136.490.462.571,00
DITJEN HORTI	418.255.311.000	242.250.362.299	57,92	350.189.818.543	(107.939.456.244,00)
DITJEN BUN	3.003.072.092.000	1.382.939.247.127	46,05	564.831.479.724	818.107.767.403,00
DITJEN PKH	820.555.628.000	780.778.971.355	95,15	572.778.784.407	208.000.186.948,00
DITJEN PSP	9.624.483.511.000	7.648.511.794.700	79,47	5.952.169.751.930	1.696.342.042.770,00
BRMP	632.493.341.000	584.468.764.111	92,41	516.153.169.697	68.315.594.414,00
BPPSDMP	624.314.378.000	619.867.858.080	99,29	969.932.106.823	(350.064.248.743,00)
DITJEN LIP	10.632.855.365.000	8.153.279.480.318	76,68	0	8.153.279.480.318,00
Jumlah	29.730.142.566.000	22.975.378.699.349	77,28	12.311.018.139.605	10.664.360.559.744

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.664.360.559.744,00 atau 86,62% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas perkebunan serta kegiatan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada kelompok tani berupa benih, saprodi dan alsintan, benih berupa benih

padi, jagung dan kedelai, saprodi berupa obat-obatan dan pupuk, alsintan berupa alat pascapanen.

Pada Belanja Barang terdapat kesalahan penganggaran sebesar Rp1.721.927.639,00 yang seharusnya menggunakan anggaran Belanja Modal karena menghasilkan aset tetap. Terdapat pengadaan BMN berupa alat pengolah data yang menggunakan akun belanja barang sebesar Rp692.044.200,00 pada Inspektorat Jenderal.

Terdapat pengembalian belanja barang dengan nilai yang signifikan pada akun belanja barang non operasional lainnya di Eselon I BPPSDMP dan LIP, belanja barang jasa konsultan di Eselon I Ditjen LIP dan Ditjen PSP, belanja jasa lainnya di Eselon I BRMP. BRMP terkait kegiatan ICARE berupa Competitive Grant, kegiatan kerjasama kemitraan, dan kegiatan surveillance manajemen ISO. Ditjen PSP terkait kegiatan penyusunan SID Optimasi Lahan dan Cetak Sawah, serta pembayaran atas konsultan kegiatan Upland. BPPSDMP merupakan pengembalian belanja barang akomodasi dan uang makan mahasiswa Tk. III serta pengembalian belanja barang konsumsi mahasiswa dari tanggal 25 s.d. 27 Maret 2025.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp19.079.820.908.351,00 atau 76,72% dari anggaran sebesar Rp24.870.679.861.000,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.3 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon 1

Uraian	Eselon I	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	Ditjen TP	10.216.100.000	10.194.397.793	3.361.449.089.000	2.983.999.777.142	3.371.665.189.000	2.994.194.174.935
	Ditjen Horti	9.555.126.000	768.000.000	214.803.730.000	177.961.480.916	224.358.856.000	178.729.480.916
	Ditjen Bun	436.655.949.000	80.578.061.400	1.408.411.314.000	637.127.232.926	1.845.067.263.000	717.705.294.326
	Ditjen PKH	20.000.000	20.000.000	162.042.175.000	152.437.281.519	162.062.175.000	152.457.281.519
	Ditjen PSP	612.616.323.000	579.101.302.208	8.599.956.383.000	6.722.241.932.891	9.212.572.706.000	7.301.343.235.099
	BRMP	0	0	34.000.000.000	28.669.641.355	34.000.000.000	28.669.641.355
	BPPSDMP	9.119.954.000	9.084.893.600	0	0	9.119.954.000	9.084.893.600
	Ditjen LIP	3.652.448.493.000	2.983.677.376.740	6.359.385.225.000	4.713.959.529.861	10.011.833.718.000	7.697.636.906.601
Total		4.730.631.945.000	3.663.424.031.741	20.140.047.916.000	15.416.396.876.610	24.870.679.861.000	19.079.820.908.351

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2**.

Pada Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) nilai seluruh kontrak pekerjaan menurut Aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp19.153.059.133.980,00 dibandingkan dengan realisasi belanja netto sebesar Rp19.079.820.908.351,00 sehingga terdapat perbedaan nilai antara realisasi kontrak pekerjaan dengan realisasi belanja netto disebabkan oleh realisasi 2026 diinput di BAST BANPEM Tahun 2025, realisasi 526 bantuan uang diinput pada BASTBANPEM 526 bantuan barang serta terdapat doble input di Aplikasi BASTBANPEM.

Tabel B.2.2.4 Rincian Selisih Realisasi dengan Nilai Kontrak BASTBANPEM

ES1	JENIS	DATA MONSAKTI		BASTBANPEM	Selisih Realisasi Monsakti dengan Kontrak
		DIPA	REALISASI	NILAI KONTRAK	
DITJEN TP	Barang	3.361.689.089.000	2.984.218.074.935	2.986.412.992.899	- 2.194.917.964
DITJEN TP	Uang	9.976.100.000	9.976.100.000	9.976.100.000	-
	Total	3.371.665.189.000	2.994.194.174.935	2.996.389.092.899	- 2.194.917.964
DITJEN HORTI	Barang	214.803.730.000	177.961.480.916	176.558.278.138	1.403.202.778
DITJEN HORTI	Uang	9.555.126.000	768.000.000	768.000.000	-
	Total	224.358.856.000	178.729.480.916	177.326.278.138	1.403.202.778
DITJEN BUN	Barang	1.408.411.314.000	637.127.232.926	638.059.352.182	- 932.119.256
DITJEN BUN	Uang	436.655.949.000	80.578.061.400	102.725.141.400	- 22.147.080.000
	Total	1.845.067.263.000	717.705.294.326	740.784.493.582	- 23.079.199.256
DITJEN NAK	Barang	162.042.175.000	152.437.281.519	152.435.107.925	2.173.594
DITJEN NAK	Uang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
	Total	162.062.175.000	152.457.281.519	152.455.107.925	2.173.594
DITJEN PSP	Barang	8.599.956.383.000	6.722.241.932.891	6.795.924.248.169	- 73.682.315.278
DITJEN PSP	Uang	612.616.323.000	579.101.302.208	246.614.337.999	332.486.964.209
	Total	9.212.572.706.000	7.301.343.235.099	7.042.538.586.168	258.804.648.931
BRMP	Barang	34.000.000.000	28.669.641.355	28.809.213.095	- 139.571.740
	Total	34.000.000.000	28.669.641.355	28.809.213.095	- 139.571.740
BPPSDMP	Uang	9.119.954.000	9.084.893.600	9.105.893.600	- 21.000.000
	Total	9.119.954.000	9.084.893.600	9.105.893.600	- 21.000.000
DITJEN LIP	Barang	6.359.385.225.000	4.713.959.529.861	4.716.848.441.919	- 2.888.912.058
DITJEN LIP	Uang	3.652.448.493.000	2.983.677.376.740	3.288.802.026.654	- 305.124.649.914
	Total	10.011.833.718.000	7.697.636.906.601	8.005.650.468.573	- 308.013.561.972
JUMLAH	Barang	20.140.287.916.000	15.416.615.174.403	15.495.047.634.327	- 78.432.459.924
	Uang	4.730.391.945.000	3.663.205.733.948	3.658.011.499.653	5.194.234.295
	Total	24.870.679.861.000	19.079.820.908.351	19.153.059.133.980	- 73.238.225.629

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen TP

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Ditjen TP dianggarkan sebesar Rp3.371.665.189.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.994.194.174.935,00 untuk 5 (lima) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen TP

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	Barang	5.876.500.000	5.853.971.127	99,62
	Uang			0,00
Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan	Barang	2.098.100.446.000	1.722.901.409.617	82,12
	Uang			0,00
Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Barang			0,00
	Uang	9.698.600.000	9.698.600.000	100,00
Pelindungan Tanaman Pangan	Barang			0,00
	Uang	277.500.000	277.500.000	100,00
Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan	Barang	1.257.472.143.000	1.255.244.396.398	99,82
	Uang	240.000.000	218.297.793	90,96
Jumlah	Barang	3.361.449.089.000	2.983.999.777.142	88,77
	Uang	10.216.100.000	10.194.397.793	99,79
Total		3.371.665.189.000	2.994.194.174.935	88,80

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp2.994.194.174.935,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp2.994.490.981.439,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat sebesar Rp2.987.265.445.599,00.

Terdapat selisih antara realisasi belanja akun 526 dikurangi dengan realisasi SPM/SP2D menurut aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp1.482.009.964,00. Selisih tersebut disebabkan oleh kelebihan input kontrak pada BASTBANPEM. Belum Diinput/Diajukan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp0,00, masih terdapat perbaikan review pada aplikasi BASTBANPEM sebesar Rp9.123.647.300,00 (0,31%).

Nilai RPATA sebesar Rp277.865.963.135,00 terdapat di satker Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan 166 kontrak.

2. Ditjen Hortikultura

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Ditjen Hortikultura dianggarkan sebesar Rp224.358.856.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp178.729.480.916,00 untuk 4 (empat) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.2.2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Horti

Nama Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanmaan Obat	Barang	174.841.042.000	160.913.046.483	92,03
	Uang	768.000.000	768.000.000	100,00
Kegiatan Perbenihan Hortikultura	Barang	15.503.565.000	15.464.550.545	99,75
	Uang	0	0	0,00
Kegiatan Hilirisasi Hasil Hortikultura	Barang	24.212.403.000	1.341.057.600	5,54
	Uang	8.787.126.000	0	0,00
Kegiatan Perlindungan Hortikultura	Barang	246.720.000	242.826.288	98,42
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	214.803.730.000	177.961.480.916	82,85
	Uang	9.555.126.000	768.000.000	8,04
Total		224.358.856.000	178.729.480.916	79,66

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp178.729.480.916,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp177.326.278.138,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat sebesar Rp177.326.278.138,00

Terdapat selisih antara realisasi belanja akun 526 dikurangi dengan realisasi SPM/SP2D menurut aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp1.403.202.778,00. Belum Diinput/Diajukan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp0,00.

Total nilai RPATA sebesar Rp24.681.748.531,00 yang berasal dari 25 kontrak pekerjaan. Seluruh pekerjaan atas kontrak yang tersaji pada RPATA, dibayarkan di tahun 2026. Jumlah pekerjaan yang selesai sampai 31 Desember 2025 sebanyak 4 kontrak sebesar Rp3.086.956.930,00 dengan persentase penyelesaian pekerjaan seluruhnya mencapai 100%. Sedangkan pada 21 kontrak lainnya, pekerjaan selesai di tahun 2026 dengan total kontrak sebesar Rp21.594.791.601,00.

Dari total 25 kontrak RPATA, terdapat 3 kontrak dengan capaian persentase pekerjaan yang tidak mencapai target 100% yaitu pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi P2B (Tahap III) Bibit Invitro Pisang Barangan Merah, Bibit Pisang Pisang Kepok Tanjung Wilayah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten, Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahap II TA. 2025 (Sarana Pengendalian OPT Berupa Insektisida Nabati dan Perangkap Likat Kuning), dan

Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi P2B Tahap III (Sarana Pengendalian OPT berupa Insektisida Nabati dan Perangkap Likat Kuning).

3. Ditjen Perkebunan

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Ditjen Perkebunan dianggarkan sebesar Rp1.845.067.263.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp717.705.294.326,00 untuk 5 (lima) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.2.2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Bun

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Barang	78.362.365.000	72.738.762.353	92,82
	Uang	5.893.600.000	3.715.600.000	63,04
Pelindungan Perkebunan	Barang	146.000.000	145.900.000	99,93
	Uang	0	0	0,00
Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	Barang	1.321.389.230.000	560.319.972.026	42,40
	Uang	429.316.240.000	75.938.411.600	17,69
Hilirisasi Hasil Perkebunan	Barang	3.880.100.000	1.603.898.997	41,34
	Uang	0	0	0,00
Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Barang	4.633.619.000	2.318.699.550	50,04
	Uang	1.446.109.000	924.049.800	63,90
Jumlah	Barang	1.408.411.314.000	637.127.232.926	45,24
	Uang	436.655.949.000	80.578.061.400	18,45
Total		1.845.067.263.000	717.705.294.326	38,90

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp717.705.294.326,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp740.045.740.521,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidi oleh Inspektorat sebesar Rp740.784.493.582,00.

Terdapat selisih antara realisasi belanja akun 526 dikurangi dengan realisasi SPM/SP2D menurut aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp22.494.063.256,00. Belum Diinput/Diajukan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp0,00.

Terdapat 542 kontrak yang pembayarannya menggunakan mekanisme RPATA. Total nilai RPATA sebesar Rp944.470.941.407,00 sampai 31 Desember 2025 telah dibayarkan 13 kontrak sebesar Rp11.694.606.378,00 sehingga tersisa 529 kontrak dengan saldo RPATA di rekening penampungan sebesar Rp932.776.335.029,00. Dari saldo tersebut, terdapat BAST/BAPP untuk 298 kontrak tercatat sebesar Rp359.419.429.096,00 sehingga menimbulkan utang kepada pihak ketiga lainnya dikarenakan ditahun 2025 barang telah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran ke penyedia.

4. Ditjen PKH

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Ditjen PKH dianggarkan sebesar Rp162.062.175.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp152.457.281.519,00 untuk 1 (satu) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.2.2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PKH

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Barang	162.042.175.000	152.437.281.519	94,07
	Uang	20.000.000	20.000.000	100,00
Total		162.062.175.000	152.457.281.519	94,07

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp152.457.281.519,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp152.455.107.925,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidi oleh Inspektorat sebesar Rp152.455.107.925,00.

Terdapat selisih antara realisasi belanja akun 526 dikurangi dengan realisasi SPM/SP2D menurut aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp2.173.594,00. Belum Diinput/Diajukan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp0,00.

5. Ditjen PSP

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Ditjen PSP dianggarkan sebesar Rp9.212.572.706.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.301.343.235.099,00 untuk 4 (empat) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PSP

Nama Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Barang	4.487.190.000	4.486.310.000	99,98
	Uang	76.512.700.000	76.512.700.000	100,00
Perlindungan dan Penyediaan Lahan	Barang	387.248.193.000	385.122.983.061	99,45
	Uang	536.103.623.000	502.588.602.208	93,75
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Barang	6.605.621.000.000	5.450.422.144.720	82,51
	Uang	0	0	0,00
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Barang	1.602.600.000.000	882.210.495.110	55,05
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	8.599.956.383.000	6.722.241.932.891	78,17
	Uang	612.616.323.000	579.101.302.208	94,53
Total		9.212.572.706.000	7.301.343.235.099	79,25

Serapan kegiatan pupuk dan pestisida Tahun 2025 relatif rendah disebabkan oleh kebijakan pelaksanaannya yang sebagian besar bersifat sebagai dukungan terhadap kegiatan utama cetak sawah dan optimasi lahan.

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp7.301.343.235.099,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp6.956.599.372.069,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidi oleh Inspektorat sebesar Rp7.028.048.586.168,00.

Terdapat selisih antara realisasi belanja akun 526 dikurangi dengan realisasi SPM/SP2D menurut aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp363.411.587.825,00. Belum Diinput/Diajukan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp0,00. Masih menunggu review sebesar Rp14.490.000.000,00 (0,21%).

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.722.903.545.292,00 sebanyak 314 kontrak merupakan dana sehubungan dengan pemindahan kas dalam rangka transaksi pada Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA). Transaksi tersebut merupakan kontrak pekerjaan yang diserahkan terimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada satker pusat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (633656.KP), sehingga dibayarkan dengan mekanisme RPATA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui rekening penampungan.

6. BPPSDMP

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Badan PPSDMP dianggarkan sebesar Rp9.119.954.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.084.893.600,00 untuk 1 (satu) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah BPPSDMP

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Barang	0	0	0,00
	Uang	9.119.954.000	9.084.893.600	99,62
Total		9.119.954.000	9.084.893.600	99,62

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp9.084.893.600,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp9.084.893.600,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat sebesar Rp9.105.893.600,00.

Terdapat selisih antara realisasi belanja akun 526 dikurangi dengan realisasi SPM/SP2D menurut aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp21.000.000,00. Belum Diinput/Diajukan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp0,00.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.798.226.942,00 sebanyak 43 kontrak merupakan dana sehubungan dengan pemindahan kas dalam rangka transaksi pada Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA). Hingga 31 Desember 2025 realisasi pembayaran RPATA baru 14 kontrak sehingga kontrak yang masih tersimpan di rekening penampungan sebanyak 29 kontrak.

7. BRMP

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada BRMP dianggarkan sebesar Rp34.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp28.669.641.355,00 untuk 1 (satu) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah BRMP

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Barang	34.000.000.000	28.669.641.355	84,32
	Uang	0	0	0,00
Total		34.000.000.000	28.669.641.355	84,32

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp28.669.641.355,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp26.643.614.609,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat sebesar Rp28.809.231.095,00.

Terdapat selisih antara realisasi belanja akun 526 dikurangi dengan realisasi SPM/SP2D menurut aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp454.088.260,00. Belum Diinput/Diajukan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp0,00.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.732.378.649,00 sebanyak 66 kontrak merupakan dana sehubungan dengan pemindahan kas dalam rangka transaksi pada Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA).

8. Ditjen LIP

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Ditjen LIP dianggarkan sebesar Rp10.011.833.718.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.697.636.906.601,00 untuk 2 (dua) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen LIP

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Pelindungan dan Penyediaan Lahan	Barang	6.348.683.045.000	4.703.264.127.861	74,08
	Uang	3.605.586.193.000	2.936.815.076.740	81,45
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Barang	10.702.180.000	10.695.402.000	99,94
	Uang	46.862.300.000	46.862.300.000	100,00
Jumlah	Barang	6.359.385.225.000	4.713.959.529.861	74,13
	Uang	3.652.448.493.000	2.983.677.376.740	81,69
Total		10.011.833.718.000	7.697.636.906.601	76,89

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp7.697.636.906.601,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp7.311.057.184.145,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidi oleh Inspektorat sebesar Rp6.251.147.405.982,00.

Terdapat selisih antara realisasi belanja akun 526 dikurangi dengan realisasi SPM/SP2D menurut aplikasi BASTBANPEM (akses per 12 Mei 2026) sebesar Rp423.513.262.018,00. Belum Diinput/Diajukan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp856.468.480.368,00 (10,70%). Masih menunggu review Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp64.720.999.897,00 (0,81%). Perbaikan setelah review Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp343.899.755.129,00 (4,30%). Review Perbaikan Pada Aplikasi BAST BANPEM sebesar Rp489.413.827.197,00 (6,11%).

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp447.306.230.971,00 dan Rp384.063.214.931,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp63.243.016.040,00 atau 16,47% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut karena adanya pembelian peralatan dan mesin, renovasi ruang kerja, dan pembelian server.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.833.355.000	192.336.798.031	91,23	131.468.154.092
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.875.270.000	232.336.849.135	96,46	213.853.765.877
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.391.267.000	9.326.364.366	99,31	22.394.011.478
Belanja Modal Lainnya	6.341.504.000	5.837.346.200	92,05	1.420.733.655
Belanja Modal BLU	7.874.286.000	7.468.873.239	94,85	14.926.549.829
Jumlah	475.315.682.000	447.306.230.971	94,11	384.063.214.931

Tabel B.2.3.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Eselon I

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
SETJEN	54.387.047.000	40.365.977.980	74,22	8.767.586.553	31.598.391.427,00
ITJEN	5.500.000.000	5.474.310.100	99,53	525.050.595	4.949.259.505,00

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
DITJEN TP	8.980.710.000	8.839.293.109	98,43	2.246.009.365	6.593.283.744,00
DITJEN HORTI	2.153.177.000	1.467.940.000	68,18	5.769.268.100	(4.301.328.100,00)
DITJEN BUN	1.124.264.000	841.312.562	74,83	3.344.765.035	(2.503.452.473,00)
DITJEN PKH	291.335.487.000	280.445.197.540	96,26	247.640.513.027	32.804.684.513,00
DITJEN PSP	2.167.323.000	1.710.172.501	78,91	7.022.764.635	(5.312.592.134,00)
BRMP	26.431.297.000	25.820.997.437	97,69	55.499.512.005	(29.678.514.568,00)
BPPSDMP	78.241.257.000	77.605.095.135	99,19	53.247.745.616	24.357.349.519,00
DITJEN LIP	4.995.120.000	4.735.934.607	94,81	0	4.735.934.607,00
Jumlah	475.315.682.000	447.306.230.971	94,11	384.063.214.931	63.243.016.040

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp192.336.798.031,00 dan Rp131.468.154.092,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp60.868.643.939,00 atau 46,30% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.271.521.000	191.493.792.083	91,94	130.889.492.186
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	65.400.000
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	74.746.904
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2.561.834.000	843.005.948	32,91	438.515.002
Jumlah	210.833.355.000	192.336.798.031	91,23	131.468.154.092

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
SETJEN	48.108.839.000	34.815.526.490	72,37	6.395.891.932	28.419.634.558,00
ITJEN	724.902.000	720.946.000	99,45	377.299.000	343.647.000,00
DITJEN TP	6.016.535.000	5.995.115.109	99,64	1.890.518.865	4.104.596.244,00
DITJEN HORTI	2.153.177.000	1.467.940.000	68,18	2.429.861.600	(961.921.600,00)
DITJEN BUN	1.124.264.000	841.312.562	74,83	2.240.324.350	(1.399.011.788,00)
DITJEN PKH	91.874.034.000	89.369.837.144	97,27	63.090.413.913	26.279.423.231,00
DITJEN PSP	2.167.323.000	1.710.172.501	78,91	6.695.895.735	(4.985.723.234,00)
BRMP	25.351.059.000	24.749.800.665	97,63	28.316.782.803	(3.566.982.138,00)
BPPSDMP	28.518.102.000	27.930.212.953	97,94	20.031.165.894	7.899.047.059,00
DITJEN LIP	4.795.120.000	4.735.934.607	98,77	0	4.735.934.607,00
Jumlah	210.833.355.000	192.336.798.031	91,23	131.468.154.092	60.868.643.939

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan secara signifikan terdapat pada Eselon I Setjen, Ditjen TP, Ditjen PKH, dan BPPSDMP. Pada Ditjen TP kantor pusat merupakan pembelian 2 unit alat yaitu HPLC pengujian vitamin pada pangan dan Gas Chromatograph (GC) untuk pengujian mutu pestisida. Satker BPPOPT Karawang merupakan pembelian alat laboratorium untuk pengujian di laboratorium molekuler. Satker BBPPMBTPH DKI Jakarta merupakan pembelian Germinator untuk pengujian Daya Berkecambah di Laboratorium Biologi. Pada Ditjen PKH merupakan transaksi pembelian Alat Laboratorium, Transfer Masuk berupa kendaraan roda empat

serta aset yang diaktifkan atau difungsikan kembali. Pada Setjen merupakan pembelian Peralatan Jaringan di satker Pusdatin, Pembelian Alat Studio Lainnya, Audio Visual, dan pembelian micro bus di Biro Umum. Pada BPPSDMP pembelian pada satker UPT dan Kantor Pusat berupa board display, PC Unit, dan drone. Hibah Masuk berasal dari Korea berupa Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen dan Alat Pengolahan Tanah dan Tractor Four Wheel.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp232.336.849.135,00 dan Rp213.853.765.877,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.483.083.258,00 atau 8,64% dibandingkan TA 2024. Kenaikan anggaran belanja gedung dan bangunan TA 2025, salah satunya dipengaruhi oleh adanya Pembangunan sarana dan prasarana laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis, sarana dan prasarana Pusat Pengembangan Teknologi IB, dan sarana dan Prasarana Biosecurity Center di Wilayah Timur Indonesia pada Ditjen PKH. Belanja Modal yang bersumber dari SBSN yaitu Pembangunan Gedung untuk Singga Ko Mart (seperti Alfamart) serta pembangunan kandang dan jalan pada BPPSDMP.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.657.275.000	194.937.341.196	97,64	193.423.293.935
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	4.374.085.000	3.541.850.996	80,97	98.450.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	13.524.681.000	12.041.396.880	89,03	4.048.362.297
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	1.200.000.000	207.960.801	17,33	193.809.900
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	643.717.000	643.717.000	100,00	26.150.000
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	21.475.512.000	20.964.582.262	97,62	16.063.699.745
Jumlah	240.875.270.000	232.336.849.135	96,46	213.853.765.877

Tabel B.2.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
SETJEN	5.160.595.000	4.713.680.490	91,34	1.900.227.061	2.813.453.429,00
DITJEN TP	2.318.411.000	2.203.273.000	95,03	155.563.000	2.047.710.000,00
DITJEN HORTI	0	0	0,00	3.339.406.500	(3.339.406.500,00)
DITJEN BUN	0	0	0,00	761.165.972	(761.165.972,00)
DITJEN PKH	188.726.406.000	180.799.742.864	95,80	169.623.549.285	11.176.193.579,00
BRMP	1.061.788.000	1.052.746.772	99,15	5.707.904.544	(4.655.157.772,00)
BPPSDMP	43.608.070.000	43.567.406.009	99,91	32.365.949.515	11.201.456.494,00
Jumlah	240.875.270.000	232.336.849.135	96,46	213.853.765.877	18.483.083.258,00

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp232.336.849.135,00, sebesar Rp152.924.530.807,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu:

- Sebesar Rp144.603.885.374,00 menghasilkan KDP pada Eselon I Ditjen Bun, Ditjen PKH, dan BRMP;
- Sebesar Rp8.320.645.433,00 merupakan pengeluaran yang menghasilkan barang ekstrakomptabel pada Eselon I Setjen, Ditjen TP, Ditjen Horti, Ditjen Bun, Ditjen PKH, BRMP, dan BPPSDMP.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.326.364.366,00 dan Rp22.394.011.478,00. Realisasi Belanja Modal

Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.067.647.112,00 atau 58,35% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.959.232.000	1.912.860.201	97,63	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan	21.220.000	21.212.000	99,96	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	298.747.000	296.184.988	99,14	0
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	112.837.000	112.837.000	100,00	0
Belanja Modal Irigasi	2.961.191.000	2.957.188.177	99,86	20.549.174.878
Belanja Modal Jaringan	497.597.000	497.596.800	100,00	1.829.851.600
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	18.811.000	18.720.000	99,52	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	51.083.000	49.835.500	97,56	0
Belanja Modal Perjalanan Jaringan	62.446.000	62.446.000	100,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	3.156.968.000	3.148.033.700	99,72	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	242.335.000	241.400.000	99,61	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	8.800.000	8.050.000	91,48	14.985.000
Jumlah	9.391.267.000	9.326.364.366	99,31	22.394.011.478

Tabel B.2.3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Berdasarkan Eselon I

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SETJEN	283.393.000	283.296.000	99,97	0
DITJEN TP	645.764.000	640.905.000	99,25	0
DITJEN BUN	0	0	0,00	218.556.613
DITJEN PKH	2.860.761.000	2.806.744.293	98,11	0
BRMP	0	0	0,00	21.474.824.658
BPPSDMP	5.601.349.000	5.595.419.073	99,89	700.630.207
Jumlah	9.391.267.000	9.326.364.366	99,31	22.394.011.478

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp9.326.364.366,00, sebesar Rp911.193.014,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.837.346.200,00 dan Rp1.420.733.655,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.416.612.545,00 atau 310,87% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	6.341.504.000	5.837.346.200	92,05	1.420.733.655
Jumlah	6.341.504.000	5.837.346.200	92,05	1.420.733.655

Tabel B.2.3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Eselon I

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
SETJEN	834.220.000	553.475.000	66,35	471.467.560
ITJEN	4.775.098.000	4.753.364.100	99,54	147.751.595
DITJEN TP	0	0	0,00	199.927.500
DITJEN BUN	0	0	0,00	124.718.100
DITJEN PSP	0	0	0,00	326.868.900
BRMP	18.450.000	18.450.000	100,00	0

Eselon I	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BPPSDMP	513.736.000	512.057.100	99,67	150.000.000
DITJEN LIP	200.000.000	0	0,00	0
Jumlah	6.341.504.000	5.837.346.200	92,05	1.420.733.655

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.468.873.239,00 dan Rp14.926.549.829,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.457.676.590,00 atau 49,96% dibandingkan TA 2024 disebabkan adanya SBSN di satker BBIB Singosari.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Kode Akun	Uraian	Nama Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	Pusat Veteriner Farma Surabaya	4.227.680.000	4.211.798.110	9.597.391.476	(5.385.593.366,00)
		Balai Inseminasi Buatan Lembang	1.882.011.000	1.540.549.000	80.267.800	1.460.281.200,00
		Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	984.595.000	969.086.129	477.090.988	491.995.141,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	Pusat Veteriner Farma Surabaya	0	0	2.431.299.270	(2.431.299.270,00)
		Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	405.000.000	398.940.000	1.550.114.385	(1.151.174.385,00)
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	375.000.000	348.500.000	790.385.910	(441.885.910,00)
Jumlah			7.874.286.000	7.468.873.239	14.926.549.829	(7.457.676.590,00)

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp86.158.544.866.312,00 dan Rp79.027.310.374.762,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.131.234.491.550,00 atau 9,02%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Aset Lancar	3.940.300.737.970	705.795.973.586	3.234.504.764.384
Aset Tetap	75.332.641.275.051	77.062.473.161.806	(1.729.831.886.755)
Properti Investasi	15.025.103.529	19.405.276.453	(4.380.172.924)
Piutang Jangka Panjang	5.129.199.784	12.175.322.811	(7.046.123.027)
Aset Lainnya	6.865.448.549.978	1.227.460.640.106	5.637.987.909.872
Jumlah	86.158.544.866.312	79.027.310.374.762	7.131.234.491.550

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.940.300.737.970,00 dan Rp705.795.973.586,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.234.504.764.384,00 atau 458,28%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.663.534.525	50.000.000	1.613.534.525
Kas di Bendahara Penerimaan	63.675.107	347.500	63.327.607
Kas Lainnya dan Setara Kas	7.261.575.654	8.998.694.303	(1.737.118.649)
Kas pada BLU	37.031.048.393	13.662.013.011	23.369.035.382
Investasi Jangka Pendek – BLU	136.140.383.548	119.140.383.548	17.000.000.000
Belanja Dibayar Dimuka	1.267.803.895	143.811.096.406	(142.543.292.511)
Uang Muka Belanja (prepayment)	45.627.931.810	0	45.627.931.810

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	193.264.700	21.971.215	171.293.485
Piutang Bukan Pajak	271.894.760.120	15.654.555.309	256.240.204.811
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	10.228.755.441	9.596.500.361	632.255.080
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	1.495.000.633	1.573.354.605	(78.353.972)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(14.568.988.702)	(15.841.267.306)	1.272.278.604
Persediaan	3.442.001.992.846	409.128.324.634	3.032.873.668.212
Jumlah	3.940.300.737.970	705.795.973.586	3.234.504.764.384

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.663.534.525,00 dan Rp50,000,000,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.613.534.525,00 atau 3.227,07%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Ditjen TP	0	50.000.000	(50.000.000)
2	Ditjen PKH	95.127.927	0	95.127.927
3	Ditjen PSP	1.030.118.682	0	1.030.118.682
4	BRMP	386.843.916	0	386.843.916
5	BPPSDMP	151.444.000	0	151.444.000
Jumlah		1.663.534.525	50,000,000	1.613.534.525

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.663.534.525,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ditjen PKH sebesar Rp95.127.927,00 merupakan pengeluaran yang telah dicatat serta ditransaksikan melalui Aplikasi SAKTI ke dalam buku Bendahara Pengeluaran Pembantu satker Kantor Pusat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. namun pada prosesnya terdapat kendala dengan sistem Inaproc, sehingga akhirnya Bendahara Pengeluaran harus melakukan pembayaran secara non tunai sehingga terdapat sisa TUP yang belum sempat disetorkan pada akhir tahun anggaran. Kas tunai ini telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 9 Januari 2026 dengan NTPN : 255155UFVBMKMA9G.
2. Ditjen PSP sebesar Rp1.030.118.682,00 merupakan pembayaran Belanja Barang Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan pada Direktorat Pestisida yang ditolak oleh KPPN, dikarenakan Belanja Barang menggunakan akun 526 pada kegiatan

pengadaan pestisida, yang menggunakan TUP pada akhir tahun anggaran, penolakan tersebut tidak diperbolehkan karena tidak ada usulan pada saat pengajuan TUP pada tanggal 6 Januari 2026 (Nomor SPM: 02940A).

Saldo TUP tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2026 (Nomor NTPN: 9646D8K1HSKNH605)

3. BRMP sebesar Rp386.843.916,00 merupakan saldo satker Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara. Saldo kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada bulan Januari 2026 sebesar Rp386.843.916,00 sebagai berikut.
 - a) Sebesar Rp1.579.474,00. dengan NTPN 9A3427NAV0PAMLVO;
 - b) Sebesar Rp675.249,00 dengan NTPN 739C7397D99K722P;
 - c) Sebesar Rp374.859.576,00 dengan NTPN 1FFCE0JUTPIF037I;
 - d) Sebesar Rp4.729.617,00 dengan NTPN EC7282CQ01G2F2AS; dan
 - e) Sebesar Rp5.000.000,00 dengan NTPN F5F5A2CQ01IEPC36.
4. BPPSDMP sebesar Rp151.444.000,00 berasal dari 2 (dua) Satker yaitu
 - a. SPPN Kupang sebesar Rp10.873.000,00 berupa pengembalian kelebihan setoran sisa Tambahan Uang Persediaan TAYL dan telah disetorkan ke kas negara tanggal 07 Januari 2026 dengan NTPN DDE015UFVBM1JDI4;
 - b. BPP Lampung sebesar Rp140.571.000,00 berupa pengembalian kelebihan setoran sisa Tambahan Uang Persediaan TAYL telah didukung dengan Laporan LPJ Bendahara Pengeluaran dan Rekening koran dengan saldo tidak ada yang negatif, dan sudah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN 3EE936R6FKQD03KL tanggal 5 Januari 2026.

Sebagai informasi untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp417.749.718,00 pada satker Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara yang belum dapat dipertanggungjawabkan karena adanya dugaan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang membawa lari/kabur dari Instansi. Sesuai surat dari Satker Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara dengan nomor B-94/TU.120/H.12.20/01/2026 tanggal 23 Januari 2025. Atas hal tersebut, pada Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* dilakukan reklasifikasi atas saldo kerugian/tekor Kas di Bendahara Pengeluaran ke Aset Lain-Lain.

Berikut ini penjelasan kas tekor kronologisnya sebagai berikut.

a. Kronologi singkat kejadian (waktu kejadian diketahui, modus/penyebab kas tekor, identitas pelaku, dan sumber dana) yang terdampak.

Berdasarkan surat kronologis yang ditandatangani Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2025 BBRMP Sulawesi Utara sejak tanggal 21-28 Desember 2025 telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sdr. Juddy (Bendahara Pengeluaran) dengan menarik uang melalui ATM uang kantor yang bersumber dari dana APBN TA. 2025 ke rekening pribadi tanpa sepengetahuan KPA dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dugaan penyalahgunaan/penyelewengan uang TUP yang tidak dapat disetorkan sebesar Rp417.749.718,00 diketahui setelah Sdr. Juddy tidak dapat dihubungi baik oleh pihak kantor maupun dari keluarga serta kerabat.

b. Nilai atas Kas Tekor

Saat periode Pelaporan Keuangan 31 Desember 2025 *Unaudited*, Satker Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yakni Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara (BRMP Sulawesi Utara) Kode Satker 018.09.1700.634022.KD masih terdapat Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 *Unaudited* sebesar Rp804.593.634,00. Pada Bulan Januari 2026 dilakukan beberapa kali penyetoran oleh Satker pada tanggal:

1. Tanggal 2 Januari 2026 disetorkan sebesar Rp1.579.474,00 NTPN 9A3427NAV0PAMLVO (Setoran TUP PNBPN);
2. Tanggal 5 Januari 2026 disetorkan sebesar Rp675.249,00 NTPN 739C7397D99K722P (Setoran TUP Pinjaman Luar Negeri);
3. Tanggal 7 Januari 2026 disetorkan sebesar Rp374.859.576,00 NTPN 1FFCE0JUTPIF037I (Setoran TUP RM);
4. Tanggal 20 Januari 2026 disetorkan sebesar Rp4.729.617,00 NTPN EC7282CQ01G2F2AS (Setoran TUP RM);
5. Tanggal 27 Januari 2026 disetorkan sebesar Rp5.000.000,00 NTPN F5F5A2CQ01IEPC36 (Setoran TUP RM).

Total setoran sebesar Rp386.843.916,00. Dengan demikian, terdapat tekor kas yang diakibatkan Bendahara Pengeluaran yang membawa lari uang sebesar Rp417.749.718,00. Berkenaan dengan permasalahan kas ini sesuai Bultek Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara dan berdasarkan Nota Kesepakatan Final (NKF) Usulan Jurnal Koreksi, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp417.749.718,00 dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Lainnya oleh satker, dimana hal ini didukung juga dengan Surat Pernyataan Kepala BBPMP Sulawesi Utara tentang Kesanggupan Sisa TUP Tahun Anggaran 2025 dan SK Kepala Badan Nomor: 394/Kpts/PW.210/H/04/2026 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Namun berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Itjen Nomor: R.016/PW.120/G.6/03/2026 Tanggal 4 Maret 2026 atas Dugaan Penyimpangan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran BRMP Sulut diperoleh fakta bahwa telah terjadi penyimpangan pengelolaan kerugian Negara oleh Sdr. Juddy selaku Bendahara Pengeluaran seluruhnya sebesar Rp434.622.749,00.

c. Status penyelesaian (pelaporan kepada aparat penegak hukum, TP/TGR, pemblokiran rekening, penetapan SKTJM, Proses disiplin ASN, dan upaya penagihan)

Sejak tanggal 30 Desember 2025, pihak BBRMP Sulawesi Utara membuat Pengaduan ke Polresta Manado. Selanjutnya tanggal 28 Januari 2026 pihak BBRMP Sulawesi Utara mendapatkan Surat dari Polresta Manado hal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang mana telah dilakukan gelar perkara dan meminta Audit investigasi/pemeriksaan khusus ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti. Tanggal 8 April 2026, Kepala BBRMP Sulawesi Utara menyampaikan Surat ke Kapolresta Manado hal meminta informasi perkembangan penanganan kasus Sdr. Juddy untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sehubungan dengan hasil pemeriksaan/audit khusus sesuai permintaan Kasat Reskrim Polresta Manado Polda Sulut. Surat Kepala BBRMP Sulawesi Utara selanjutnya dibalas oleh Kasat Reskrim Polresta Manado Polda Sulut pada tanggal 20 April 2026 yang isi suratnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan hingga kini belum ada perkembangan lagi.

Berkenaan dengan TP/TGR, sesuai dengan Perka BPK No.03 2007, hingga saat ini SKTJM belum diperoleh mengingat keberadaan Sdr. Juddy tidak diketahui. Permohonan untuk tindak lanjut laporan pengaduan ke Polresta Manado oleh BBRMP Sulawesi Utara hingga saat ini belum diperoleh perkembangan terbaru. Selanjutnya, Kepala BRMP mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian

Negara Sementara (SKPS) yang membebani penggantian kerugian negara kepada Sdr. Juddy sebesar Rp. 434.322.749 serta menugaskan kepala BBRMP Sulawesi Utara selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk menagih dan meminta Sdr. Juddy menyetor ke kas negara besaran KN tersebut.

Rekening bank Sdr. Juddy telah dilakukan pemblokiran, pembayaran gaji tidak lagi diproses sejak Februari 2025 dan tunjangan kinerja sejak bulan Januari 2026 tidak lagi dibayarkan.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak diperoleh sampai dengan periode pelaporan keuangan audited tahun 2025, namun ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor: 394/Kpts/PW.210/H/04/2026 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Berkenaan dengan pengenaan hukuman disiplin PNS Sdr. Juddy telah berproses sesuai dengan PP 94 Tahun 2021. Surat Sekretaris BRMP telah disampaikan ke Kepala Biro OSDMA dan diusulkan untuk diproses berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

d. Perlakuan akuntansi dalam Laporan Keuangan, dilakukannya reklasifikasi berdasar putusan Dit. PKN Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu No. S-177/PB.3/2026 tanggal 6 Mei 2026.

Surat Dit. PKN Ditjen Perbendaharaan atas tanggapan Surat Sekreatris BRMP hal pembukaan menu pengurangan kas tahun 2025 pada BRMP Sulawesi Utara melakukan telaah dan analisis bahwa:

- 1) Permasalahan saldo kas di bendahara pengeluaran TUP pada Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Satker BBRMP Sulawesi Utara yang tidak dapat disetorkan ke kas negara termasuk kategori ketekoran kas;
- 2) Ketekoran kas di BBRMP Sulawesi Utara terindikasi kerugian negara yang penyelesaiannya tetap berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2027 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
- 3) Dengan mempedomani ketentuan akuntansi, PSAP, dan Buletin Teknis Nomor 20 tentang akuntansi piutang berbasis akrual dinyatakan bahwa terkait sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus digeser ke Aset Lainnya karena tidak menggambarkan posisi kas yang sebenarnya.

Selain itu berdasarkan Nota Kesepakatan Asersi Final (NKF) Usulan Jurnal Koreksi antara Kementerian Pertanian, BPK RI, dan Kementerian Keuangan, BRMP Sulawesi Utara melakukan reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran TUP ke akun Aset Lainnya. Proses rekasifikasi berupa pergeseran kas (hilang/bencana) di bendahara pengeluaran menjadi aset lainnya pada modul bendahara pada satker BBRMP Sulawesi Utara telah direkam pada jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut di periode LK Audited 2025 hanya bersifat administratif dan tidak menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban ketekoran kas di BBRMP Sulawesi Utara untuk selanjutnya ditetapkan menjadi TP/TGR oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK-RI setelah diperoleh SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) untuk selanjutnya BPK mengeluarkan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Piutang baru diakui ketika BPK mengeluarkan SKP2K

e. Langkah perbaikan pengendalian intern

Berkaitan dengan permasalahan di BBRMP Sulawesi Utara, Sekretaris BRMP telah menerbitkan Surat hal Penertiban Pelaksanaan Anggaran yang meminta kepada seluruh satker lingkup BRMP:

- 1) Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Keuangan lainnya harus memiliki sertifikat kompetensi yang diampu dan diseleksi faktor integritasnya;
- 2) Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, secara bertahap pembayaran mulai menggunakan sistem non tunai (*Cashless*);
- 3) Bendahara Pengeluaran yang memegang Kartu ATM, saat pengambilannya harus mendapatkan persetujuan otorisasi KPA/PPK.
- 4) Secara rutin atau sewaktu-waktu melaksanakan *Cash Opname* dan *Stock Opname*;
- 5) Memastikan Saldo Neraca Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2026 Nol (Rp0), supaya tidak terjadi temuan berulang;
- 6) Kementan akan berkoordinasi dengan bank-bank yang menjadi mitra Kementan untuk membuatkan OTP pada saat pencairan kartu ATM sehingga ada pengawasan KPA, PPK dan Bendahara.

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Pertanian per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1**.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp63.675.107,00 dan Rp347.500,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp63.327.607,00 atau 18.223,77% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

**Tabel C.2.1 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Ditjen TP	63.675.107	0	63.675.107
2	BRMP	0	347.500	(347.500)
Jumlah		63.675.107	347.500	63.327.607

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.675.107,00 berasal dari Eselon I Ditjen TP yang terdapat Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp43.895.617,00 dan Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan sebesar Rp19.779.490,00 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.675.107,00 telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Negara dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.2.2 Daftar Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025

No	Uraian Eselon I	Uraian Satker	31 Desember 2025 (Rp)	Tanggal Setor	Penyetoran	NTPN
1	Ditjen TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	63.675.107	28 Februari 2026	14.669.600	869E26UBFGSEGFQ1
				2 Maret 2026	9.538.178	31CDB49001599PI4
				23 April 2026	18.904.838	D2A7F7QLVBKJI3EG
				23 April 2026	20.562.491	E788E49001B1U378
	Jumlah		63.675.107		63.675.107	

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.2**.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.261.575.654,00 dan Rp8.998.694.303,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.737.118.649,00 atau 19,30%. apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	BPPSDMP	61.966	0	61.966
Jumlah		61.966	0	61.966
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Setjen	0	326.108.417	(326.108.417)
	Ditjen TP	50.309.650	0	50.309.650
	Ditjen Perkebunan	0	1.059.600	(1.059.600)
	Ditjen PSP	3.874.500	0	3.874.500
	BRMP	23.855.933	55.197	23.800.736
	BPPSDMP	19.753	19.615.000	(19.595.247)
Jumlah		78.059.836	346.838.214	(268.778.378)
Kas Lainnya dari Hibah	Setjen	1.569.505.704	2.040.848.803	(471.343.099)
	Ditjen Perkebunan	798.012.133	1.931.783.630	(1.133.771.497)
	BRMP	4.066.029.944	3.609.754.456	456.275.488
Jumlah		6.433.547.781	7.582.386.889	(1.148.839.108)
Kas Lainnya di BLU	Ditjen PKH	749.906.071	1.069.469.200	(319.563.129)
Jumlah		749.906.071	1.069.469.200	(319.563.129)
Total		7.261.575.654	8.998.694.303	(1.737.118.649)

Rincian daftar rekening Kas Lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3**.

1. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 di BPPSDMP sebesar Rp61.966,00 berasal dari Satker Balai Pelatihan Pertanian Lampung

merupakan jasa giro dari rekening pengeluaran lainnya (RPL) berupa biaya kerjasama pelatihan BP3MI dari Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 di Ditjen TP sebesar Rp50.309.650,00 merupakan setoran Lelang Mobil Tanaman Pangan yang disetor pada bulan Januari 2026. Dengan NTPN ABAA97QLVBBA6IKI Tanggal setor 09 Januari 2026 berupa Pelunasan kewajiban pembayaran lelang berupa DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH-1 UNIT MOBIL MINI BUS SUZUKI GC415V-APV STD Tanggal 23 Oktober 2025.
- b. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 di Ditjen PSP sebesar Rp3.874.500,00 merupakan pungutan pajak pada Dinas Pertanian Prov Kepulauan Bangka Belitung (390168.TP) dan telah disetor ke kas Negara dengan NTPN 27BA774HPVI870K6 tanggal 14 Januari 2026.
- c. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 di BRMP sebesar Rp23.855.933,00 merupakan saldo kas selain yang berasal dari Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.082,00 terdapat pada satker BRMP Gorontalo merupakan merupakan saldo bunga bank direkening yang berasal dari kegiatan ICARE yang telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 27 Januari 2026 dengan nomor NTPN: 0D77C6U8FGPEODAN;
 - 2) Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.196,00 terdapat pada satker BRMP Lahan Rawa merupakan merupakan saldo saldo jasa giro/bunga dari kegiatan kerjasama ICARE;
 - 3) Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.839.250,00 pada satker BRMP Sulawesi Utara merupakan uang pajak dari kegiatan ICARE yang sampai dengan periode 31 Desember belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara. namun telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 20 Januari 2026 dengan NTPN:93E2274HR2P3OT92.
 - 4) Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.405,00 pada satker BRMP Tanah dan Pupuk merupakan saldo jasa giro/bunga bank berasal dari kegiatan ICARE yang telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2026 dengan nomor NTPN: B3BAF61QVM6ALGT6.
- d. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 di BPPSDMP sebesar Rp19.753,00 berasal dari Satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan merupakan saldo jasa giro dari rekening pengeluaran lainnya (RPL) dari kegiatan Kerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan per 31 Desember 2025.

3. Kas Lainnya dari Hibah

- a. Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 di Setjen sebesar Rp1.569.505.704,00 merupakan saldo kas hibah langsung yang telah disahkan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan kerja sama pertama adalah Improving Milk Supply Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia (Indodairy2) dengan Nomor Register 2HK7TXXA dan project No. AGB/2021/124. Tujuan utama

IndoDairy2 adalah merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran koperasi dan institusi sejenis dalam menyediakan layanan yang efektif dan berkelanjutan bagi peternak sapi perah. Saldo awal sebesar Rp1.180.653.640,00. Dari pendapatan sebesar Rp257.607.631,00 telah dilakukan pengesahan belanja sebesar Rp249.178.062,00 sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp1.189.083.209,00.

- 2) Kegiatan kerja sama berikutnya adalah Evidence to Underpin Indonesia's Agriculture Technology Transformation (Digital AgTech) dengan Nomor Register 2V3CPU5A dan project No. AGB/2023/155. Tujuan utama Digital AgTech adalah mengidentifikasi perkembangan digitalisasi pertanian sebagai bagian dari transformasi teknologi yang akan dilakukan melalui penyusunan kebijakan pendukung, penyiapan peta jalan investasi serta desain peningkatan kapasitas SDM yang dibutuhkan guna mengakselerasi penetrasi teknologi digital di sektor pertanian. Saldo awal sebesar Rp860.195.163,00. Dari pendapatan sebesar Rp0,00 telah dilakukan pengesahan belanja sebesar Rp479.772.668,00 sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp380.422.495,00.

Saldo sebesar Rp1.569.505.704,00 pada BP selain kas adalah saldo rekening Nomor Register 2HK7TXXA (IndoDairy 2) dan Nomor Register 2V3CPU5A (*Digital AgTech*). Nilai tersebut merupakan sisa saldo yang disimpan pada rekening giro masing-masing kegiatan sebagai dana luncuran untuk kegiatan TA 2026.

- b. Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 di Ditjen Perkebunan sebesar Rp798.012.133,00 merupakan hibah langsung untuk membiayai Proyek FOLUR (*Food Systems, Land Used and Restoration*) yang dibiayai oleh *Global Environmental Facility* (GEF) sebagai implementing partner di Indonesia adalah *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Food And Agriculture* (FAO). Saldo tersebut merupakan saldo hibah dari FAO yang terdapat pada rekening Bank Mandiri nomor 127-00-1223620-2 sebesar Rp798.012.133,00.
- c. Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp4.066.029.944,00 merupakan sisa dana hibah luar negeri terdapat pada 10 satker dapat disajikan pada penjelasan sebagai berikut:

Tabel C.3.2 Saldo Kas Lainnya dari Hibah pada Eselon I BRMP

Nama Satker	Pemberi Hibah	Nama Proyek	Nomor Register	Jangka Waktu	Norek	Nama Bank	Nilai
BRMP Tanaman Sayuran	Onions NZ	<i>Agriculture standardization toward sustainable shallot production in Indonesia</i>	2WM1TC7A	7 Juni 2023 - 7 Juni 2025	088701000087305	Bank BRI KC Lembang	187.732.882
BBRMP Biogen	FAO	<i>Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia</i>	2LY44N2A	9 Jan 2024 - 31 Des 2027	1330028384139	Bank Mandiri KC Bogor	862.124.171
BBRMP Tanaman Padi	AFACI	<i>Asia Regional FAW and BPH Diagnostics and Monitoring and Surveillance Program</i>	2UERPT5A	Okt 2023-Sept 2026	035501002482300	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	483.900.000
BBRMP Tanaman Padi	AFACI	<i>Accelerate Variety Registration and Seed Distribution of Stress Tolerant Rice Varieties by AFACI Member Countries</i>	2BT3NKSA	1 Sept 2025 - 30 Juli 2029	35501002743308	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	207.100.000

Nama Sarker	Pemberi Hibah	Nama Proyek	Nomor Register	Jangka Waktu	Norek	Nama Bank	Nilai
BBRMP SDLP	AFACI	<i>National Soil Information Systems to Support The Transformation of Agrifood Systems</i>	2227WN8A	18 Sept 2023 - 18 Sept 2026	001201004790303	Bank BRI KC Bogor	344.867.494
BBRMP SDLP	KOAT	<i>Korean Agriculture Technology Promotion Agency (KOAT)</i>	2JL7VCNA	1 Sept 2024 – 31 Des 2025 add 31 Des 2026	001201004887304	Bank BRI KC Bogor	558.937.966
BRMP Tanaman Pemanis	Hirata Corporation	<i>Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus, and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products</i>	29KPWDNA	22 Sept 2021 - 31 Des 2024 add 31 Des 2026	1327421375	Bank BNI KC ITN2 Tasikmadu	1.820.266
BRMP Tanaman Hias	Sakata Seed Cooperation	<i>Cooperation Expedition Evaluation and Breeding Program for New Ornamental Plants</i>	2RG22RNA	26 Mar 2020 - 31 Des 2029	946300929	Bank BNI KC Cipanas	607.660
BRMP Tanaman Hias	Hirata Corporation	<i>Plant Extracts and Their Essential Oils as Potential Antimicrobial Agents for Food Coloring, Cosmetics & Toiletry, and Pharmaceutical Uses</i>	2TBZWZ2A	22 Sept 2021 - 31 Des 2024 add 31 Des 2026	1371403691	Bank BNI KC Cipanas	3.555.500
BRMP Tanaman Aneka Kacang	AVDRC-World Veg Center	<i>International Mungbean Improvement Network (IMIN)2</i>	272ZYD9A	7 Jan 2021 - 30 Juni 2025	1440044022280	Bank Mandiri KC Malang	177.226.422
BRMP Tanaman Aneka Kacang	HIRATA CORPORATION	<i>Exploration and Mass Production Technology for Maximizing Beneficial Compounds of Indigenous Under Utilized Legume and Tuber Crops as Natural Colorant, Pharmacy, Functional Food and Food Industries</i>	2G9MNV1A	22 Sept 2021 - 22 Sept 2026	5101003613302	Bank BRI KC Malang	39.179.469
BRMP Mektan	UNESCAP	<i>Strengthening Mechanization-based Solutions for Climate-smart Crop Residue Management in Cambodia, Indonesia and Nepal</i>	24PMKT7A	17 Sept 20224- 31 Jan 2025 add 31 Jan 2028	217101000540304	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	201.535
BBRMP Pascapanen	AFACI	<i>Quality Improvement of Asian Food Composition Database</i>	272GNQ2A	1 Sept 2024 - 31 Agust 2027	1885097246	Bank BNI KC Merdeka Bogor-	832.329.713
BBRMP SDLP	ACIAR	<i>Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping System in Coastal Indonesia</i>		29 Des 2020 - 31 Des 2023 add s/d 31 Januari 2026	001201004016301	Bank BRI KC Bogor	364.990.316

Nama Satker	Pemberi Hibah	Nama Proyek	Nomor Register	Jangka Waktu	Norek	Nama Bank	Nilai
BRMP Jestro	Hirata Corporation	<i>Development of Potent Food Supplement from Citrus and Its Wild Relative</i>		22 Sept 2021 - 31 Des 2024 add 31 Des 2026	1440022403213	Bank Mandiri KC Batu	1.456.550
Jumlah							4.066.029.944

4. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 di Ditjen PKH sebesar Rp749.906.071,00 berasal dari Satker BBIB Singosari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp37.031.048.393,00 dan Rp13.662.013.011,00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp23.369.035.382,00 atau 171,05% apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024.

Terdapat kenaikan signifikan di satker Pusvetma sebesar Rp20.436.711.764,00 dikarenakan terdapat pendapatan BLU yang meningkat terutama pada akun 424118 Pendapatan Penyediaan Barang.

Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4.1. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024

Eselon I	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Ditjen PKH	Pusvetma Surabaya	26.389.978.007	5.953.266.243	20.436.711.764
	BIB Lembang	3.314.553.126	1.793.607.846	1.520.945.280
	BBIB Singosari	7.326.517.260	5.915.138.922	1.411.378.338
Jumlah		37.031.048.393	13.662.013.011	23.369.035.382

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.2. Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	Pusvetma Surabaya	BIB Lembang	BBIB Singosari	Jumlah
Saldo 31 Desember 2024	5.953.266.243	1.793.607.846	5.915.138.922	13.662.013.011
Mutasi Tambah	86.771.968.598	20.196.195.145	36.084.478.642	143.052.642.385
Pendapatan BLU	86.771.968.598	20.196.195.145	36.084.478.642	143.052.642.385
Mutasi Kurang	66.335.256.834	18.675.249.865	34.673.100.304	119.683.607.003
Belanja Barang BLU	46.623.458.724	15.634.700.865	32.956.574.175	95.214.733.764
Belanja Modal BLU	4.211.798.110	1.540.549.000	1.716.526.129	7.468.873.239
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	15.500.000.000	1.500.000.000	0	17.000.000.000
Saldo 31 Desember 2025	26.389.978.007	3.314.553.126	7.326.517.260	37.031.048.393

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU pada Kementerian Pertanian hanya ada pada satker BLU di bawah Ditjen PKH yaitu Pusvetma Surabaya, BIB Lembang, dan BBIB Singosari. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp136.140.383.548,00 dan Rp119.140.383.548,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp17.000.000.000,00 atau 14,27%, apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.5.1. Saldo Investasi Jangka Pendek - BLU
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pusvetma Surabaya	58.000.000.000	42.500.000.000	15.500.000.000
2	BIB Lembang	34.640.383.548	33.140.383.548	1.500.000.000
3	BBIB Singosari	43.500.000.000	43.500.000.000	0
Jumlah		136.140.383.548	119.140.383.548	17.000.000.000

1. Investasi Jangka Pendek Pusvetma Surabaya

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 pada Pusvetma Surabaya sebesar Rp58.000.000.000,00 merupakan saldo enam rekening deposito di satu bank, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.5.2. Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito	Jatuh Tempo
1	BTN	0005801400043588	25.000.000.000	6 bulan	4 April 2026
2	BTN	0005801400044893	5.000.000.000	1 bulan	21 Januari 2026
3	BTN	0005801400046112	5.000.000.000	3 bulan	11 Januari 2026
4	BTN	0005801400046120	7.000.000.000	3 bulan	11 Januari 2026
5	BTN	0005801400046942	10.000.000.000	3 bulan	19 Februari 2026
6	BTN	0005801400046934	6.000.000.000	1 bulan	19 Januari 2026
Jumlah			58.000.000.000		

2. Investasi Jangka Pendek oleh BIB Lembang

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 pada BIB Lembang sebesar Rp34.640.383.548,00 merupakan saldo empat rekening deposito di dua bank, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.5.3. Rekening Deposito Satker BLU BIB Lembang

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito	Jatuh Tempo
1	BRI Cab.Naripan Bandung	033701005956407	6.000.000.000	6 bulan	29 Juni 2026
2	Bank Syariah Indonesia KCP Padalarang	7000000189335436	9.000.000.000	3 bulan	4 Maret 2026
3	Bank Syariah Indonesia KCP Padalarang	7000000197391407	9.140.383.548	3 bulan	8 Februari 2026
4	Bank Syariah Indonesia	7000000210792297	10.500.000.000	3 bulan	25 Maret 2026
Jumlah			34.640.383.548		

3. Investasi Jangka Pendek BBIB Singosari

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 pada BBIB Singosari sebesar Rp43.500,000,000,00 merupakan saldo empat rekening deposito di tiga bank. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.5.4. Rekening Deposito Satker BLU BBIB Singosari

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito	Jatuh Tempo
1	BNI	1892095829	10.000.000.000	3 bulan	23 Desember 2025
2	BTN Cab.Malang	0001201400124875	21.500.000.000	1 bulan	21 Desember 2025
3	BRI Cab.Lawang	055401003255407	7.000.000.000	3 bulan	10 November 2025
4	BNI	1892095477	5.000.000.000	3 bulan	21 Desember 2025
Jumlah			43.500.000.000		

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.267.803.895,00 dan Rp143.811.096.406,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp142.543.292.511,00 atau 99,12%. apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	Setjen	0	322.178.558	(322.178.558)
		Jumlah		0	322.178.558	(322.178.558)
2	Belanja Barang	Belanja Barang Non Operasional	Setjen	1.004.272.500	0	1.004.272.500
		Belanja Barang Operasional	Itjen	0	1.035.000	(1.035.000)
		Belanja Perjalanan Dinas	Itjen	0	23.621.304	(23.621.304)
		Belanja Jasa	Itjen	36.677.700	0	36.677.700
			Ditjen PKH	8.853.695	0	8.853.695
		Belanja Barang Non Operasional	Ditjen TP	218.000.000	220.000.000	(2.000.000)
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Ditjen PSP	0	143.244.261.544	(143.244.261.544)
		Jumlah		1.267.803.895	143.488.917.848	(142.221.113.953)
Total				1.267.803.895	143.811.096.406	(142.543.292.511)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan signifikan pada Eselon I Ditjen PSP sebesar Rp143.244.261.544,00 dengan penjelasan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp14.657.027.545,00 dan penyesuaian berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Jenderal bahwa pertanggungjawaban telah sesuai sebesar Rp86.731.998.121,00.

1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang

- a. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 pada Setjen sebesar Rp1.004.272.500,00 merupakan layanan keamanan anti malware & DDOS untuk 2 tahun (2026 dan 2027)
- b. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 pada Itjen sebesar Rp36.677.700,00 merupakan:
 - 1) Sewa Server gowas.id bulan Januari sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp3.130.200,00;
 - 2) Biaya Langganan Zoom bulan Januari sampai dengan Mei 2026 sebesar Rp17.297.500,00;
 - 3) Biaya Langganan Chat GPT AI Business 3 (tiga) akun bulan Januari sampai dengan Oktober 2026 sebesar Rp16.250.000,00.
- c. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2024 pada Ditjen TP sebesar Rp218,000,000,00 merupakan belanja barang non operasional lainnya Tahun 2020 berupa biaya avtur pesawat yang tidak diakui bukti pertanggungjawabannya dan belum seluruhnya ditindaklanjuti.
- d. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 pada Ditjen PKH sebesar Rp8.853.695,00 merupakan belanja dalam bentuk langganan jasa yang manfaat nya belum diterima sepenuhnya yang terdapat pada satker Balai Inseminasi Buatan Lembang dalam bentuk yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - 1) Biaya langganan *hosting website* yang dengan jangka waktu 1 tahun (Oktober 2025 s.d Oktober 2026);
 - 2) Biaya langganan *google one* (Februari 2025 s.d Februari 2026);
 - 3) Biaya langganan *hosting aplikasi web service* dan input kinerja 1 tahun (November 2025 s.d November 2026).

C.7. UANG MUKA BELANJA (PREPAYMENT)

Uang Muka Belanja adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah terlebih dahulu kepada pihak ketiga (rekanan/pegawai) sebelum barang atau jasa diterima secara penuh.

Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp45.627.931.810,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp45.627.931.810,00, apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2024. Rincian saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.7.1 Saldo Uang Muka Belanja
per 31 Desember 2025 dan 2024**

per 31 Desember 2025 dan 2024				
No	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Ditjen BUN	5.243.919.210	0	5.243.919.210
2	Ditjen LIP	2.794.012.600	0	2.794.012.600
		37.590.000.000	0	37.590.000.000
Jumlah		45.627.931.810	0	45.627.931.810

Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.037.931.810,00 berasal dari 2 (dua) Eselon I yakni Ditjen Bun dan Ditjen LIP yaitu :

1. Ditjen Bun sebesar Rp5.243.919.210,00 yang masih berupa Uang Muka Belanja atas pekerjaan yang belum selesai pengerjaannya pada Satker Kantor Pusat Ditjen Perkebunan dengan rincian nilai kontrak sebagai berikut.

Tabel C.7.2 Saldo Uang Muka Belanja per Kontrak pada Eselon I Ditjen Perkebunan

No	Nama Vendor	Kabupaten	Nilai Kontrak	Nilai Uang Muka
1	CV. Budi Jaya Sejati	Kab Sumbawa	878.973.000	263.691.900
2	CV. Indonesia Hijau	Kab. Bondowoso	4.077.000.000	1.351.875.000
3	CV. Samudra Hijau	Kab. Bandung Barat	2.593.915.000	1.223.100.000
4	CV. Budi Jaya Sejati	Kab. Temanggung	3.001.060.200	172.281.000
5	CV. Indonesia Hijau	Kab. Bandung	4.506.250.000	554.478.750
6	CV. Samudra Hijau	Kab. Banjarnegara	1.848.262.500	778.174.500
7	CV. Samudra Hijau	Kab. Sumba Tengah	900.318.060	900.318.060
Jumlah			17.805.778.760	5.243.919.210

2. Ditjen LIP sebesar Rp40.384.012.600,00 yang terdiri dari.

- a. Sebesar Rp2.794.012.600,00 yang masih berupa Uang Muka Belanja atas pekerjaan yang belum selesai pengerjaannya pada Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, yang kegiatannya berupa konstruksi cetak sawah dengan rincian nilai kontrak sebagai berikut.

Tabel C.7.3 Saldo Uang Muka Belanja per Kontrak pada Satker Dinas TPH dan Peternakan Provinsi Jambi di Eselon I Ditjen LIP

No	Nama Rekanan	Kecamatan	Nilai Kontrak	Nilai Uang Muka
1	CV.Baston Pillar Barakarsa	Bungo	300.046.510	300.046.510
2	PT.Tepian Sungai Batanghari	Batanghari	729.942.150	218.982.645
3	CV.Ratu Citra Abadi	Batanghari	1.524.947.507	457.484.252
4	CV.Gemilang Indah Mandiri	Bungo	2.899.324.496	869.797.349
5	CV.Abiyyu Bangun Konstruksi	Bungo	3.159.006.146	947.701.844
Jumlah			8.613.266.809	2.794.012.600

- b. Sebesar Rp37.590.000.000,00 berupa Uang Muka Belanja atas pekerjaan yang belum selesai pengerjaannya pada Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, yang kegiatannya berupa konstruksi cetak sawah dengan rincian nilai uang muka sebagai berikut

Tabel C.7.4 Saldo Uang Muka Belanja per Kontrak pada Satker Dinas TPH dan Perkebunan Kabupaten Merauke di Eselon I Ditjen LIP

No	Nama	Kabupaten	Nilai Uang Muka
1	KODIM 1707 MERAUKE	Merauke	892.500.000
2	BATALYON INFANTERI TP 802 WMJ CSR 2025	Merauke	1.750.000.000
3	KODIM 1707 MERAUKE	Merauke	10.045.000.000
4	BATALYON INFANTERI TP 801 NAY CSR 2025	Merauke	24.902.500.000
Jumlah			37.590.000.000

C.8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp193.264.700,00 dan Rp21.971.215,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp171.293.485,00 atau 779,63%. apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.8.1 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Jenis Pendapatan	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah.Gedung dan Bangunan	BRMP	112.262.500	0	112.262.500
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan. Pernakan dan Budidaya	BPPSDMP	81.002.200	21.971.215	59.030.985
Jumlah			193.264.700	21.971.215	171.293.485

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 sebesar Rp193.264.700,00 berasal dari 2 Eselon I yakni.

1. Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Eselon I BRMP sebesar Rp112.262.500,00 berasal dari pendapatan Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Sukamandi yang merupakan penerimaan yang masih harus diterima entitas atas sewa gedung koperasi, RMU, dan sewa kantin.
2. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Eselon I BPPSDMP sebesar Rp81.002.200,00 yang berasal dari Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Malang Jawa Timur terdiri dari pendapatan penjualan hasil pertanian sebesar Rp64.002.200,00 dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp17.000.000,00.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 sebesar Rp193.264.700,00 telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas, berikut ini daftar setoran Pendapatan yang Masih Harus Diterima dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel C.8.2 Daftar Setoran Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2025**

No	Uraian Eselon I	Uraian Satker	31 Desember 2025 (Rp)	Tanggal Setor	Penyetoran	NTPN
1	BRMP	Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	112.262.500	5 Januari 2026	54.810.000	3A9188N3ETL3HNB
				5 Januari 2026	50.052.500	F4FF548VVOP5GMPG
				10 Maret 2026	3.700.000	A49FC8N3F63LOKA5
				9 April 2026	3.700.000	4C6127QLVBK1LMQ6
2	BPPSDMP	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Malang Jawa Timur	81.002.200	5 Januari 2026	2.250.000	1F81D490011L1MMS
				7 Januari 2026	8.400.000	F4B770NA0MO5JVPM
				7 Januari 2026	4.500.000	771F88N3F5TL906P
				7 Januari 2026	3.100.000	B19A03CIG6FAR0DF
				7 Januari 2026	1.000.000	BCD88490011N80GK
				7 Januari 2026	18.623.100	2607E2G50BSUE82O
				20 Januari 2026	43.129.100	D89903CIG6FNARIF
	Jumlah		193.264.700		193.264.700	

C.9. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp271.894.760.120,00 dan Rp15.654.555.309,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp256.240.204.811,00 atau 1.636,84% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Setjen	950.248.535	505.969.442	444.279.093
2	Itjen	139.039.712	1.350.000	137.689.712
3	Ditjen TP	1.090.944.140	157.957.817	932.986.323
4	Ditjen Horti	963.409.504	757.451.057	205.958.447
5	Ditjen Bun	1.294.105.115	1.204.897.852	89.207.263
6	Ditjen PKH	10.349.862.708	8.403.228.255	1.946.634.453
7	Ditjen PSP	4.854.720.455	41.126.215	4.813.594.240
8	BRMP	3.514.643.994	4.361.695.016	(847.051.022)
9	BPPSDMP	161.553.447	220.879.655	(59.326.208)
10	Ditjen LIP	248.576.232.510	0	248.576.232.510
Jumlah		271.894.760.120	15.654.555.309	256.240.204.811

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur per Eselon I disajikan pada **Lampiran C.9.1.**

Berikut ini disajikan rekapitulasi perhitungan kualitas Piutang Bukan Pajak sebagai berikut

**Tabel C.9.2. Rekapitulasi Perhitungan Kualitas Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2025**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan	Ket
Piutang Bukan Pajak				
Lancar	3.371.434.666	0,50%	(34.961.896)	Terdapat selisih dalam perhitungan penyisihan, Masih dalam kondisi normal dan aktif ditagih
Kurang Lancar	507.536.296	10%	(50.753.630)	Terdapat keterlambatan pembayaran
Diragukan	830.000	50%	(415.000)	Potensi ketertagihan rendah
Macet	9.990.549.798	100%	(9.990.549.798)	Tidak tertagih/berisiko tinggi
Tidak disisihkan	258.024.409.360			Merupakan Penerimaan Kembali Belanja TAYL yang sudah disetor di tahun 2026
Jumlah	271.894.760.120		(10.076.680.324)	

Berdasarkan tabel diatas, sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2025, saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp271.894.760.120,00 masih dalam proses penyelesaian oleh satuan kerja pemilik piutang. Piutang tersebut terdiri atas piutang dengan kualitas lancar sebesar Rp3.371.434.666,00, kurang lancar sebesar Rp507.536.296,00, diragukan sebesar Rp830.000,00, dan macet sebesar Rp9.990.549.798,00, serta piutang yang tidak dilakukan penyisihan sebesar Rp258.024.409.360,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja

TAYL yang sudah disetor di tahun 2026. Atas piutang tersebut, satuan kerja masih melakukan upaya penagihan secara aktif, terutama terhadap piutang dengan kualitas lancar, kurang lancar, dan diragukan melalui penerbitan surat tagihan, surat peringatan, serta koordinasi dengan pihak debitur. Dan sebagai tindaklanjut kementan telah menghimbau dengan bersurat ke Unit eselon 1 Lingkup kementan dengan Surat Sekjen nomor B-5355/PW.210/A/11/2025 tanggal 24 november 2025 untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan penagihan terhadap piutang yang sudah jatuh tempo. Untuk piutang dengan kualitas macet, Kementerian Pertanian tetap melakukan evaluasi dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mempertimbangkan langkah penyelesaian lebih lanjut sesuai mekanisme pengurusan piutang negara.

Sampai dengan tanggal pelaporan, piutang sebesar Rp271.894.760.120,00 belum didukung dengan barang jaminan atau agunan dari pihak debitur. Piutang tersebut memiliki nilai yang material sehingga berpotensi menimbulkan risiko kerugian negara apabila tidak dapat tertagih.

Selama periode pelaporan, belum terdapat pelaksanaan penyitaan atas barang jaminan yang terkait dengan piutang yang dimiliki. Entitas tetap melakukan monitoring atas piutang dan kualitas agunan, serta mempertimbangkan langkah penyelesaian lebih lanjut apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Sebagai informasi, terdapat Piutang Bukan Pajak yang memuat tentang temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan usulan jurnal koreksi sebagai berikut.

Tabel C.9.3. Saldo Piutang Bukan Pajak Terkait Temuan BPK terhadap Usulan Jurnal Koreksi per 31 Desember 2025

No.	Eselon I	Nilai	Penjelasan Tindaklanjut
1	Ditjen PKH	726.542.006	Kurang Volume Pekerjaan SBSN satker BBVET Singosari
2	Ditjen PKH	574.805.124	Kurang Volume Pekerjaan SBSN satker BBVET Maros
3	Ditjen PSP	11.463.962	Pengembalian denda keterlambatan pada kegiatan pengadaan alat dan mesin satker Ditjen PSP
4	Ditjen PSP	2.019.924.131	Pengembalian bantuan pemerintah pada kegiatan konstruksi optimasi lahan rawa TAYL sebelum tahun 2025 satker Ditjen PSP
5	BRMP	417.596.085	Kelebihan Pembayaran Belanja atas kegiatan lcare satker BRMP
6	LIP	2.417.356.666	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Olah Lahan Tahun 2025 satker 691327
7	LIP	1.969.921.022	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Optimasi Lahan non rawa tahun 2025 satker 691331
8	LIP	95.928.000	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Optimasi Lahan non rawa tahun 2025 satker 691333
9	LIP	1.997.190.000	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Olah Lahan Tahun 2025 satker 691345
10	LIP	207.571.341	Pengembalian Bantuan Pemerintah Jasa Konsultan Swakelola SID Kegiatan Cetak Sawah dan SID Optimasi Lahan Rawa dan Non Rawa Sawah Tahun 2025 satker 691355
11	LIP	4.119.444.822	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Kegiatan SID Cetak Sawah, SID Oplah, CSR dan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa tahun 2025 satker 691357
12	LIP	96.600.000	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa tahun 2025 satker 691377

No.	Eselon I	Nilai	Penjelasan Tindakan lanjut
13	LIP	237.304.672.045	Kelebihan pembayaran kegiatan konstruksi cetak sawah 10 Provinsi lingkup Ditjen LIP pada Satker Konsolidasi Kementan
	JUMLAH	251.959.015.204	

Ditjen LIP sudah menerbitkan Surat Dirjen LIP nomor B-1691/TW.220/J/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Penagihan Piutang Kelebihan Bayar atas konstruksi cetak sawah tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kenaikan signifikan pada Ditjen LIP sebesar Rp248.576.232.510,00 yang terdiri dari

1. Sebesar Rp237.304.672.045,00 yang merupakan mencatat kelebihan pembayaran konstruksi cetak sawah di 10 Provinsi diakui sebagai piutang di tahun 2025, yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel C.9.4. Saldo Piutang Bukan Pajak Per Satker 10 Provinsi Ditjen LIP per 31 Desember 2025

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Nilai Penyetoran Keseluruhan	Detail Penyetoran	Keterangan
1	691335	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	69.091.461.437	31.245.608.320	2.166.801.727	Konstruksi Cetak Sawah OKI
					1.997.807.799	Konstruksi Cetak Sawah OKI
					11.019.623.410	Konstruksi Cetak Sawah OKI
					13.345.552.032	Konstruksi Cetak Sawah OKI
					879.459.092	Konstruksi Cetak Sawah Mura Tara
					1.836.364.260	Konstruksi Cetak Sawah Ogan Ilir
2	691359	Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	6.476.560.238	6.476.560.238	401.285.021	Konstruksi Cetak Sawah
					6.075.275.217	Konstruksi Cetak Sawah
3	691365	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	861.706.290	861.706.290	861.706.290	Konstruksi Cetak Sawah
5	691353	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	561.737.325	561.737.325	561.737.325	Konstruksi Cetak Sawah
6	691355	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perternakan Provinsi Kalimantan Tengah	22.424.477.343	2.703.153.501	2.430.099.208	Konstruksi Cetak Sawah
					273.054.293	Konstruksi Cetak Sawah
			108.747.717.591	55.482.891.384	15.408.235.500	Konstruksi Cetak Sawah
					6.129.664.068	Konstruksi Cetak Sawah
					2.961.080.587	Konstruksi Cetak Sawah
					1.001.793.143	Konstruksi Cetak Sawah
					5.755.160.783	Konstruksi Cetak Sawah
					2.363.123.000	Konstruksi Cetak Sawah
					4.231.850.000	Konstruksi Cetak Sawah
					5.474.000.000	Konstruksi Cetak Sawah
					2.384.070.500	Konstruksi Cetak Sawah

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Nilai Penyetoran Keseluruhan	Detail Penyetoran	Keterangan
					1.217.965.000	Konstruksi Cetak Sawah
					3.710.297.500	Konstruksi Cetak Sawah
					431.434.000	Konstruksi Cetak Sawah
					20.016.500	Konstruksi Cetak Sawah
					2.202.690.000	Konstruksi Cetak Sawah
					143.335.500	Konstruksi Cetak Sawah
					19.113.500	Konstruksi Cetak Sawah
					1.293.320.000	Konstruksi Cetak Sawah
					70.120.405	Konstruksi Cetak Sawah
					185.305.519	Konstruksi Cetak Sawah
					39.700.880	Konstruksi Cetak Sawah
					62.812.150	Konstruksi Cetak Sawah
					239.645.027	Konstruksi Cetak Sawah
					138.157.822	Konstruksi Cetak Sawah
8	691756	Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	15.132.744.171	1.500.000.000	1.500.000.000	Konstruksi Cetak Sawah
9	691371	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	2.875.771.300	2.875.771.300	2.875.771.300	Konstruksi Cetak Sawah
10	691367	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	2.088.901.933	2.088.901.933	809.784.355	Konstruksi Cetak Sawah
					1.279.117.578	Konstruksi Cetak Sawah
11	691369	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi tenggara	2.640.740.230	-		
12	691373	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	3.384.255.892	-		
13	691357	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	3.018.598.295	-		
Jumlah			237.304.672.045	103.796.330.291	103.796.330.291	

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk Ditjen LIP per kegiatan, nomor kontrak dapat disajikan **Lampiran C.9.2.**

2. Sebesar Rp11.271.560.465,00 yang berasal dari beberapa Satker sebagai berikut.

Tabel C.9.5. Saldo Piutang Bukan Pajak Per Satker Ditjen LIP per 31 Desember 2025

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	691321	Direktorat Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian	361.378.131	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Direktorat Penyediaan Lahan dan Belanja Bahan, Belanja Sewa dan Perjalanan Dinas dan Kegiatan UPLAND

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
2	691325	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	6.075.000	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Optimasi Lahan non rawa tahun 2025
3	691327	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	2.417.356.666	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Olah Lahan Tahun 2025
4	691331	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	1.969.921.022	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Optimasi Lahan non rawa tahun 2025
5	691333	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	95.928.000	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Opla Non Rawa Tahun 2025
6	691345	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	1.997.190.000	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Olah Lahan Tahun 2025
7	691347	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	95.483	Pengembalian Bantuan Pemerintah Bunga/Jasa Bank Tahun 2025
8	691355	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perternakan Provinsi Kalimantan Tengah	207.571.341	Pengembalian Bantuan Pemerintah Jasa Konsultan Swakelola SID Kegiatan Cetak Sawah dan SID Optimasi Lahan Rawa dan Non Rawa Sawah Tahun 2025
9	691357	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	4.119.444.822	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Kegiatan SID Cetak Sawah, SID Oplah, CSR dan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa tahun 2025
10	691377	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	96.600.000	Pengembalian Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa tahun 2025
Jumlah			11.271.560.465	

Seluruh piutang bukan pajak Ditjen LIP sebesar Rp11.271.560.465,00 seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke kas negara di periode Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan penurunan signifikan pada Eselon I BRMP sebesar Rp847.051.022,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penjelasan Mutasi tambah sebesar Rp1.587.800.962,00 yang berasal dari transaksi sebagai berikut.
 - a. Terdapat Reklasifikasi masuk dari Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp49.048.480,00.
 - b. Terdapat koreksi Lainnya yang menambah piutang sebesar Rp190.414.025,00.
 - c. Terdapat pembentukan piutang dari pendapatan penjualan hasil pertanian sebesar Rp16.125.000,00
 - d. Terdapat pembentukan piutang dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi sebesar Rp246.000,00.
 - e. Terdapat pembentukan piutang dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp198.415.971,00.
 - f. Terdapat pembentukan piutang dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp9.840.000,00.

- g. Terdapat pembentukan piutang dari kelebihan belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp75.407.933,00
 - h. Terdapat pembentukan piutang dari kelebihan belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp3.427.450,00
 - i. Terdapat pembentukan piutang dari kelebihan Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp16.616.076,00
 - j. Terdapat pembentukan piutang dari kelebihan Belanja Jasa sebesar Rp982.998.667,00
 - k. Terdapat pembentukan piutang dari kelebihan Belanja pemeliharaan sebesar Rp2.778.969,00
 - l. Terdapat pembentukan piutang dari kelebihan Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp42.472.091,00
2. Penjelasan Mutasi kurang sebesar Rp2.434.851.984,00 yang berasal dari transaksi sebagai berikut.
- a. Terdapat Reklasifikasi keluar ke Piutang TP/TGR sebesar Rp38.868.200,00.
 - b. Terdapat koreksi Lainnya yang mengurangi piutang sebesar Rp199.559.025,00.
 - c. Terdapat pelunasan piutang dari pendapatan penjualan hasil pertanian sebesar Rp22.125.000,00
 - d. Terdapat pelunasan piutang dari pendapatan sewa tanah dan gedung bangunan sebesar Rp9.660.000,00
 - e. Terdapat pelunasan piutang dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi sebesar Rp246.000,00.
 - f. Terdapat pelunasan piutang dari Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual sebesar Rp172.377.468,00.
 - g. Terdapat pelunasan piutang dari Pendapatan denda keterlambatan sebesar Rp49.048.480,00.
 - h. Terdapat pelunasan piutang dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp1.820.678.859,00
 - i. Terdapat pelunasan piutang dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp9.840.000,00.
 - j. Terdapat pelunasan piutang dari kelebihan Belanja Jasa sebesar Rp112.448.952,00

C.10. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.228.755.441,00 dan Rp9.596.500.361,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp632.255.080,00 atau 6,59% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.10.1. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	Ditjen Horti	91.985.000	64.425.000	27.560.000
2	Tuntutan Ganti Rugi	Setjen	1.868.080.514	1.868.080.514	0
		Itjen	93.466.845	186.511.801	(93.044.956)
		Ditjen TP	225.204.318	225.204.318	0
		Ditjen Horti	6.302.272.159	4.490.343.024	1.811.929.135
		Ditjen Bun	0	2.129.596.990	(2.129.596.990)
		Ditjen PKH	1.281.356.161	211.448.270	1.069.907.891
		Ditjen PSP	349.927.130	403.927.130	(54.000.000)
		BRMP	16.463.314	16.963.314	(500.000)
Jumlah			10.228.755.441	9.596.500.361	632.255.080

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur per Eselon I disajikan pada **Lampiran C.10**.

Sedangkan penurunan signifikan pada Eselon I Ditjen Bun sebesar Rp2.129.596.990,00 dikarenakan adanya mutasi pengurangan berupa Reklas ke Piutang Jangka Panjang Lainnya pada satker inaktif dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Satker (099316TP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Sebesar Rp39.507.500,00 merupakan kemahalan harga atas pengadaan bibit kelapa sawit siap salur;
2. Satker (200831TP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara sebesar Rp196.626.515,00 merupakan temuan kerugian negara berupa kelebihan pembayaran atas pengadaan benih untuk kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh kepada CV. Garis Indonesia sebesar Rp10.892.727,00. Terdapat temuan kerugian negara berupa kelebihan pembayaran atas pengadaan rumah pengering (solar dryer di Desa Tolallang Kecamatan Lasusua kepada CV.Adam Putera Mandiri sebesar Rp16.151.537,60 (dibulatkan Rp16.151.538,00). Terdapat temuan kerugian negara berupa pertanggungjawaban anggaran dana tugas pembantuan tidak dapat dipkas dibenertanggungjawabkan sebesar Rp34.906.750,00. Terdapat temuan kerugian negara berupa kelebihan pembayaran atas pengadaan gedung dan bangunan serta pagar demplot kakao kepada CV. AI Ghyfari seluruhnya sebesar Rp84.103.500,00. Terdapat temuan kerugian negara berupa pertanggungjawaban keuangan yang tidak dibenarkan pada pembangunan kebun induk dan kebun entres TA 2020 yang belum tercapai sesuai tujuan sebesar Rp22.180.000,00. Terdapat temuan kerugian negara berupa pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai SBM sebesar Rp28.392.000,00;
3. Satker (341001TP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp372.927.054,00 terdiri dari kelebihan pembayaran kepada PT. Sinar Bumi Agung sebesar Rp120.253.852,00 kerugian negara sebesar Rp137.540.000,00 dari temuan LHA No: 253/RC.240/H/E09/2014 tanggal 19 September 2014. Kelebihan Pembayaran dan kemahalan Harga sebesar Rp54.796.480,00 Sisa Dana Upah kerja masih tersimpan di 20 rekening kelompok sebesar Rp31.550.000,00 kemahalan harga sebesar Rp14.000.400,00 kelebihan pembayaran Rp8.558.850,00 Kelebihan pembayaran kepada CV. Aufhan sebesar Rp2.627.472,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp1.800.000,00 dan Kemahalan harga oleh CV. Mutiara sebesar Rp1.800.000,00.

4. Satker (129072TP) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebesar Rp115.369.000,00 merupakan biaya upah tenaga kerja melebihi presentasi fisik penanaman dan pemeliharaan sebesar Rp12.734.000,00 PNPB belum disetor ke kas negara sebesar Rp104.500.000,00 pembayaran upah melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp47.474.000,00 pengadaan bahan melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp44.948.000,00 biaya pengadaan melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp22.947.000,00 kelebihan pembayaran kepada CV. Karya Mandiri sebesar Rp968.500,00;
5. Satker (209109TP) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp901.308.371,00 terdiri dari kelebihan pembayaran kepada PT. Rizlan Abadi Putra dan PT. Mujilae Sakti Convensindo sebesar Rp901.309.600,00 penyetoran lebih besar CV. Wahana Multi Cipta Rp1.132,00 penyetoran lebih besar CV. Duta Morini Laksana Rp54 dan penyetoran lebih besar CV. Ardian Raya Rp43;
6. Satker (299347DK) Dinas Pertanian Provinsi Banten Sebesar Rp27.850.000,00 merupakan piutang dari limpahan satker inaktif Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pandeglang (299382) temuan LHA No: R.225/PW.130/G.4/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 merupakan kelebihan pembayaran kepada CV. Tri Daya Guna sebesar Rp23.850.000,00 dan kemahalan harga oleh CV. Karunia Prakarsa Mandiri Sebesar Rp4.000.000,00;
7. Satker (329079TP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp8.548.550,00 merupakan temuan LHA No : R.69/PW.130/G.4/04/2016 tanggal 13 April 2016 yang merupakan temuan terkait bibit tidak sesuai spesifikasi teknis dan mati oleh CV. Khazanah Abadi;
8. Satker (330024TP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan provinsi Papua Barat sebesar Rp467.460.000,00 yaitu temuan LHA No : 260/RC.230/H/A/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 merupakan Kelebihan pembayaran sebesar Rp696.490.000,00 dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp40.970.000,00 kepada CV. Adinda Jaya yang telah disetorkan sebesar Rp270.000.000,00 sehingga masih terdapat saldo piutang per 31 Desember 2025 Rp467.460.000,00.

Berikut ini disajikan rekapitulasi perhitungan kualitas Bagian Lancar TP/TGR sebagai berikut

**Tabel C.10.2. Rekapitulasi Perhitungan Kualitas Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2025**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan	Ket
Bag.Lancar TP/TGR				
Lancar	3.844.177.980	0,50%	(19.414.139)	Terdapat selisih dalam perhitungan penyisihan
Kurang Lancar	2.054.845.367	10%	(205.484.537)	
Diragukan	143.781.970	50%	(71.890.985)	
Macet	4.146.010.064	100%	(4.146.010.064)	
Tidak disisihkan	39.940.060		0	Karena sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran
Jumlah	10.228.755.441		(4.442.799.725)	

C.11. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.495.000.633,00 dan Rp1.573.354.605,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp78.353.972,00 atau 4,98% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11.1. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pusvetma Surabaya	375.060.000	380.000.000	(4.940.000)
2	BBIB Singosari	1.119.940.633	1.193.354.605	(73.413.972)
Jumlah		1.495.000.633	1.573.354.605	(78.353.972)

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.11**.

Berikut ini disajikan rekapitulasi perhitungan kualitas piutang dari kegiatan Operasional BLU.

Tabel C.11.2. Rekapitulasi Perhitungan Kualitas Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang BLU	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang dari Kegiatan BLU			
Lancar	1.368.330.633	0,50%	(6.841.653)
Kurang Lancar	51.670.000	10%	(5.167.000)
Diragukan	75.000.000	50%	(37.500.000)
Macet	0	100%	0
Jumlah	1.495.000.633		(49.508.653)

C.12. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.568.988.702,00 dan Rp15.841.267.306,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.272.278.604,00 atau 8,03% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	Setjen	304.218.701	299.146.444	5.072.257
		Ditjen TP	157.957.817	29.892.350	128.065.467
		Ditjen Horti	235.078.121	237.667.328	(2.589.207)
		Ditjen Bun	1.004.742.283	1.014.742.283	(10.000.000)
		Ditjen PKH	6.354.441.832	6.340.804.964	13.636.868

No.	Jenis Piutang	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		BRMP	2.020.201.001	1.436.451.936	583.749.065
		BPPSDMP	40.569	0	40.569
	Jumlah		10.076.680.324	9.358.705.305	717.975.019
2	Bagian Lancar TP/TGR	Setjen	1.868.080.514	1.868.080.514	0
		Itjen	46.733.423	932.559	45.800.864
		Ditjen TP	225.204.318	225.204.318	0
		Ditjen Horti	1.765.660.985	1.873.276.848	(107.615.863)
		Ditjen Bun	0	1.933.953.608	(1.933.953.608)
		Ditjen PKH	185.353.774	211.448.270	(26.094.496)
		Ditjen PSP	349.927.130	352.477.130	(2.550.000)
		BRMP	1.646.331	1.696.331	(50.000)
	BPPSDMP	193.250	0	193.250	
Jumlah			4.442.799.725	6.467.069.578	(2.024.269.853)
3	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	Ditjen PKH	49.508.653	15.492.423	34.016.230
	Jumlah		49.508.653	15.492.423	34.016.230
Jumlah			14.568.988.702	15.841.267.306	(1.272.278.604)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada **Lampiran C.12.1, Lampiran C.12.2, dan Lampiran C.12.3.**

Sedangkan penurunan signifikan pada Eselon I Ditjen Bun sebesar Rp1.933.953.608,00 pada Bagian Lancar TGR yang berasal dari transaksi yang dilakukan reklasifikasi keluar dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TGR ke Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.933.953.608,00.

C.13. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 pada Bab VI Kebijakan Akuntansi Persediaan, memperoleh Perlakuan Khusus terhadap Persediaan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan BMN, tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai. Ketentuan tersebut berdampak pada penyajian Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kementerian Pertanian belum menerapkan PMK 100 Tahun 2025 pada penyajian saldo awal Persediaan 2025 (saldo 31 Desember 2024) untuk persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat maupun banpem diserahkan ke TNI/Instansi/Pemda.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.708.547.735.766,00 dan Rp409.128.324.634,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.299.419.411.132,00 atau 806,45% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.13.1 Saldo Persediaan per Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	1.188.757.757	991.295.885	197.461.872
2	Itjen	325.162.158	474.626.583	(149.464.425)
3	Ditjen TP	1.335.354.931	3.560.191.517	(2.224.836.586)
4	Ditjen Horti	2.776.414.754	16.036.125.276	(13.259.710.522)
5	Ditjen Bun	202.057.592.824	36.455.806.023	165.601.786.801
6	Ditjen PKH	300.309.383.705	318.565.045.681	(18.255.661.976)
7	Ditjen PSP	7.451.166.910	17.440.483.635	(9.989.316.725)
8	BRMP	24.872.263.001	14.801.788.839	10.070.474.162
9	BPPSDMP	811.801.466	802.961.195	8.840.271
10	Ditjen LIP	2.900.874.095.340	0	2.900.874.095.340
Jumlah		3.442.001.992.846	409.128.324.634	3.032.873.668.212

Rincian jenis persediaan pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.13.2 Rincian Persediaan Menurut Jenis Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	Setjen	686.602.174	663.910.420	22.691.754
		Itjen	290.172.611	471.453.583	(181.280.972)
		Ditjen TP	113.884.765	88.100.419	25.784.346
		Ditjen Horti	1.100.753.869	1.052.881.903	47.871.966
		Ditjen Bun	22.150.939.133	22.129.238.223	21.700.910
		Ditjen PKH	57.728.210.359	62.229.887.763	(4.501.677.404)
		Ditjen PSP	2.916.910	43.793.406	(40.876.496)
		BRMP	853.260.826	960.913.493	(107.652.667)
		BPPSDMP	184.326.766	169.094.645	15.232.121
	Ditjen LIP	122.486.680	0	122.486.680	
Jumlah		83.233.554.093	87.809.273.855	(4.575.719.762)	
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Itjen	9.930.000	3.173.000	6.757.000
		Ditjen TP	831.935	1.343.550	(511.615)
		Ditjen Horti	21.390.400	13.533.460	7.856.940
		Ditjen PKH	783.561.855	856.573.090	(73.011.235)
		Ditjen PSP	0	57.112.275	(57.112.275)
		BRMP	38.091.125	60.947.452	(22.856.327)
		BPPSDMP	12.588.900	25.340.550	(12.751.650)
		Ditjen LIP	1.451.654	0	1.451.654
	Jumlah		867.845.869	1.018.023.377	(150.177.508)
3	Suku Cadang	Setjen	1.934.400	2.334.000	(399.600)
		Ditjen TP	0	450.000	(450.000)
		Ditjen PKH	5.719.672.377	14.145.302.748	(8.425.630.371)
		BRMP	14.335.000	14.135.000	200.000
Jumlah		5.735.941.777	14.162.221.748	(8.426.279.971)	
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	0	1.198.000.000	(1.198.000.000)
		Ditjen LIP	137.687.689.577	0	137.687.689.577
	Jumlah		137.687.689.577	1.198.000.000	136.489.689.577
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	1.004.512.500	10.160.895.330	(9.156.382.830)
		Ditjen PKH	158.820.000	0	158.820.000
		BRMP	22.081.824.658	12.162.707.145	9.919.117.513
Jumlah		23.245.157.158	22.323.602.475	921.554.683	
6		Ditjen Horti	582.300.000	362.883.000	219.417.000

No.	Uraian Persediaan	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP	38.880.000	0	38.880.000
	Jumlah		621.180.000	362.883.000	258.297.000
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen LIP	6.577.062.000	0	6.577.062.000
	Jumlah		6.577.062.000	0	6.577.062.000
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	9.097.200.000	887.810.000	8.209.390.000
		Ditjen PKH	1.255.328.985	0	1.255.328.985
	Jumlah		10.352.528.985	887.810.000	9.464.718.985
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Ditjen TP	553.200.000	2.623.937.000	(2.070.737.000)
		Ditjen PSP	7.448.250.000	17.339.577.954	(9.891.327.954)
		Ditjen LIP	549.123.221.050	0	549.123.221.050
	Jumlah		557.124.671.050	19.963.514.954	537.161.156.096
10	Persediaan Dalam Proses	Ditjen Horti	67.320.650	3.247.931.583	(3.180.610.933)
		Ditjen Bun	170.809.453.691	13.438.757.800	157.370.695.891
		Ditjen LIP	2.167.847.752.392	0	2.167.847.752.392
	Jumlah		2.338.724.526.733	16.686.689.383	2.322.037.837.350
11	Bahan Baku	Setjen	0	12.290.500	(12.290.500)
		Ditjen TP	561.625.151	799.731.043	(238.105.892)
		Ditjen PKH	122.306.569.842	107.429.806.500	14.876.763.342
		BRMP	1.511.399.612	1.306.970.040	204.429.572
		Ditjen LIP	39.514.431.987	0	39.514.431.987
	Jumlah		163.894.026.592	109.548.798.083	54.345.228.509
12	Persediaan Lainnya	Setjen	500.221.183	312.760.965	187.460.218
		Itjen	25.059.547	0	25.059.547
		Ditjen TP	105.813.080	46.629.505	59.183.575
		Ditjen Horti	137.335	0	137.335
		Ditjen PKH	112.357.220.287	133.903.475.580	(21.546.255.293)
		BRMP	334.471.780	296.115.709	38.356.071
		BPPSDMP	614.885.800	608.526.000	6.359.800
	Jumlah		113.937.809.012	135.167.507.759	(21.229.698.747)
Total			3.442.001.992.846	409.128.324.634	3.032.873.668.212

Berdasarkan tabel C.13.2 diatas, terdapat perbedaan yang disajikan Persediaan di Neraca sebesar Rp3.442.001.992.846,00 sedangkan yang di Laporan Persediaan sebesar Rp3.708.547.735.766,00 sehingga selisih sebesar Rp266.545.742.920,00 dikarenakan mencatat kelebihan pembayaran konstruksi cetak sawah di 10 Provinsi yang diakui atau dicatat sebagai Piutang Lainnya pada Ditjen LIP. Adapun rincian jenis persediaan pada Laporan Persediaan per 31 Desember 2025 pada **Lampiran C.13.1.**

Nilai selisih sebesar Rp266.545.742.920,00 berasal dari transaksi.

- Pengakuan piutang lainnya dari Barang Persediaan Lainnya sebesar Rp146.866.676.430,00
- Pengakuan piutang lainnya dari Persediaan Dalam Proses sebesar Rp82.089.066.490,00
- Pengakuan Uang Muka Belanja dari Barang Persediaan Lainnya sebesar Rp37.590.000,00.

Untuk Persediaan yang Tidak dikuasai pada modul persediaan sebesar Rp4.348.665.078.890,00 dengan kuantitas sebanyak 94.961.247 unit, dapat disajikan pada **Lampiran C.13.2**

Berdasarkan tabel C.13.1 diatas, terdapat kenaikan signifikan pada Ditjen LIP sebesar Rp3.167.419.838.260,00 yang berasal dari.

1. Barang Konsumsi sebesar Rp122.486.680,00
2. Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp1.451.654,00
3. Konstruksi Cetak Sawah sebesar Rp2.591.706.331.289,00
4. Konstruksi Kegiatan Irigasi Bertekanan sebesar Rp6.577.062.000,00
5. Konstruksi Optimasi Lahan sebesar Rp406.703.480.651,00
6. Transfer masuk dari Ditjen PSP sebesar Rp162.309.025.988,00 berupa.
 - a. Konstruksi Cetak Sawah sebesar Rp429.000.000,00
 - b. Konstruksi Optimasi Lahan sebesar Rp145.665.208.210,00
 - c. SID sebesar Rp16.214.817.778,00

Khusus untuk Ditjen LIP, pada Satker Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat penjurnalan atas mutasi keluar Persediaan menjadi Beban Bantuan Pemerintah sebesar Rp193.019.011.248,00, diketahui belum seluruh pertanggungjawabannya telah selesai direviu oleh Itjen. Adapun nilai kontrak barang sebesar Rp259.319.111.483,00 dengan total kontrak sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah kontrak yang terdiri.

- a. Belum diajukan 10 kontrak sebesar Rp93.395.488.922,00
- b. Total perbaikan 10 kontrak sebesar Rp60.103.161.499,00
- c. Sesuai 3 kontrak dgn sebesar Rp49.303.345.464,00

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp75.332.641.275.051,00 dan Rp77.062.473.161.806,00. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Tanah	69.798.086.740.797	70.638.305.210.953	(840.218.470.156)
2	Peralatan dan Mesin	5.400.260.235.357	6.166.681.514.547	(766.421.279.190)
3	Gedung dan Bangunan	6.025.454.140.262	6.651.935.669.462	(626.481.529.200)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	682.135.640.758	744.888.902.341	(62.753.261.583)
5	Aset Tetap Lainnya	65.264.761.207	65.822.305.906	(557.544.699)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	144.438.352.432	22.005.998.264	122.432.354.168
7	Akumulasi Penyusutan	(6.782.998.595.762)	(7.227.166.439.667)	444.167.843.905
Jumlah		75.332.641.275.051	77.062.473.161.806	(1.729.831.886.755)

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.729.831.886.755,00 atau 2,24% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Dengan beralihnya Barantan menjadi Barantin sesuai Perpres Nomor 45 Tahun 2023, semua asset Kementerian Pertanian telah dialihkan status penggunaannya. Hal ini sesuai Berita Acara Alih Status Penggunaan BMN dari Kementerian Pertanian kepada Barantin sebagai berikut:

1. Nomor 4554/PL.310/A/12/2024 dan 11579/PL.310/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 sebesar Rp1.528.837.508.587.
2. Nomor 1195/PL.330/A/03/2025 dan 2134/PL.310/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 sebesar Rp1.654.352.925.808.
3. Nomor 2545/PL.330/A/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 sebesar Rp1.212.359.136.888.

Untuk melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2023, Pemerintah telah membentuk Badan Karantina Indonesia melalui Perpres Nomor 45 Tahun 2023. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Badan Karantina Indonesia merupakan penggabungan dari tiga badan karantina yaitu:

1. Badan Karantina Pertanian, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pertanian;
2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Unsur pengawasan dan pengendalian terhadap produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan dibentuknya Badan Karantina Indonesia, sejak pelaporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024, Badan Karantina Pertanian tidak lagi menjadi salah satu UAPPAE1. Hal tersebut karena Badan Karantina Indonesia mulai efektif mengelola anggaran tersendiri (BA 127) mulai Maret 2024. Selain berdampak pada perubahan anggaran, perpindahan Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia juga berdampak pada perpindahan pegawai serta alih status aset.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025, Pemerintah melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan pertanian. 7 Perubahan ini menegaskan perlunya pembentukan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian sebagai unit eselon I yang secara khusus bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, serta bimbingan teknis di bidang pengelolaan lahan pertanian dan irigasi.

Dalam Permentan 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tanggal 8 Januari 2025 dan Permentan 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, juga dijelaskan bahwa Satuan Kerja Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian dan Satuan Kerja Museum Tanah dan Pertanian berubah menjadi Satuan Kerja Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian dan Satuan Kerja Museum Tanah dan Pertanian. Koordinasi kedua satuan kerja tersebut berpindah dari Eselon 1 Sekretariat Jenderal ke Eselon 1 BPPSDMP.

Seiring dengan perubahan organisasi di atas, berikut ini disajikan Aset Tetap yang sudah dilakukan Transfer Keluar dan Transfer Masuk antar organisasi tersebut.

Tabel C.14.1 Rekapitulasi Transfer Keluar dan Transfer Masuk Aset Tetap pada Kementerian Pertanian

NO	INSTANSI YANG MELAKUKAN		AKUN	NILAI	DASAR BAST
	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK			
1	Kementerian Pertanian (BA.018)	Badan Karantina Indonesia (BA. 127)	Peralatan dan Mesin	1.528.837.508.587	4554/PL.310/A/12/2024 11579/PL.310/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024
2	Kementerian Pertanian (BA.018)	Badan Karantina Indonesia (BA. 127)	Peralatan dan Mesin	1.654.352.925.808	2524/PL.330/A/06/2025 5485/KP.0100/B.2/06/2025 5 Juni 2025
3	Kementerian Pertanian (BA.018)	Badan Karantina Indonesia (BA. 127)	Peralatan dan Mesin	1.212.359.136.888	1195/PL.330/A/03/2025 2134/PL.320/B/03/2025 5 Juni 2025
4	Ditjen PSP (018.08.633656.KP) Tahap 1	Ditjen LIP (018.13.691321.KP)	Peralatan dan Mesin	6.602.338.725	2513/PL.210/B.1/06/2025 Tanggal 26 Juni 2025
5	Ditjen PSP (018.08.633656.KP) Tahap II	Ditjen LIP (018.13.691321.KP)	Peralatan dan Mesin	2.993.424.624	B2820/PL.210/B.1/09/2025 Tanggal 24 September 2025
6	Setjen (Museum Tanah dan Pertanian 682601)	BPPSDMP (Museum Tanah dan Pertanian 691631)	Tanah	110.781.923.000	181/PL.220/A.10.1/05/2025 Tanggal 2 Juni 2025
			Peralatan dan Mesin	10.235.887.091	
			Gedung dan Bangunan	42.839.158.220	
			Aset Tetap Lainnya	247.361.172	
			Aset Tak Berwujud	121.910.000	
7	Setjen (Balai Perpustakaan dan Literasi Pertanian 418329)	BPPSDMP (Balai Perpustakaan dan Literasi Pertanian 691630)	Piutang	9.852.538	123/PL.100/1.26/06/2025 Tanggal 2 Juni 2025
			Tanah	120.601.049.000	
			Gedung dan Bangunan	67.225.341.206	
			Rumah Negara	1.174.187.000	
			Jalan	35.270.000	
			Alat Angkutan Bermotor	2.356.835.000	
			Alat Besar	216.738.000	
			Peralatan dan Mesin Non TIK	10.720.239.477	
			Peralatan Mesin Khusus TIK	3.731.987.891	
			Aset Tak Berwujud	361.300.000	
			Aset Tetap Lainnya	6.438.617.582	
			Kewajiban Jangka Pendek	80.329.720	

Perlu diinformasikan terdapat Aset Tetap yang dipinjamkaikan kepada pihak ketiga yaitu Aset Tetap Tanah berupa tanah basah lainnya (sawah) pada Ditjen TP yang dipinjamkaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dengan Berita Acara Pinjam Pakai Nomor B3020/PL.310/C.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2025. Aset Tetap Tanah tersebut berlokasi di Kabupaten Bekasi dengan luasan sebesar 236.915 m² dan bernilai Rp190.799.339.000.

Pinjam pakai aset ini tidak diperpanjang dan Aset Tetap Tanah berupa tanah basah lainnya (sawah) telah diambil alih oleh Ditjen Tanaman Pangan dan sedang direncanakan untuk digunakan pengembangan perbenihan.

C.14. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp69.798.086.740.797,00 dan Rp70.638.305.210.953,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp840.218.470.150,00 atau 1,19% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.2. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 1 Januari 2025	70.638.305.210.953
B	Mutasi Tambah	1.709.933.010.643
1	Saldo Awal	39.461.690.862
2	Pembelian	34.921.824.960
3	Transfer Masuk	72.633.425.000
4	Hibah Masuk	1.250.000.000
5	Pembatalan Penghapusan	4.965.534.000
6	Reklasifikasi Masuk	1.094.800.000
7	Likuidasi Masuk	1.538.509.788.928
8	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	43.110.147
9	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	12.616.594.746
10	Perubahan PI ke BMN	4.436.242.000
C	Mutasi Kurang	2.550.151.480.799
1	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	51.243.635.631
2	Penghapusan	4.965.534.000
3	Transfer Keluar	897.456.369.534
4	Hibah Keluar	11.172.264.000
5	Reklasifikasi Keluar	1.094.800.000
6	Koreksi Pencatatan	11.226.729.746
7	Likuidasi Keluar	1.538.509.788.928
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	29.516.824.960
9	Penghentian Aset Dari Penggunaan	4.965.534.000
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	69.798.086.740.797

Mutasi Tanah dengan nilai signifikan terdapat pada transaksi:

- Saldo awal sebesar Rp39.461.690.862,00 terdapat pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp Rp39.461.690.862,00 merupakan pencatatan BMN dengan tahun perolehan sebelum tahun 2025 berupa Tanah Non Persil dan Tanah Persil
- Transfer Masuk sebesar Rp72.633.425.000,00 terdapat pada :
 - ❖ Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp3.861.043.000,00 berupa Tanah Persil
 - Transfer masuk sebesar Rp3.861.043.000,00 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
 - ❖ Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp21.393.374.000,00 berupa Tanah Non Persil
 - Transfer masuk Rp21.393.374.000,00 pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbantan) Malang sebesar

- ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp47.379.008.000,00 berupa Tanah Persil
 - Transfer masuk sebesar Rp47.379.008.000,00 pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
- 3. Transfer Keluar senilai Rp897.456.369.534,00 terdapat pada :
 - ❖ Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp3.861.043.000,00 berupa Tanah Persil
 - Transfer keluar sebesar Rp3.861.043.000,00 dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp47.379.008.000,00 berupa Tanah Persil
 - Transfer keluar sebesar Rp47.379.008.000,00 dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat ke Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
 - ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp21.393.374.000,00 berupa Tanah Non Persil
 - Transfer keluar sebesar Rp21.393.374.000,00 dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbantan) Malang ke Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
 - ❖ Badan Karantina Pertanian sebesar Rp824.822.944.534,00 berupa Lapangan, Tanah Non Persil dan Tanah Persil
 - Transfer keluar Rp824.822.944.534,00 dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia

Rincian saldo Aset Tetap Tanah menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.3. Rincian Tanah Berdasarkan Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	5.955.940.529.000	6.187.323.501.000	(231.382.972.000)
2	Ditjen TP	1.257.696.492.936	1.259.764.248.577	(2.067.755.641)
3	Ditjen Horti	462.052.652.000	462.052.652.000	0
4	Ditjen Bun	1.717.766.037.101	1.725.245.586.101	(7.479.549.000)
5	Ditjen PKH	10.267.862.532.390	10.255.333.819.518	12.528.712.872
6	Ditjen PSP	138.000.571.000	138.000.571.000	0
7	BRMP	42.356.463.039.290	42.353.446.599.143	3.016.440.147
8	BPPSDMP	7.642.304.887.080	7.432.315.289.080	209.989.598.000
9	Barantan	0	824.822.944.534	(824.822.944.534)
Jumlah		69.798.086.740.797	70.638.305.210.953	(840.218.470.156)

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp69.798.086.740.797,00, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat 980 bidang tanah yang telah bersertifikat dengan nilai perolehan sebesar Rp40.669.148.077.191,00.

Tabel C.14.4. Rincian Tanah Bersertifikat

Kode E1	E1	Jumlah Satker	Bersertifikat	
			NUP	Nilai
1801	Setjen	2	24	524.137.286.000

Kode E1	E1	Jumlah Satker	Bersertifikat	
			NUP	Nilai
1803	Ditjen TP	5	55	803.244.290.328
1804	Ditjen Horti	1	3	307.675.861.000
1805	Ditjen Bun	26	448	617.837.580.308
1806	Ditjen PKH	20	63	4.024.561.540.590
1808	Ditjen PSP	1	1	138.000.571.000
1809	BRMP	78	291	27.180.732.506.618
1810	BPPSDMP	22	94	7.072.958.441.347
GRAND TOTAL		155	980	40.669.148.077.191

2. Terdapat 816 bidang tanah belum bersertifikat dengan nilai perolehan sebesar Rp4.944.695.232.666,00. Kementerian Pertanian melalui Biro KBMN menghimbau ke seluruh satker untuk segera menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penyertifikatan, dan juga memastikan batas serta patok. Jika tanah tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan, maka satker menelusuri riwayat tanah.

Tabel C.14.5. Rincian Tanah Belum Bersertifikat

Kode E1	E1	Jumlah	Belum Bersertifikat	
		Satker	NUP	Nilai
1801	Setjen	1	3	354.618.055.000
1803	Ditjen TP	4	8	156.945.539.608
1804	Ditjen Horti	1	1	154.376.791.000
1805	Ditjen Bun	26	761	858.703.440.793
1806	Ditjen PKH	6	21	3.076.367.672.700
1809	BRMP	14	17	291.145.666.072
1810	BPPSDMP	4	5	52.538.067.493
GRAND TOTAL		56	816	4.944.695.232.666

3. Terdapat 223 bidang tanah bersertifikat namun tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai perolehan sebesar Rp23.869.071.401.940,00. Adapun kriteria bersertifikat namun tidak sesuai ketentuan yaitu sertifikat yang belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga, contohnya sertifikat masih atas nama pihak yang melepaskan hak, sertifikat selain atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, maka Biro KBMN menghimbau kepada seluruh satker untuk mengalokasikan dana dan mengurus pembaruan sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga.

Tabel C.14.6 Rincian Tanah Bersertifikat Tidak sesuai Ketentuan

Kode E1	E1	Jumlah	Bersertifikat	
		Satker	Tidak Sesuai Ketentuan	
			NUP	Nilai
1801	Setjen	1	2	4.939.182.760.000
1803	Ditjen TP	2	11	297.506.663.000
1805	Ditjen Bun	21	145	166.278.519.000

Kode E1	E1	Jumlah	Bersertifikat	
		Satker	Tidak Sesuai Ketentuan	
			NUP	Nilai
1806	Ditjen PKH	7	7	3.166.933.319.100
1809	BRMP	18	52	14.782.361.762.600
1810	BPPSDMP	3	6	516.808.378.240
GRAND TOTAL		52	223	23.869.071.401.940

4. Terdapat 106 bidang tanah bersertifikat namun dikuasai dan/atau dicatat atas nama pihak ketiga dengan nilai perolehan sebesar Rp315.172.029.000,00. Langkah yang diambil Kementerian Pertanian yaitu melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai BMN, serta berkoordinasi dengan Biro Hukum dan APIP untuk langkah yang diambil.

Tabel C.14.7 Rincian Tanah Bersertifikat Dikuasai pihak Ketiga

Kode E1	E1	Jumlah	Bersertifikat	
		Satker	atas nama Pihak Ketiga	
			NUP	Nilai
1801	Setjen	1	1	138.002.428.000
1805	Ditjen Bun	12	103	74.946.497.000
1809	BRMP	2	2	102.223.104.000
GRAND TOTAL		15	106	315.172.029.000

5. BRMP Aneka Kacang terdapat koreksi luasan aset tanah untuk aset tanah NUP 11 dengan perolehan sebesar Rp308.754.222.000,00 berlokasi di Kec. Ngale Kab. Ngawi yang diukur ulang oleh BPN dikarenakan adanya pembangunan jalan toll pada BRMP Aneka Kacang. Saat ini masih belum jelas terkait proses penggantian dan penentuan lokasi aset tanah yang terkena dampak jalan toll tersebut.
6. BRMP Biogen terdapat aset tanah (NUP 5 dan NUP 9) yang terdampak pembangunan Jalan Tol DepokAntasari oleh Kementerian PU yang belum dapat diketahui sampai saat ini penggantian aset tanahnya dengan nilai perolehan masing-masing sebesar Rp127.081.982.150,00 dan Rp35.954.690.850,00. Lokasi saat ini sudah ditentukan oleh BRMP Biogen namun belum diperoleh penggantian pembelian oleh Kementerian PUPR. Aset tanah NUP 4 dengan harga perolehan sebesar Rp5.659.150.000,00 juga masih dalam proses pemecahan sertifikasi di BPN namun di Neraca aset tersebut luasannya telah berkurang karena sebagian aset tanah telah diminta oleh Kementerian Agama dalam Berita Acara Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 678/PL.330/A/03/2023 tanggal 1 Maret 2023. Koordinasi terakhir pada tanggal 16 April 2026, Pihak Yang Diberi Kuasa menjelaskan bahwa pada saat ini sedang dalam tahap penyusunan berkas sebelum diajukan secara resmi ke Kantor Pertanahan Kota Depok.

C.15. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesinmesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.400.260.235.357,00 dan Rp6.166.681.514.547,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp766.421.279.100,00 atau 12,43% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan dan Mesin 1 Januari 2025	6.166.681.514.547
B	Mutasi Tambah	440.613.912.588
1	Saldo Awal	445.484.400
2	Pembelian	192.104.410.824
3	Transfer Masuk	27.467.337.313
4	Hibah Masuk	21.330.350.300
5	Reklasifikasi Masuk	7.097.095.546
6	Perolehan Lainnya	6.116.465.916
7	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	8.272.862.685
8	Likuidasi Masuk	171.504.134.846
9	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.994.202.109
10	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	401.847.733
11	Koreksi Susulan	339.680.766
12	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3.540.040.150
C	Mutasi Kurang	1.207.035.191.778
1	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	3.442.638.777
2	Penghapusan	3.354.049.083
3	Transfer Keluar	841.648.572.614
4	Hibah Keluar	18.553.124.578
5	Reklasifikasi Keluar	6.575.731.546
6	Koreksi Pencatatan	14.024.194.585
7	Likuidasi Keluar	171.504.134.846
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	8.695.506.934
9	Transfer Keluar (Usul Hapus)	687.627.085
10	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	138.549.611.730
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	5.400.260.235.357

Mutasi Peralatan Mesin dengan nilai signifikan terdapat pada transaksi:

1. Pembelian sebesar Rp192.104.410.824,00 terdapat pada :
 - ❖ Sekretariat Jenderal sebesar Rp33.952.466.037,00 berupa Alat Bantu, Alat Kantor, Peralatan Komputer, Alat Studio, Alat Rumah Tangga, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Kedokteran, Alat Pengolahan, Alat Kerja Penerbangan, Alat

- Komunikasi, Peralatan Pemancar, Unit Alat Laboratorium, Alat Khusus Kepolisian, dan Komputer Unit;
- ❖ Inspektorat Jenderal sebesar Rp772.921.000,00 berupa Alat Kantor, Peralatan Komputer, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Kkomputer Unit;
 - ❖ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp5.191.512.294,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Pengolahan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, Unit Alat Laboratorium, Komputer Unit, dan Peralatan Komputer;
 - ❖ Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp430.493.856,00 berupa Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Kedokteran, Unit Komputer, dan Peralatan Komputer;
 - ❖ Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp845.944.562,00 berupa Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, Unit Alat Laboratorium, Unit Komputer, Peralatan Komputer, dan Alat SAR;
 - ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp97.110.705.452,00 berupa Alat Besar Darat, Alat Bantu, Alat Angkutan darat Bermotor, Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Ukur, Alat Pengolahan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Kesehatan Umum, Unit Alat Laboratorium, Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir, Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika, Alat Khusus Kepolisian, Unit Komputer, Peralatan Komputer, Oil and Gas Production Facilities, Alat Bantu Produksi, Alat Kerja Penerbangan, Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan, dan Peralatan Olah Raga;
 - ❖ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp1.710.172.501,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Rumah Tangga, Alat Komunikasi, Unit Komputer, dan Peralatan Komputer;
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp19.300.625.609,00 berupa Alat Bantu, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Ukur, Alat Pengolahan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, Peralatan Pemancar, Peralatan Komunikasi Navigasi, Alat Kedokteran, Alat Kesehatan Umum, Unit Alat Laboratorium, Alat Laboratorium Lingkungan Hidup, Peralatan Laboratorium Hidrodinamica, Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi, Alat Khusus Kepolisian, Unit Komputer, Peralatan Komputer, Alat Kerja Penerbangan, Unit Peralatan Proses/Produksi;
 - ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp28.255.800.660,00 berupa Alat Besar Darat, Alat Bantu, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan darat Tak Bermotor, Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Ukur, Alat Pengolahan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Kedokteran, Unit Alat Laboratorium, Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir, Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan, Alat Laboratorium Lingkungan Hidup, Peralatan Laboratorium Hidrodinamica, Alat Khusus Kepolisian, Unit Komputer, Peralatan Komputer, Alat SAR, Alat Kerja Penerbangan, Unit Peralatan Proses/Produksi, dan Peralatan Olah Raga;

- ❖ Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian sebesar Rp4.533.768.853,00 berupa Alat Pengolahan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, Unit Alat Laboratorium, Unit Komputer, dan Peralatan Komputer.
- 2. Transfer Masuk sebesar Rp27.467.337.313,00 terdapat pada :
 - ❖ Sekretariat Jenderal sebesar Rp8.069.271.625,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor dan Peralatan Komputer
 - Transfer masuk sebesar Rp5.664.000.000 dari satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ke Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
 - Transfer masuk sebesar Rp2.405.271.625 berupa kendaraan Roda 4 dengan rincian sebagai berikut:

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	468.000.000
Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	226.195.600
Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	364.500.000
Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	501.300.000
Sekretariat Utama	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	493.336.025
Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jawa Timur	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	351.940.000
Jumlah		2.405.271.625

- ❖ Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.091.995.600,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor
 - Transfer masuk sebesar Rp1.091.995.600 dari Satuan Kerja Sekretariat Jenderal ke Satuan Kerja Inspektorat Jenderal
- ❖ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp93.143.430,00 berupa Alat Kantor dan Komputer Unit
 - Transfer masuk sebesar Rp93.143.430 dari Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan & Hortikultura DKI Jakarta ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.065.908.779,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor dan Komputer Unit
 - Transfer masuk pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	136.000.000
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	219.800.000
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri	490.690.000
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas	195.000.000
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	24.418.779
Jumlah		1.065.908.779

- ❖ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 25.000.000,00 berupa Alat Komunikasi
 - Transfer masuk sebesar Rp25.000.000 dari Direktorat Jenderal Perkebunan ke Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
- ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp7.480.281.981,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Bantu, Alat Bengkel Bermesin, Alat Besar Darat, Alat Kantor, Alat Komunikasi, Alat Pengolahan, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Komputer Unit, Peralatan Komputer, Peralatan Pemancar dan Unit Peralatan Proses/Produksi
 - Transfer masuk pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	478.000.000
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	573.850.000
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	78.700.000
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	2.376.405.609
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	8.700.000
Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	478.000.000
Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	478.000.000
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	698.020.000
Direktorat Jenderal Perkebunan	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar	49.657.000
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar	817.980.000
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	22.088.625
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	20.771.000
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	28.900.000
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Di Yogyakarta	658.789.200
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	28.598.900
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	653.000.072
Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	30.821.575
Jumlah		7.480.281.981

- ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp1.355.577.345,00 berupa Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Kantor, Alat Komunikasi, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Komputer Unit dan Peralatan Komputer
 - Transfer masuk pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor	32.642.500
Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru, Kalsel	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa	424.550.000
Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (Ppmkp) Ciawi	Pusat Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian	898.384.845
Jumlah		1.355.577.345

- ❖ Badan Karantina Pertanian sebesar Rp4.069.750,00 berupa Alat Kantor
 - Transfer masuk sebesar Rp4.069.750 berasal dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nangroe Aceh Darussalam ke Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh
 - ❖ Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian sebesar Rp8.282.088.803 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Kantor, Alat Kedokteran, Alat Kerja Penerbangan, Alat Khusus Kepolisian, Alat Komunikasi, Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Ukur, Komputer Unit, Peralatan Komputer, Peralatan Pemancar, Persenjataan Non Senjata Api dan Unit Alat Laboratorium
 - Transfer masuk sebesar Rp8.282.088.803 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Transfer Keluar sebesar Rp841.648.572.614,00 terdapat pada :
- ❖ Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.281.932.480,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Komunikasi dan Komputer Unit
 - Transfer keluar pada Sekretariat Jenderal dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	1.091.995.600
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	107.600.000
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	Direktorat Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian	82.336.880
Jumlah		1.281.932.480

- ❖ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp93.143.430,00 berupa Alat Kantor dan Komputer Unit
 - Transfer keluar sebesar Rp93.143.430 dari satker Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan & Hortikultura DKI Jakarta ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- ❖ Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp74.657.000,00 merupakan transfer keluar dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkebunan Ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp25.000.000,00 berupa Telephone Mobile dan ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar sebesar Rp49.657.000,00 berupa Tangki air, Jet Pump, Hand Spray dan Gerobak
 - Transfer keluar sebesar Rp25.000.000,00 dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan sebesar Rp49.657.000,00 ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

- ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.065.908.779,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor dan Komputer Unit
 - Transfer keluar pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	136.000.000
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	219.800.000
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri	490.690.000
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas	195.000.000
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	24.418.779
Jumlah		1.065.908.779

- ❖ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp19.588.165.323,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Bantu, Alat Kantor, Alat Kedokteran, Alat Kerja Penerbangan, Alat Khusus Kepolisian, Alat Komunikasi, Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektrika, Alat Pengolahan, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Ukur, Komputer Unit, Peralatan Komputer, Peralatan Pemancar, Persenjataan Non Senjata Api dan Unit Alat Laboratorium
 - Transfer keluar pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	Markas Besar Tni Ad	5.134.254.300
Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	Markas Besar Tni Al	590.159.100
Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	Pusadatin	5.664.000.000
Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	Direktorat Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian	8.199.751.923
Jumlah		19.588.165.323

- ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp7.355.667.481,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Bantu, Alat Bengkel Bermesin, Alat Besar Darat, Alat Kantor, Alat Komunikasi, Alat Pengolahan, Alat Rumah Tangga, Alat Studi, Komputer Unit, Peralatan Komputer, Peralatan Pemancar dan Unit Peralatan Proses/Produksi
 - Transfer keluar pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	478.000.000
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	22.088.625
Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor	32.642.500
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	478.000.000

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	698.020.000
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar	817.980.000
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	20.771.000
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	28.598.900
Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	478.000.000
Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	30.821.575
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	573.850.000
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	653.000.072
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	8.700.000
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	2.376.405.609
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Di Yogyakarta	658.789.200
Jumlah		7.355.667.481

- ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian berupa Rp1.322.934.845,00 berupa Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Kantor, Alat Komunikasi, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Komputer Unit dan Peralatan Komputer
 - Transfer keluar pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru, Kalsel	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa	424.550.000
Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (Ppmkp) Ciawi	Pusat Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian	898.384.845
Jumlah		1.322.934.845

- ❖ Badan Karantina Pertanian sebesar Rp810.866.163.276,00 ditransfer keluar ke Baran Karantina Indonesia & Sekretariat Jenderal berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Bantu, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Besar Darat, Alat Eksplorasi Geofisika, Alat Eksplorasi Topograsi, Alat Kantor, Alat Kedokteran, Alat Kerja Penerbangan, Alat Kesehatan Umum, Alat Khusus Kepolisian, Alat Komunikasi, Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika, Alat Laboratorium Lingkungan Hidup, Alat Laboratorium Stnadarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi, Alat Pelindung, Alat Pengolahan, Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan, Alat Rumah Tangga, Alat Sar, Alat Studio, Alat Ukur, Komputer Unit, Peralatan Komputer, Peralatan Komunikasi Navigasi, Peralatan Laboratorium Hydrodinamica, Peralatan Olah Raga, Peralatan Pemancar, Radiation Application

dan Non Destructive Testing, Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat, Rambu Rambu Lalu Lintas Udara, Sumur, Unit Alat Laboratorium, Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir, Unit Peralatan Proses/Produksi

- Transaksi keluar sebesar Rp810.866.163.276 dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia dan Sekretariat Jenderal

Rincian saldo Aset Tetap Peralatan Mesin menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.2 Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	506.198.824.784	524.434.033.996	(18.235.209.212)
2	Itjen	38.484.495.118	37.167.182.317	1.317.312.801
3	Ditjen TP	412.391.792.380	424.388.905.282	(11.997.112.902)
4	Ditjen Horti	92.046.705.747	94.296.555.296	(2.249.849.549)
5	Ditjen Bun	470.984.537.270	475.609.565.632	(4.625.028.362)
6	Ditjen PKH	1.458.766.720.180	1.393.584.208.543	65.182.511.637
7	Ditjen PSP	179.929.863.062	202.498.931.350	(22.569.068.288)
8	BRMP	1.499.100.854.633	1.509.576.255.161	(10.475.400.528)
9	BPPSDMP	729.348.812.027	694.504.035.109	34.844.776.918
10	Barantan	0	810.621.841.861	(810.621.841.861)
11	Ditjen LIP	13.007.630.156	0	13.007.630.156
Jumlah		5.400.260.235.357	6.166.681.514.547	(766.421.279.190)

C.16. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.025.454.140.262,00 dan Rp6.651.935.669.462,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp626.481.529.200,00 atau 9,42% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung dan Bangunan 1 Januari 2025	6.651.935.669.462
B	Mutasi Tambah	604.034.501.195
1	Saldo Awal	4.596.509.734
2	Pembelian	3.996.282.948
3	Transfer Masuk	7.479.949.459
4	Hibah Masuk	36.907.207.040
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	53.973.308.220
6	Reklasifikasi Masuk	10.655.437.005
7	Perolehan Lainnya	1.725.638.350

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.298.449.900
9	Likuidasi Masuk	355.676.686.770
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	7.108.502.237
11	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	13.537.968.214
12	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	26.386.700
13	Pengembangan Melalui KDP	14.517.347.757
14	Koreksi Susulan	847.102.505
15	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	91.484.994.356
16	Perubahan PI ke BMN	202.730.000
C	Mutasi Kurang	1.230.516.030.395
1	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	5.416.860.505
2	Transfer Keluar	825.118.413.631
3	Hibah Keluar	12.523.206.000
4	Reklasifikasi Keluar	11.141.947.855
5	Koreksi Pencatatan	11.569.246.884
6	Likuidasi Keluar	355.676.686.770
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	8.755.171.750
8	Perubahan BMN Ke PI	314.497.000
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	6.025.454.140.262

Mutasi Gedung dan Bangunan dengan nilai signifikan terdapat pada transaksi:

- Transfer Masuk sebesar Rp7.479.949.459,00 terdapat pada :
 - ❖ Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp103.981.000,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja
 - Transfer masuk sebesar Rp103.981.000,00 dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp4.389.020.459,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tugu/Tanda Batas
 - Transfer masuk pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	399.206.000
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	3.877.814.459
Direktorat Jenderal Perkebunan	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar	112.000.000
Jumlah		4.389.020.459

- ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp2.986.948.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
 - Transfer masuk sebesar Rp2.986.948.000,00 dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (PPMKP) Ciawi ke Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian

2. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp91.484.994.356,00 terdapat pada :
 - ❖ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp15.988.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
 - ❖ Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp4.883.559.269,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
 - ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.933.746.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan Tugu/Tanda Batas.
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp632.005.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
 - ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp84.019.696.087,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan Tugu/Tanda Batas.
3. Transfer Keluar sebesar Rp825.189.977.631,00 terdapat pada :
 - ❖ Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp5.970.106.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja
 - Transfer keluar pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	Direktorat Jenderal Sains Dan Teknologi	5.754.125.000
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	Direktorat Jenderal Perkebunan	103.981.000
Direktorat Jenderal Perkebunan	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar	112.000.000
Jumlah		5.970.106.000

- ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp4.277.020.459,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tugu/Tanda Batas.
 - Transfer masuk pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	399.206.000
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	3.877.814.459
Jumlah		4.277.020.459

- ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp2.986.948.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
 - Transfer keluar sebesar Rp2.986.948.000,00 dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (PPMKP) Ciawi ke Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian

- ❖ Badan Karantina Pertanian sebesar Rp811.955.903.172,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan Tugu/Tanda Batas
 - Transfer keluar sebesar Rp811.955.903.172,00 dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia

Rincian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.2 Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	773.511.435.313	879.295.514.659	(105.784.079.346)
2	Ditjen TP	200.421.765.345	199.223.907.345	1.197.858.000
3	Ditjen Horti	115.056.083.195	122.100.621.945	(7.044.538.750)
4	Ditjen Bun	426.307.708.818	434.583.662.549	(8.275.953.731)
5	Ditjen PKH	1.042.857.089.970	1.015.217.057.765	27.640.032.205
6	Ditjen PSP	9.600.461.068	9.600.461.068	0
7	BRMP	2.038.879.139.048	2.038.612.694.811	266.444.237
8	BPPSDMP	1.418.820.457.505	1.141.417.410.148	277.403.047.357
9	Barantan	0	811.884.339.172	(811.884.339.172)
Jumlah		6.025.454.140.262	6.651.935.669.462	(626.481.529.200)

C.17. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp682.135.640.758,00 dan Rp744.888.902.341,00. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.753.261.583,00 atau 8,42% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan, Irigasi, Jaringan 1 Januari 2025	744.888.902.341
B	Mutasi Tambah	23.747.126.429
1	Saldo Awal	11.660.000
2	Pembelian	1.260.741.435
3	Transfer Masuk	1.012.914.386
4	Hibah Masuk	22.885.000
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.630.182.183
6	Perolehan Lainnya	326.671.087
7	Penyelesaian Pembangunan Langsung	609.745.000
8	Likuidasi Masuk	8.588.312.610
9	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.227.649.700

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
10	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	3.058.462.607
11	Pengembangan Melalui KDP	2.742.527.620
12	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	255.374.801
C	Mutasi Kurang	86.500.388.012
1	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	133.326.730
2	Penghapusan	81.449.500
3	Transfer Keluar	71.939.668.064
4	Hibah Keluar	159.778.000
5	Reklasifikasi Keluar	131.440.000
6	Koreksi Pencatatan	2.163.330.607
7	Likuidasi Keluar	8.588.312.610
8	Penghentian Aset Dari Penggunaan	3.303.082.501
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	682.135.640.758

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai signifikan terdapat pada transaksi:

- Transfer Masuk sebesar Rp1.012.914.386,00 terdapat pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp1.012.914.386,00 berupa Bangunan Air Bersih/Air Baku, Bangunan Air Irigasi, Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dan Instalasi Gardu Listrik

- Transfer masuk pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	546.305.500
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	466.608.886
Jumlah		1.012.914.386

- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp4.630.182.183,00 terdapat pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian merupakan Penyelesaian Pembangunan dengan KDP atas BMN berupa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, Instalasi Air Bersih / Air Baku dan Jalan;
- Transfer Keluar sebesar Rp71.939.668.064,00 terdapat pada :

- ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp1.012.914.386,00 berupa Instalasi gardu Listrik, Bangunan Air Irigasi, Bangunan Pengembangan sumber Air dan Air Tanah dan Bangunan Air Bersih / Air Baku

- Transfer keluar pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Satker Pemberi	Satker Penerima	Nilai
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	546.305.500
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	466.608.886
Jumlah		1.012.914.386

- ❖ Badan Karantina Pertanian sebesar Rp70.926.753.678,00 berupa Bangunan Air Bersih/air Baku, Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Kotor, Bangunan Psang Surut, Bangunan Pengaman Sungai, Bangunan Rawa&Foder, Instalansi Air

Bersih/Air Baku,Instalansi Air Kotor,Instalansi Gardu Listrik, Instalansi Gas, Instalansi Lainnya,Instalansi Pembangkit Listrik,Instalansi Pengaman, Instalansi Pengelolah Sampah,Instalansi Pertanahan,Jalan,Jaringan Air Minum,Jaringan Gas,Jaringan Listrik,Jaringan telepon dan Jembatan.

- Transfer keluar sebesar Rp70.926.753.678,00 dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia

Rincian saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.2 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	22.783.059.013	22.535.033.013	248.026.000
2	Itjen	164.500.000	164.500.000	0
3	Ditjen TP	8.598.811.162	7.900.731.162	698.080.000
4	Ditjen Horti	3.986.435.850	5.509.746.350	(1.523.310.500)
5	Ditjen Bun	16.285.568.165	17.053.782.666	(768.214.501)
6	Ditjen PKH	208.737.575.437	206.360.728.254	2.376.847.183
7	Ditjen PSP	71.454.000	71.454.000	0
8	BRMP	323.181.401.656	323.357.846.799	(176.445.143)
9	BPPSDMP	98.326.835.475	91.008.326.419	7.318.509.056
10	Barantan	0	70.926.753.678	(70.926.753.678)
Jumlah		682.135.640.758	744.888.902.341	(62.753.261.583)

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp65.264.761.207,00 dan Rp65.822.305.906,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp557.544.699,00 atau 0,85% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 1 Januari 2025	65.822.305.906
B	Mutasi Tambah	15.898.026.931
1	Saldo Awal	6.500.000
2	Pembelian	1.337.960.172
3	Transfer Masuk	68.063.800
4	Reklasifikasi Masuk	121.320.050
5	Perolehan Lainnya	147.574.500
6	Likuidasi Masuk	14.174.099.126
7	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	37.329.283
8	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	5.180.000

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
C	Mutasi Kurang	16.455.571.630
1	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	70.200.150
2	Penghapusan	290.880.663
3	Transfer Keluar	495.066.270
4	Reklasifikasi Keluar	33.983.200
5	Koreksi Pencatatan	427.373.300
6	Likuidasi Keluar	14.174.099.126
7	Penghentian Aset Dari Penggunaan	963.968.921
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	65.264.761.207

Mutasi Aset Tetap Lainnya dengan nilai signifikan terdapat pada transaksi:

- Transfer Masuk senilai Rp68.063.800,00 terdapat pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian berupa Tanaman
 - Transfer masuk sebesar Rp68.063.800,00 dari Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian ke Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
- Transfer Keluar sebesar Rp495.066.270,00 terdapat pada :
 - ❖ Sekretariat Jenderal sebesar Rp173.961.200,00 berupa Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi, Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi
 - Transfer keluar sebesar Rp173.961.200,00 dari Pusat Data dan Informasi Pertanian ke Satuan Kerja Sekretariat Jenderal
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp68.063.800 berupa Tanaman
 - Transfer keluar sebesar Rp68.063.800,00 dari Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian ke Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
 - ❖ Badan Karantina Pertanian sebesar Rp253.041.270,00 berupa Bahan Perpustakaan Tercetak, Barang Bercorak Kesenian dan Kartografi, Naskah dan Lukisan
 - Transfer keluar sebesar Rp253.041.270,00 dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp963.968.921,00 terdapat pada :
 - ❖ Sekretariat Jenderal sebesar Rp792.963,00 berupa Kartografi, Naskah dan Lukisan;
 - ❖ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp156.716.500,00 berupa Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi;
 - ❖ Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp9.541.850,00 berupa Bahan Perpustakaan Tercetak;
 - ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Bahan Perpustakaan Tercetak, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro dan Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga;
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp394.206.500,00 berupa Bahan Perpustakaan Tercetak, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro dan Kartografi, Naskah dan Lukisan;

- ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp394.599.608,00 berupa Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro, Barang Bercorak Kesenian, Kartografi, Naskah dan Lukisan, Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.2 Rincian Aset Tetap Lainnya berdasarkan Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	1.298.240.594	7.985.012.311	(6.686.771.717)
2	Itjen	54.856.120	54.856.120	0
3	Ditjen TP	2.387.979.575	2.544.696.075	(156.716.500)
4	Ditjen Horti	5.650.000	15.191.850	(9.541.850)
5	Ditjen Bun	9.222.546.672	9.499.546.212	(276.999.540)
6	Ditjen PKH	11.556.951.802	11.565.063.302	(8.111.500)
7	Ditjen PSP	335.688.000	335.688.000	0
8	BRMP	11.458.381.751	11.346.628.479	111.753.272
9	BPPSDMP	28.944.466.693	22.222.582.287	6.721.884.406
10	Barantan	0	253.041.270	(253.041.270)
Jumlah		65.264.761.207	65.822.305.906	(557.544.699)

Pada Aset Tetap Lainnya terdapat Barang Bersejarah yang bernilai nihil dan tersaji pada Laporan Barang Pengguna Barang Bersejarah tercatat pada Eselon I:

1. BRMP mencatat 1 Unit barang bersejarah berupa Gedung Bangunan (Candi/Tugu Peringatan/Prasasti).
2. BPPSDMP mencatat 2 Unit barang bersejarah berupa Gedung Bangunan (Candi/ Tugu Peringatan/Prasasti) dan mencatat 1.682 Unit barang bersejarah berupa Aset Tetap Lainnya (Bahan Perpustakaan Tercetak terbitan sebelum tahun 1900).

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp144.438.352.432,00 dan Rp22.005.998.264,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp122.432.354.168,00 atau 556,36% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 1 Januari 2025	22.005.998.264
B	Mutasi Tambah	229.110.720.164
1	Saldo Awal KDP	47.600.000
2	Perolehan/Penambahan KDP	23.984.030.892
3	Pengembangan KDP	179.948.162.308
4	Koreksi Nilai KDP Bertambah	23.915.127.179
5	Perolehan Lainnya KDP	544.217.469
6	Reklasifikasi Masuk KDP	671.582.316
C	Mutasi Kurang	106.678.365.996
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	58.623.268.403
2	Pengembangan Melalui KDP	17.259.875.377
3	Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	2.081.146.632
4	Transfer Keluar KDP	926.886.265
5	Reklasifikasi Keluar KDP	671.582.316
6	Koreksi Pencatatan KDP	23.103.395.491
7	Koreksi Nilai KDP Berkurang	4.012.211.512
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	144.438.352.432

Mutasi KDP dengan nilai signifikan terdapat pada transaksi:

- Perolehan/Penambahan KDP sebesar 23.984.030.892,00 terdapat pada :
 - ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp11.503.142.799,00 yang merupakan perolehan/penambahan konstruksi dalam pengerjaan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, Irigasi Dalam Pengerjaan dan Jalan Dalam Pengerjaan;
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp59.939.100,00 yang merupakan perolehan/penambahan konstruksi dalam pengerjaan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp12.420.948.993,00 yang merupakan perolehan/penambahan konstruksi dalam pengerjaan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, Irigasi Dalam Pengerjaan, Jalan Dalam Pengerjaan dan Jaringan Dalam Pengerjaan.
- Pengembangan KDP sebesar Rp179.948.162.308,00 terdapat pada :
 - ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp144.941.845.844,00 yang merupakan pengembangan konstruksi dalam pengerjaan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, Irigasi Dalam Pengerjaan dan Jalan Dalam Pengerjaan;
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp139.857.900,00 yang merupakan pengembangan konstruksi dalam pengerjaan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp34.866.458.564,00 yang merupakan pengembangan konstruksi dalam

pengerjaan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, Irigasi Dalam Pengerjaan, Jalan Dalam Pengerjaan dan Jaringan Dalam Pengerjaan.

3. Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp23.103.395.491,00 terdapat pada :
 - ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp20.119.377.363,00 merupakan koreksi pencatatan KDP berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dan Jalan Dalam Pengerjaan;
 - ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp2.984.018.128,00 merupakan koreksi pencatatan KDP berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, Jalan Dalam Pengerjaan dan Jaringan Dalam Pengerjaan.

Rincian saldo KDP per 31 Desember 2025 menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada **Lampiran C.19 dan C19.1**.

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.782.998.595.762,00 dan Rp7.227.166.439.667,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp444.167.843.905,00 atau 6,15% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.739.142.500.228	5.263.952.198.997	(524.809.698.769)
2	Gedung dan Bangunan	1.674.087.998.049	1.588.388.495.909	85.699.502.140
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	364.937.620.748	370.483.883.211	(5.546.262.463)
4	Aset Tetap Lainnya	4.830.476.737	4.341.861.550	488.615.187
Jumlah		6.782.998.595.762	7.227.166.439.667	(444.167.843.905)

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.21. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp16.291.624.283,00 dan Rp20.616.099.283,00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami penurunan sebesar Rp4.324.475.000,00 atau 20,89% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024.

Rincian saldo Properti Investasi menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ditjen Horti	2.153.825.283	2.153.825.283	0
2	BRMP	14.137.799.000	18.259.544.000	(4.121.745.000)
3	BPPSDMP	0	202.730.000	(202.730.000)
	Jumlah	16.291.624.283	20.616.099.283	(4.324.475.000)

1. Properti Investasi pada Ditjen Horti

Saldo Aset Properti Investasi pada Ditjen Horti per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp2.153.825.283,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 313.53 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp2.153.825.283,00 berlokasi di Jakarta Selatan. Bangunan tersebut disewakan kepada pihak ketiga dengan jangka waktu sewa mulai Maret 2023 sampai dengan Maret 2026.

2. Properti Investasi pada BRMP

Saldo Aset Properti Investasi pada BRMP per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp14.137.799.000,00 dapat dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel C.21.2 Aset Properti Investasi pada Eselon I BRMP per 31 Desember 2025

No	Satker	Nama Aset	Peruntukan	Sesuai Pencatatan		Pemanfaatan Oleh Pihak Lain		
				Vol. (m2)	Nilai Perolehan	Volume	Jenis Pemanfaatan	% Pemanfaatan
1	BPSIT Serealisa	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Lahan Pertanian Oleh Koperasi	10.000	1.584.000.000	10.000	Sewa	100
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	99	196.838.000	99	Sewa	100
2	BPSI TRI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	235	621.509.000	235	Sewa	100
3	BBPSI Veteriner	Tanah Persil Lainnya	Pekarangan Rumah	5.348	9.413.303.000	5.348	Sewa	100
4	BPSIT Jestro	Mess/Wisma/Bungalow/	Sewa Koperasi (Penginapan)	417	1.043.631.000	417	Sewa	100
5	BBPSI Padi	Tanah Sawah Irigasi	Sewa (Gudang RMU) Sukamandi	192	392.668.000	192	Sewa	100
6	BPSIT Pemanis	Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	175	453.245.000	175	Sewa	100
7	BPSIP Yogyakarta	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	140	118.108.000	140	Sewa	100
8	BPSIP Jawa Timur	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	150	314.497.000	150	Sewa	100
	Jumlah			16.756	14.137.799.000	16.756		100

3. Properti Investasi pada BPPSDMP

Saldo Aset Properti Investasi pada BPPSDMP per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp202.730.000,00 berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen.

Bangunan tersebut tidak dilaksanakan kembali untuk perpanjangan sewa dan telah dilaksanakan perubahan pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI, berupa Reklasifikasi dari properti Investasi kembali ke Barang Milik Negara.

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL330/A4/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.22. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.266.520.754,00 dan Rp1.210.822.830,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp55.697.924,00 atau 4,60% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ditjen Horti	502.841.016	452.041.500	50.799.516
2	BSIP	763.679.738	606.733.830	156.945.908
3	BPPSDMP	0	152.047.500	(152.047.500)
	Jumlah	1.266.520.754	1.210.822.830	55.697.924

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.129.199.784,00 dan Rp12.175.322.811,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.046.123.027,00 atau 57,87% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.23 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	4.312.662.979	5.919.522.531	(1.606.859.552)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	(1.876.635.726)	(3.642.577.725)	1.765.941.999
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	13.400.531.398	17.698.195.995	(4.297.664.597)
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	(10.707.358.867)	(7.799.817.990)	(2.907.540.877)
	Jumlah	5.129.199.784	12.175.322.811	(7.046.123.027)

C.23. Piutang Tagihan TP/TGR

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.312.662.979,00 dan Rp5.919.522.531,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.606.859.552,00 atau 27,15% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Piutang Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Ditjen TP	2.076.167.350	4.001.956.160	(1.925.788.810)
Ditjen Bun	534.631.221	185.329.714	349.301.507
Ditjen PSP	67.779.250	890.081.000	(822.301.750)
BRMP	720.133.408	842.155.657	(122.022.249)
BPPSDMP	38.650.000	0	38.650.000
Ditjen LIP	875.301.750	0	875.301.750
Total	4.312.662.979	5.919.522.531	(1.606.859.552)

Secara signifikan penurunan nilai piutang jangka panjang dikarenakan adanya reklasifikasi ke piutang jangka panjang lainnya dan adanya pembayaran atas piutang tersebut. Untuk Eselon I BPPSDMP kenaikan merupakan pencatatan piutang berdasarkan LHP BPK Nomor 17b/LHP/XVII/05/2025. Untuk Eselon I Ditjen LIP merupakan transaksi transfer dari Ditjen PSP. Detail rincian Piutang TP/TGR untuk masing-masing nama debitur per Eselon I disajikan pada **Lampiran C.23**.

C.24. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.876.635.726,00 dan Rp3.642.577.725,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.765.941.999,00 atau 48,48% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.24.1 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Ditjen TP	1.834.231.605	3.372.806.129	(1.538.574.524)
Ditjen Bun	6.265.934	157.035.298	(150.769.364)
Ditjen PSP	6.777.925	8.609.434	(1.831.509)
BRMP	24.983.753	104.126.864	(79.143.111)
Ditjen LIP	4.376.509	0	4.376.509
Jumlah	1.876.635.726	3.642.577.725	(1.765.941.999)

Secara signifikan kenaikan atau penurunan nilai penyisihan piutang dikarenakan adanya perubahan kualitas dari Piutang. Detail rincian Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR untuk masing-masing nama debitur per Eselon I disajikan pada **Lampiran C.24**.

C.25. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13.400.531.398,00 dan Rp17.698.195.995,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.297.664.597,00 atau 24,28% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.25.1 Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ditjen TP	7.009.199.801	6.344.044.599	665.155.202
2	Ditjen Bun	3.187.945.734	8.078.161.495	(4.890.215.761)
3	BRMP	3.203.385.863	3.275.989.901	(72.604.038)
	Jumlah	13.400.531.398	17.698.195.995	(4.297.664.597)

Secara signifikan kenaikan nilai piutang jangka panjang lainnya dikarenakan adanya reklasifikasi dari piutang jangka panjang dan penurunan karena adanya pembayaran atas piutang tersebut. Detail rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya untuk masing-masing nama debitur per Eselon I disajikan pada **Lampiran C.25**.

C.26. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.707.358.867,00 dan Rp7.799.817.990,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.907.540.877,00 atau 37,28% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

Tabel C.26.1 Saldo Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ditjen TP	6.353.336.530	5.400.603.279	952.733.251
2	Ditjen Bun	2.068.720.754	40.423.370	2.028.297.384
3	BRMP	2.285.301.583	2.358.791.341	(73.489.758)
	Jumlah	10.707.358.867	7.799.817.990	2.907.540.877

Secara signifikan kenaikan atau penurunan nilai penyisihan piutang dikarenakan adanya perubahan kualitas dari Piutang. Detail rincian Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya untuk masing-masing nama debitur per Eselon I disajikan pada **Lampiran C.26**.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.865.448.549.978,00 dan Rp1.227.460.640.106,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.637.991.418.872,00 atau 459,32% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	138.718.675.259	130.810.261.648	7.908.413.611
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	6.522.750.952.581	409.728.652.688	6.113.022.299.893
3	Aset Lain-Lain	637.327.963.396	1.191.863.907.620	(554.535.944.224)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(433.349.041.258)	(504.942.181.850)	71.593.140.592
Jumlah		6.865.448.549.978	1.227.460.640.106	5.637.987.909.872

C.27. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp138.718.675.259,00 dan Rp130.810.261.648,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.657.652.956,00 atau 5,85% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	130.810.261.648
1	Saldo Awal	7.100.946.155
B	Mutasi Tambah	9.082.832.478
1	Pembelian	5.429.318.733
2	Transfer Masuk	1.500.651.595
3	Hibah Masuk	45.448.000
4	Reklasifikasi Masuk	24.733.200
5	Perolehan Lainnya	1.173.972.500
6	Likuidasi Masuk	755.018.950
7	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	147.574.500
8	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif 51	6.115.000
C	Mutasi Kurang	8.275.365.022
1	Penghapusan	15.000.000
2	Transfer Keluar	2.606.050.335
3	Reklasifikasi Keluar	24.733.200
4	Koreksi Pencatatan	1.297.036.133

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Likuidasi Keluar	755.018.950
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	3.577.526.404
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	138.718.675.259

Mutasi Aset Tak Berwujud dengan nilai signifikan terdapat pada transaksi:

- Pembelian senilai Rp5.429.318.733,00 terdapat pada :
 - ❖ Sekretariat Jenderal senilai Rp668.406.633,00 berupa Lisensi dan Software Komputer;
 - ❖ Inspektorat Jenderal senilai Rp4.753.364.100,00 berupa Software;
 - ❖ Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp7.548.000,00 berupa Software.
- Transfer Masuk senilai Rp1.500.651.595,00 terdapat pada :
 - ❖ Sekretariat Jenderal sebesar Rp147.751.595,00 berupa Software
 - Transfer masuk sebesar Rp147.751.595,00 dari Satuan Kerja Inspektorat Jenderal ke Satuan Kerja Sekretariat Jenderal
 - ❖ Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian sebesar Rp1.352.900.000,00 berupa Software
 - Transfer masuk sebesar Rp1.352.900.000,00 dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
- Transfer Keluar senilai Rp2.606.050.335,00 terdapat pada :
 - ❖ Inspektorat Jenderal senilai Rp4.753.364.100,00 berupa Software
 - Transfer keluar sebesar Rp147.751.595,00 dari Satuan Kerja Inspektorat Jenderal ke Satuan Kerja Sekretariat Jenderal
 - ❖ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp1.352.900.000,00 berupa Software
 - Transfer keluar sebesar Rp1.352.900.000,00 dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
 - ❖ Badan Karantina Pertanian Rp1.105.398.740,00 berupa Software
 - Transfer keluar sebesar Rp1.105.398.740,00 dari Badan karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia
- Penghentiaan Aset dari Penggunaan senilai Rp3.577.526.404,00 terdapat pada :
 - ❖ Sekretariat Jenderal sebesar Rp374.576.919,00 berupa Software.
 - ❖ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp12.802.199,00 berupa Software.
 - ❖ Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.984.282.500,00 berupa Software.
 - ❖ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp86.207.895,00 berupa Software.
 - ❖ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebesar Rp513.506.891,00 berupa Software, Hak Paten Sederhana, Aset Tak Berwujud Lainnya.
 - ❖ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp606.150.000,00 berupa Software.

Rincian saldo Aset Tak Berwujud menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hak Cipta	BRMP	28.025.000	28.025.000	0
	Jumlah		28.025.000	28.025.000	0
2	Paten	BRMP	498.747.250	512.872.250	(14.125.000)
	Jumlah		498.747.250	512.872.250	(14.125.000)
3	Software	Setjen	11.074.681.280	10.572.130.949	502.550.331
		Itjen	6.420.011.419	2.053.048.914	4.366.962.505
		Ditjen TP	618.854.580	631.656.779	(12.802.199)
		Ditjen Horti	2.368.857.625	4.353.140.125	(1.984.282.500)
		Ditjen Bun	1.340.237.045	1.332.689.045	7.548.000
		Ditjen PKH	12.029.045.175	5.494.943.070	6.534.102.105
		Ditjen PSP	3.280.058.955	4.494.158.955	(1.214.100.000)
		BRMP	3.761.147.826	4.212.716.717	(451.568.891)
		BPPSDMP	922.334.000	1.060.274.000	(137.940.000)
		Ditjen LIP	1.352.900.000	0	1.352.900.000
		Barantan	0	1.105.398.740	(1.105.398.740)
	Jumlah		43.168.127.905	35.310.157.294	7.857.970.611
4	Lisensi	Setjen	7.899.179.740	7.832.246.740	66.933.000
	Jumlah		7.899.179.740	7.832.246.740	66.933.000
5	Hasil Kajian/Penelitian	Ditjen Bun	249.645.000	249.645.000	0
		BRMP	24.710.591.864	24.710.591.864	0
	Jumlah		24.960.236.864	24.960.236.864	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	Setjen	2.676.028.250	2.676.028.250	0
		Ditjen TP	398.202.500	398.202.500	0
		Ditjen Bun	182.565.000	182.565.000	0
		Ditjen PKH	143.265.000	143.265.000	0
		Ditjen PSP	57.940.863.750	57.940.863.750	0
		BRMP	473.634.000	475.999.000	(2.365.000)
		BPPSDMP	349.800.000	349.800.000	0
	Jumlah		62.164.358.500	62.166.723.500	(2.365.000)
Jumlah			138.718.675.259	130.810.261.648	7.908.413.611

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.27 dan C.27.1**.

C.28. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.522.750.952.581,00 dan Rp409.728.652.688,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.113.022.299.893,00 atau 1.491,97% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.28.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	6.514.410.262	3.036.103.761	3.478.306.501
2	Ditjen TP	277.865.963.135	310.609.498.491	(32.743.535.356)
3	Ditjen Horti	24.681.748.531	771.806.733	23.909.941.798
4	Ditjen Bun	932.776.335.029	39.505.170.900	893.271.164.129
5	Ditjen PKH	75.169.403.196	38.514.828.479	36.654.574.717
6	Ditjen PSP	1.722.903.545.292	8.658.262.566	1.714.245.282.726
7	BRMP	20.732.378.649	7.480.811.324	13.251.567.325
8	BPPSDMP	9.798.226.942	1.152.170.434	8.646.056.508
9	Ditjen LIP	3.452.308.941.545	0	3.452.308.941.545
Jumlah		6.522.750.952.581	409.728.652.688	6.113.022.299.893

**Tabel C.28.2 Monitoring Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
per 31 Desember 2025**

Eselon I	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi SP2D Non RPATA	Pembayaran Melalui RPATA	Penihilan Nilai RPATA
Setjen	38	6.514.410.262	0	6.514.410.262	0
Ditjen TP	166	277.865.963.135	0	277.026.187.450	839.775.685
Ditjen Horti	25	24.681.748.531	0	23.237.817.128	1.443.931.403
Ditjen Bun	542	944.470.941.407	11.694.606.378	941.533.965.392	2.936.976.015
Ditjen PKH	151	89.848.340.593	14.678.937.397	87.706.750.303	2.141.590.290
Ditjen PSP	314	1.722.903.545.292	0	1.712.974.125.629	9.929.419.663
BRMP	71	21.597.583.399	865.204.750	17.408.020.497	4.189.562.902
BPPSDMP	29	9.873.626.942	75.400.000	9.873.626.942	0
Ditjen LIP	423	3.453.106.851.545	797.910.000	776.079.352.657	2.677.027.498.888
Jumlah	1.445	6.550.863.011.106	28.112.058.525	3.852.354.256.260	2.698.508.754.846

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2023, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2023 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

C.29. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp637.327.963.396,00 dan Rp1.191.863.907.620,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp554.535.944.224,00 atau 46,53% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024.

Tabel C.29.1 Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Klasifikasi		Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	Ditjen Bun	74.603.614.934	82.254.675.680	(7.651.060.746)
			BRMP	58.208.315.000	58.208.315.000	0
			Barantin	0	323.090.400.000	(323.090.400.000)
		Peralatan & Mesin	Setjen	14.238.824.769	12.811.841.664	1.426.983.105
			Itjen	0	1.262.208.737	(1.262.208.737)
			Ditjen TP	77.402.273.434	132.178.715.377	(54.776.441.943)
			Ditjen Horti	5.601.343.949	2.248.084.000	3.353.259.949
			Ditjen Bun	18.709.878.259	16.297.407.348	2.412.470.911
			Ditjen PKH	81.178.873.449	83.665.470.189	(2.486.596.740)
			Ditjen PSP	8.438.246.755	13.369.342.810	(4.931.096.055)
			BRMP	61.914.632.620	43.105.648.536	18.808.984.084
			BPPSDMP	25.402.378.031	19.058.755.512	6.343.622.519
			Barantin	0	19.903.642.837	(19.903.642.837)
		Gedung dan Bangunan	Setjen	7.880.540.779	7.880.540.779	0
			Ditjen TP	4.214.368.535	4.216.131.535	(1.763.000)
			Ditjen Horti	1.147.640.992	736.748.242	410.892.750
			Ditjen Bun	79.925.810.540	84.809.369.809	(4.883.559.269)
			Ditjen PKH	33.981.112.863	31.991.793.113	1.989.319.750
			BRMP	10.930.079.694	12.540.097.695	(1.610.018.001)
			BPPSDMP	387.996.000	84.152.049.087	(83.764.053.087)
			Barantin	0	3.550.156.483	(3.550.156.483)
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Setjen	79.939.480	79.939.480	0
			Ditjen TP	8.048.466.457	8.098.368.207	(49.901.750)
			Ditjen Horti	2.939.777.799	1.759.103.997	1.180.673.802
			Ditjen Bun	15.693.642.308	16.689.803.380	(996.161.072)
			Ditjen PKH	9.490.779.975	9.632.731.133	(141.951.158)
			BRMP	1.344.952.919	743.858.419	601.094.500
			BPPSDMP	14.854.000	42.774.318	(27.920.318)
			Barantin	0	236.626.000	(236.626.000)
		Aset Tetap Lainnya	Setjen	2.290.963	1.500.000	790.963
			Ditjen TP	1.553.641.700	1.396.925.200	156.716.500
			Ditjen Bun	30.094.757.622	31.763.557.622	(1.668.800.000)
			Ditjen PKH	68.190.611	685.939.886	(617.749.275)
			BRMP	1.962.433.280	1.871.125.769	91.307.511
			BPPSDMP	37.572.998	66.827.059.351	(66.789.486.353)
			Barantin	0	271.662.000	(271.662.000)
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	Setjen	338.200.000	1.802.153.150	(1.463.953.150)
			Itjen	0	0	0
			Ditjen TP	57.130.099	48.264.519	8.865.580
			Ditjen Horti	0	0	0
			Ditjen PKH	0	8.331.395	(8.331.395)
			BRMP	265.577.114	25.971.241	239.605.873
			Barantin	0	0	0

No	Klasifikasi		Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
3	Aset Lain-lain	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban. Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun 2021 di Kab. Kapuas dan Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah	Ditjen PSP	0	12.546.818.120	(12.546.818.120)
		Reklasifikasi atas saldo tekor Kas di Bendahara Pengeluaran Telah dijelaskan di Penjelasan (C.1) Kas Di Bendahara Pengeluaran	BRMP	417.749.718	0	417.749.718
		Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	Ditjen Horti BPPSDMP	9.541.850 742.533.900	0 0	9.541.850 742.533.900
Jumlah				637.327.963.396	1.191.863.907.620	(554.535.944.224)

Penjelasan rincian Aset Lain-Lain dapat dilihat pada **Lampiran C.29**.

C.30. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset Lain-Lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp433.349.041.258,00 dan Rp504.942.181.850,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp71.593.140.592,00 atau 14,18% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024.

**Tabel C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	4.891.812	4.491.450	400.362
		Paten	435.033.225	440.528.665	(5.495.440)
		Software	33.490.868.839	33.421.270.399	69.598.440
		Lisensi	4.704.025.390	3.986.290.127	717.735.263
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	187.475.718	164.705.105	22.770.613
	Jumlah		38.822.294.984	38.017.285.746	805.009.238
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	292.664.720.131	342.870.867.121	(50.206.146.990)
		Gedung dan Bangunan	73.445.289.284	97.433.501.094	(23.988.211.810)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	23.289.552.091	22.804.076.907	485.475.184

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Aset Tetap Lainnya	4.806.842.555	3.718.093.327	1.088.749.228
	Aset Tak Berwujud	320.342.213	98.357.655	221.984.558
	Jumlah	394.526.746.274	466.924.896.104	(72.398.149.830)
	Total	433.349.041.258	504.942.181.850	(71.593.140.592)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.764.588.918.029,00 dan Rp347.939.186.992,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.416.649.731.037,00 atau 694,56% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.764.588.918.029,00 dan Rp347.939.186.992,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.416.649.731.037,00 atau 694,56%, apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	2.754.262.971.515	343.453.809.501	2.410.809.162.014
2	Pendapatan Diterima Dimuka	8.221.603.744	4.435.377.491	3.786.226.253
3	Uang Muka Dari KPPN	1.663.534.525	50.000.000	1.613.534.525
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	440.808.245	0	440.808.245
	Jumlah	2.764.588.918.029	347.939.186.992	2.416.649.731.037

C.31. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPMLS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.754.262.971.515,00 dan Rp343.453.809.501,00. Saldo Utang

kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.410.809.162.014,00 atau 701,93% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

Ket Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	405.820.386	549.993.597	(144.173.211)
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	429.330.746.831	276.365.916.807	152.964.830.024
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	2.064.182.970	0	2.064.182.970
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	336.811.576	677.811.227	(340.999.651)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.322.125.347.786	65.860.087.870	2.256.265.259.916
Dana Pihak Ketiga	61.966	0	61.966
Jumlah	2.754.262.971.515	343.453.809.501	2.410.809.162.014

Tabel C.31.2 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 per Eselon I

NO	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	8.138.383.556	5.222.550.386	2.915.833.170
2	Itjen	41.715.925	20.324.319	21.391.606
3	Ditjen TP	277.774.077.784	264.248.451.854	13.525.625.930
4	Ditjen Horti	9.049.539.681	6.130.079.078	2.919.460.603
5	Ditjen Bun	395.230.940.167	12.644.590.979	382.586.349.188
6	Ditjen PKH	48.107.970.535	36.072.839.888	12.035.130.647
7	Ditjen PSP	1.650.879.765.432	8.702.746.439	1.642.177.018.993
8	BRMP	11.245.999.981	8.311.253.041	2.934.746.940
9	BPPSDMP	10.865.830.339	2.100.973.517	8.764.856.822
10	Ditjen LIP	342.928.748.115	0	342.928.748.115
Jumlah		2.754.262.971.515	343.453.809.501	2.410.809.162.014

Tabel C.31.3 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	6.514.410.262	3.046.429.428	3.467.980.834
2	Itjen	0	0	0
3	Ditjen TP	533.403.850	421.109.000	112.294.850
4	Ditjen Horti	3.086.956.930	758.106.733	2.328.850.197
5	Ditjen Bun	359.419.429.096	12.464.266.500	346.955.162.596
6	Ditjen PKH	44.626.758.282	34.621.272.312	10.005.485.970
7	Ditjen PSP	1.544.844.929.942	8.658.262.566	1.536.186.667.376
8	BRMP	10.372.464.614	4.718.855.897	5.653.608.717
9	BPPSDMP	9.798.246.695	1.171.785.434	8.626.461.261
10	Ditjen LIP	342.928.748.115	0	342.928.748.115
Jumlah		2.322.125.347.786	65.860.087.870	2.256.265.259.916

Detail Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran C.31**.

C.32. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.221.603.744,00 dan Rp4.435.377.491,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.786.226.253,00 atau 85,36% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.32.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNBP	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	Setjen	5.869.078.806	1.423.237.280	4.445.841.526
		Ditjen Horti	166.156.709	159.343.999	6.812.710
		Ditjen Bun	4.564.085	6.005.375	(1.441.290)
		BRMP	873.783.689	1.775.162.816	(901.379.127)
		BPPSDMP	1.305.104.326	912.753.021	392.351.305
	Jumlah		8.218.687.615	4.276.502.491	3.942.185.124
2	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	Ditjen PKH	2.916.129	158.875.000	(155.958.871)
Total			8.221.603.744	4.435.377.491	3.786.226.253

Detail Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran C.32**.

C.33. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.663.534.525,00 dan Rp50.000.000,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.613.534.525,00 atau 3.227,07% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

Tabel C.33.1 Saldo Uang Muka Dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 per Eselon I

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ditjen TP	0	50.000.000	(50.000.000)
2	Ditjen PKH	95.127.927	0	95.127.927
3	Ditjen PSP	1.030.118.682	0	1.030.118.682
4	BRMP	386.843.916	0	386.843.916
5	BPPSDMP	151.444.000	0	151.444.000
	Jumlah	1.663.534.525	50.000.000	1.613.534.525

Berikut dijelaskan terkait terdapat Uang Muka dari KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember 2025:

1. Pada Ditjen PKH saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 ini dikarenakan pada awalnya terdapat TUP sebesar Rp95.127.927,00 (netto) yang diperuntukkan untuk pembayaran pengadaan belanja secara tunai. Pengeluaran tersebut telah dicatat serta ditransaksikan melalui Aplikasi SAKTI ke dalam buku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP 007), namun pada prosesnya terdapat kendala dengan system inaproc, sehingga akhirnya Bendahara Pengeluaran harus melakukan pembayaran secara non tunai yang menyebabkan sisa TUP yang belum sempat disetorkan pada akhir tahun anggaran. Kas tunai ini telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 9 Januari 2026 dengan NTPN 255155UFVBMKMA9G.
2. Pada Ditjen PSP saldo TUP dimaksud terjadi karena pengajuan pertanggungjawaban TUP dengan Nomor SPM 02940A ditolak oleh KPPN pada tanggal 6 Januari 2026, sehingga sampai dengan tanggal neraca masih tercatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Atas saldo tersebut selanjutnya telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2026 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 9646D8K1HKNH605.
3. Pada BRMP, setelah dilakukan audit BPK RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Uang Muka dari KPPN dengan mutasi kurang sebesar Rp417.749.718,00 sehingga nilai akun Uang Muka dari KPPN pada neraca per 31 Desember 2025 Audited yakni sebesar Rp386.843.916,00.

Menindaklanjuti hasil Keputusan pembahasan Tripartid Final pada tanggal 5 Mei 2026 dengan Kementerian Keuangan BPKRI dan Biro KBMN terdapat beberapa tindaklanjut untuk dapat segera dilakukan perbaikan dan pencatatan dalam SAKTI sebelum batas penyampaian Laporan Keuangan pada tanggal 8 Mei 2026 antara lain:

- a. Melakukan pencatatan terkait adanya sisa TUP sebesar Rp417.749.718,00 yang belum disetorkan akibat penyalahgunaan/ penyelewengan uang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BRMP Sulut yang sampai dengan saat ini tidak bisa dihubungi kedalam aset Lain-Lain melalui Menu Pengurangan Kas Akibat Hilang/ Bencana Bendahara Pengeluaran pada Modul Bendahara di Aplikasi SAKTI.
- b. Melakukan transaksi keluar kas pada Modul Bendahara yang dimaksud melalui Menu Pengurangan Kas Akibat Hilang/ Bencana Bendahara Pengeluaran pada Modul Bendahara di Aplikasi SAKTI.
- c. Berkoordinasi dengan :

Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk mendapatkan persetujuan pembukaan menu tersebut,

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan untuk dapat melakukan pembukaan dalam Modul SAKTI Bendahara secara terpusat

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk dapat melakukan pembukaan Periode 12 serta mengarahkan kepada KPPN Manado untuk melakukan Jurnal dalam SPAN untuk menyesuaikan pencatatan transaksi keluar yang dibukukan dalam Menu Pengurangan Kas tersebut

Berdasarkan tindaklanjut tersebut di atas, pergeseran kas pada Menu Pengurangan Kas Akibat Hilang/Bencana Bendahara Pengeluaran pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI hanya sebagai upaya administratif atas hasil Rapat Rekonsiliasi Tripartit Dalam Rangka Penyusunan Asersi Final Laporan Keuangan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 dan tidak menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban

ketekoran kas di Satker BRMP Sulawesi Utara (634022) untuk ditetapkan menjadi TP/TGR.

4. Pada BPPSDMP saldo kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp140.571.000,00 dikarenakan kelalaian bendahara pengeluaran yang tidak menyetorkan sisa TUP di 31 Desember 2025 tetapi dibayarkan di tanggal 5 Januari 2026 dengan nomor NTPN 3EE936R6FKQD03KL (Satker BPP Lampung_018.10.120040). Kemudian terdapat pengajuan TUP di awal Desember 2025 utk pembiayaan sejumlah kegiatan termasuk pembayaran Uang makan dan lembur PNS maupun PPPK. Tetapi kemudian terdapat kendala karena ternyata pada akun tersebut tidak cukup lagi untuk membayar uang lembur pegawai dan tidak dapat direvisi lagi. Akhirnya kelebihan TUP (bernilai kurang dari total jumlah yang harus dibayarkan kepada pegawai) kami setorkan kembali ke negara sejumlah 10.873.000. pada tgl 7 Januari 2026 dengan nomor NTPN 920370103852 melalui akun 815111 yang kemudian dikoreksi menjadi akun 815514 pada tgl 9 Januari 2026 (Satker SMKPPN Kupang_018.10.412101).

C.34. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp440.808.245,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp440.808.245,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

Tabel C.34 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ditjen PKH	413.094.495	0	413.094.495
2	Ditjen PSP	3.874.500	0	3.874.500
3	BRMP	23.839.250	0	23.839.250
	Jumlah	440.808.245	0	440.808.245

Berdasarkan tabel di atas disampaikan sebagai berikut:

- a. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Ditjen PKH sebesar Rp413.094.495,00 merupakan utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut yang belum melakukan penyetoran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Telah dilakukan penyetoran pada tanggal 29 Januari 2026 sebesar Rp216.723.812,00 dan tanggal 9 Februari 2026 sebesar Rp197.232.224,00
- b. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Ditjen PSP sebesar Rp3.874.500,00 merupakan utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut yang belum melakukan penyetoran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada satker Dinas Pertanian Prov Kepulauan Bangka Belitung dan telah dilakukan penyetoran ke kas Negara dengan NTPN 27BA774HPVI870K6 tanggal 14 Januari 2026.

- c. Utang Jangka Pendek Lainnya pada BRMP sebesar Rp23.839.250,00 merupakan utang pajak kegiatan ICARE pada Bendaharan Pengeluaran yang belum Disetor sampai dengan periode 31 Desember 2025. Utang pajak ini terdapat pada satuan kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara. Telah dilakukan penyetoran pada tanggal 20 Januari 2026 sebesar Rp13.746.040,00, tanggal 22 Januari 2026 sebesar Rp8.275.000,00, dan tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp1.818.210,00.

C.35. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp83.393.955.948.283,00 dan Rp78.679.371.187.770,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.714.584.760.513,00 atau 5,99% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	334.321.607.936	229.413.332.594
Beban Operasional	(18.421.684.192.926)	(15.131.560.375.466)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(18.087.362.584.990)	(14.902.147.042.872)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp334.321.607.936,00 dan Rp229.413.332.594,00. Nilai Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp104.908.275.342,00 atau 45,73% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp141.455.461.277,00 dan Rp67.914.777.523,00. Nilai Pendapatan BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp73.540.683.754,00 atau 108,28% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Rincian nilai Pendapatan BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BBIB Singosari	30.895.979.498	32.418.286.561	(1.522.307.063)
	BIB Lembang	18.110.420.512	22.788.758.685	(4.678.338.173)

Uraian	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Pusvetma Surabaya	81.372.679.864	14.010.578.447	67.362.101.417
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan BLU	Pusvetma Surabaya	8.650.000	0	8.650.000
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	Pusvetma Surabaya	2.196.986.434	661.950.754	1.535.035.680
Pendapatan BLU Lainnya	BBIB Singosari	5.156.620.772	5.287.022.227	(130.401.455)
	BIB Lembang	2.082.858.504	1.798.392.859	284.465.645
	Pusvetma Surabaya	3.019.809.444	2.122.282.680	897.526.764
	Satker Konsolidasi	(1.388.543.751)	(11.172.494.690)	9.783.950.939
Jumlah		141.455.461.277	67.914.777.523	73.540.683.754

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	Satker	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	Pusvetma Surabaya	81.555.172.720	30.895.979.498	50.659.193.222
	BIB Lembang	18.110.949.544	18.110.420.512	529.032
	BBIB Singosari	30.927.857.870	81.372.679.864	(50.444.821.994)
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan BLU	Pusvetma Surabaya	0	8.650.000	(8.650.000)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	Pusvetma Surabaya	2.196.986.434	2.196.986.434	0
Pendapatan BLU Lainnya	Pusvetma Surabaya	3.019.809.444	5.156.620.772	(2.136.811.328)
	BIB Lembang	2.085.245.601	2.082.858.504	2.387.097
	BBIB Singosari	5.156.620.772	3.019.809.444	2.136.811.328
Eliminasi Resiprokal	Satker Konsolidasi	0	(1.388.543.751)	1.388.543.751
Jumlah		143.052.642.385	141.455.461.277	1.597.181.108

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO sebesar Rp1.597.101.108,00. Adapun penjelasan selisih tersebut sebagai berikut.

Tabel D.1.3 Selisih Realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan Pendapatan BLU di LO

Keterangan	Jumlah
Pencatatan dan Pelunasan Piutang	214.900.260
Pengesahan Pendapatan yang masih Proses Penerbitan SP2D	2.387.097
Pencatatan Hibah Barang yang berasal Bank Penyimpan Dana Deposito	(8.650.000)
Eliminasi Resiprokal pada Satker Konsolidasi	1.388.543.751
Total	1.597.181.108

Berdasarkan tabel di atas, selisih realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO secara signifikan disebabkan transaksi pendapatan BLU yang diperoleh dari Satker Kementan Lainnya sehingga dieliminasi dengan beban pada Satker Lainnya tersebut.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp192.866.146.659,00 dan Rp161.498.555.071,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.367.591.588,00 atau 19,427% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun per 31 Desember 2024.

Posting rules dalam aplikasi SAKTI untuk Pendapatan PNBP Lainnya pada LRA tidak seluruhnya tersaji sebagai Pendapatan PNBP Lainnya pada LO, sebagai akun tersaji sebagai Pendapatan Kegiatan Non Operasional pada LO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel D.2 Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional pada LO

Kode Akun	Nama Akun
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya (khusus Kegiatan Operasional) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di LRA disajikan sebesar Rp196.442.961.288,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di LO disajikan sebesar Rp192.866.146.659,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.576.814.629,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel D.2.1 Perbandingan Pendapatan PNBP Lainnya (khusus Kegiatan Operasional) Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	59.889.765.002	59.853.734.017	36.030.985

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.008.244.376	10.344.351.621	(3.336.107.245)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	6.232.000	19.549.084	(13.317.084)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	211.999.494	198.977.790	13.021.704
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8.404.200.862	8.764.135.045	(359.934.183)
Pendapatan Perizinan Pertanian	36.894.250.000	36.735.375.000	158.875.000
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	45.310.160.011	45.270.876.894	39.283.117
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	995.134.000	995.134.000	0
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	11.429.930.733	11.667.364.733	(237.434.000)
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	495.547.000	495.547.000	0
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	495.698.000	495.698.000	0
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.865.485.621	2.037.863.089	(172.377.468)
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	1.996.145.005	1.976.365.515	19.779.490
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	15.480.000	15.480.000	0
Pendapatan Jasa Lainnya	10.529.795.780	10.529.795.780	0
Pendapatan Bunga Lainnya	13.709	13.709	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	13.487.975	13.487.975	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.195.886.290	6.920.521.235	275.365.055
Pendapatan Denda Lainnya	1.809.000	1.809.000	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	104.881.801	104.881.801	0
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	2.000.000	2.000.000	0
Jumlah	192.866.146.659	196.442.961.288	(3.576.814.629)

Adapun penjelasan selisih tersebut sebagai berikut :

Tabel D.2.2 Selisih Pendapatan PNPB Lainnya (khusus Kegiatan Operasional)

Uraian	Nilai
Penyetoran saldo Kas di Bendahara Penerimaan	(63.675.107)
Penyetoran saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima	(171.293.485)
Penyetoran saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	(254.684.789)
Pencatatan Piutang Lainnya	159.355.764
Pencatatan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	(209.445)
Pencatatan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.770.150.457
Penyetoran saldo Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	(158.875.000)
Revisi SPM./SP2D	296.046.234
Jumlah	3.576.814.629

Berdasarkan tabel di atas, selisih realisasi Pendapatan PNPB Lainnya (khusus Kegiatan Operasional) di LRA dengan nilai Pendapatan PNPB Lainnya di LO secara signifikan disebabkan terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas sewa BMN pada Satker Setjen.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan

fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18.421.684.192.926,00 dan Rp15.131.560.375.466,00. Nilai Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.290.123.817.460,00 atau 21,74% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.701.817.215.861,00 dan Rp1.640.535.271.082,00. Nilai Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp61.281.944.779,00 atau 3,73% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Mulai tahun anggaran 2025, kebijakan Kementerian Keuangan akun Beban Gaji dan Tunjangan BLU (5251) secara sistem dikelompokkan menjadi Beban Pegawai, sehingga hal ini mempengaruhi kenaikan Beban Pegawai dibandingkan tahun anggaran 2024 yang masih mengelompokkan akun Beban Gaji dan Tunjangan BLU pada Beban Barang dan Jasa. Rincian Beban Pegawai Tahun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Beban Pegawai Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	778.238.530.744	811.889.441.849	(33.650.911.105)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	1.130.407.000	2.101.997.040	(971.590.040)
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	6.802.023.398	580.454.000	6.221.569.398
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	72.770.147.469	16.578.567.545	56.191.579.924
Beban Lembur	9.047.509.050	10.642.863.000	(1.595.353.950)
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	31.265.221.202	0	31.265.221.202
Beban Gaji dan Tunjangan	802.563.376.998	798.741.947.648	3.821.429.350
Jumlah	1.701.817.215.861	1.640.535.271.082	61.281.944.779

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	778.559.933.446	778.238.530.744	321.402.702
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	1.130.407.000	1.130.407.000	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	6.802.023.398	6.802.023.398	0

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	72.761.462.319	72.770.147.469	(8.685.150)
Beban Lembur	9.047.509.050	9.047.509.050	0
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	802.861.510.670	31.265.221.202	771.596.289.468
Beban Gaji dan Tunjangan	0	802.563.376.998	(802.563.376.998)
Jumlah	1.671.162.845.883	1.701.817.215.861	(30.654.369.978)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp30.654.369.978,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel D.3.3 Selisih Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	Nilai
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	31.265.221.202
Pelunasan Piutang Lainnya	(694.739.463)
Pencatatan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar TA 2025	89.423.239
Koreksi Lainnya	(5.535.000)
Jumlah	30.654.369.978

Berdasarkan tabel di atas, selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO secara signifikan disebabkan adanya pengakuan beban pegawai secara akrual dan beban gaji dan tunjangan BLU yang pada LO dipetakan kedalam beban pegawai, sementara pada LRA dipetakan pada Belanja Barang.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp450.517.032.648,00 dan Rp616.959.675.138,00. Nilai Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp166.442.642.490,00 atau 26,98% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan nilai beban persediaan secara signifikan disebabkan karena pemakaian Persediaan menurun dibandingkan dengan tahun 2024.

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA sebesar Rp828.643.661.637,00 dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO sebesar Rp450.517.032.648,00, terdapat selisih sebesar Rp378.126.628.989,00. Selisih tersebut secara signifikan dipengaruhi karena meningkatnya realisasi Belanja Barang Persediaan pada tahun 2025, sedangkan pemakaian Persediaan menurun dibandingkan dengan tahun 2024.

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.944.571.797.909,00 dan Rp2.283.771.581.716,00. Nilai Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp339.199.783.807,00 atau 14,85% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan tersebut antara lain disebabkan kebijakan Pemerintah untuk melakukan penghematan Belanja Barang Operasional dan Non Operasional yang berdampak pada penurunan Beban Barang dan Jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Belanja/Beban Barang	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang Operasional	344.469.718.812	402.311.260.758	(57.841.541.946)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	735.712.272.728	931.351.992.046	(195.639.719.318)
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	3.010.546.014	744.142.000	2.266.404.014
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	854.519.936.247	926.184.376.165	(71.664.439.918)
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	6.859.324.108	23.179.810.747	(16.320.486.639)
Jumlah	1.944.571.797.909	2.283.771.581.716	(339.199.783.807)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Belanja/Beban Barang			(Rp)
Belanja/Beban Barang Operasional	344.469.718.812	344.658.061.387	(188.342.575)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	735.712.272.728	746.992.664.243	(11.280.391.515)
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	3.010.546.014	3.017.117.458	(6.571.444)
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	854.519.936.247	715.730.543.575	138.789.392.672
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	6.859.324.108	39.687.335.263	(32.828.011.155)
Jumlah	1.944.571.797.909	1.850.085.721.926	94.486.075.983

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp94.486.075.983,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel D.5.3 Selisih Belanja/Beban Barang dan Jasa di LRA dengan LO

Uraian	Nilai
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	(1.049.803.895)
Piutang Lainnya	(1.359.575.280)
Konstruksi Dalam pengerjaan	19.778.000
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	253.753.527
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(188.398.000)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(113.640.001)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	238.650.000
Koreksi Lainnya	(5.711)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	(65.535.863.757)
Beban Keperluan Perkantoran	4.356.750
Beban Barang Non Operasional Lainnya	526.214.284
Kesalahan pencatatan dri akun 521821	580.000
Beban Langganan Listrik	238.650
Beban Langganan Telepon	(238.650)
Beban Sewa	(530.571.034)
Beban Jasa Profesi	3.800.000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127.424.658
Beban Perjalanan Biasa	16.123.934
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.599.250.000
Revisi SPM	144.577.241
RPATA 163139	(68.609.580.713)
Hibah Langsung	263.110.673.817
jurnal satker konsol	(1.761.995.007)
Kesalahan pencatatan	(62.177.950)
Kesalahan pencatatan dari belanja modal dibawah kapitalisasi	(32.325.181.782)
Kesalahan pencatatan ke persediaan	(22.313.098)
Jumlah	94.486.075.983

Berdasarkan tabel di atas, selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO secara signifikan disebabkan transaksi pengesahan Hibah Langsung berupa uang.

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp304.627.113.944,00 dan Rp267.611.609.289,00. Nilai Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.015.504.655,00 atau 13,83% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan alokasi Belanja Pemeliharaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Aset yang ada untuk menghemat pembelian Aset.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO terdapat selisih sebesar Rp16.536.690.565,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6. Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	136.888.382.454	136.143.808.803	744.573.651
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.697.831.155	136.023.626.678	(325.795.523)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.441.878.282	7.461.852.882	(19.974.600)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	17.193.232.501	0	17.193.232.501
Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.895.175.206	3.895.175.206	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	3.510.614.346	3.510.614.346	0
Jumlah	304.627.113.944	287.035.077.915	17.592.036.029

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel D.6.1. Selisih Belanja/Beban Pemeliharaan di LRA dengan LO

Uraian	Nilai
Pembayaran Piutang berupa Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	(13.076.829)
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	4.156.126.645
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	19.124.942.996
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(328.035.748)
Koreksi Lainnya	(5.045.939.926)
Koreksi Pencatatan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	(76.532.891)
Koreksi Pencatatan Beban Keperluan Perkantoran	(77.644.500)
Koreksi Pencatatan Beban Barang Non Operasional Lainnya	(1.020.408)
Koreksi Pencatatan Beban Sewa	(45.759.750)
Koreksi Pencatatan Beban Jasa Lainnya	(3.000.000)
Revisi SPM SP2D/Belanja	(111.471.810)
Koreksi Pencatatan Beban Persediaan konsumsi	13.448.250
Jumlah	17.592.036.029

Berdasarkan tabel di atas, selisih realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO secara signifikan disebabkan pemakaian persediaan bahan pemeliharaan suku cadang bukan berasal dari belanja pemeliharaan.

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp851.202.004.298,00 dan Rp1.217.982.535.208,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp366.780.530.910,00 atau 30,11% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan tersebut antara lain disebabkan kebijakan Pemerintah untuk melakukan penghematan perjalanan dinas yang berdampak pada penurunan Beban Perjalanan Dinas.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO terdapat selisih sebesar Rp4.486.397.476,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.646.415.726	698.680.793.072	1.965.622.654
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	16.152.106	82.590.106	(66.438.000)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.621.247.397	39.376.500.275	244.747.122
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.736.371.427	20.360.573.927	375.797.500
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68.572.497.196	68.543.012.232	29.484.964
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	8.540.074.395	8.452.951.884	87.122.511
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	8.540.074.395	8.452.951.884	87.122.511
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	7.209.856.738	(7.209.856.738)
Jumlah	846.672.832.642	851.159.230.118	(4.486.397.476)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel D.7.1. Selisih Belanja/Beban Perjalanan Dinas di LRA dengan LO

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	(9.404.400)
Penyetoran Piutang berasal dari Penerimaan Kembali TAYL	(2.714.054.862)
Beban Perjalanan BLU yang direalisasi dari akun Belanja BLU	7.209.856.738
Jumlah	4.486.397.476

Berdasarkan tabel di atas, selisih realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO secara signifikan disebabkan adanya pengakuan Beban Perjalanan BLU secara akrual yang pada LO dipetakan kedalam beban perjalanan dinas, sementara pada LRA dipetakan pada Belanja Barang BLU.

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.718.677.925.651,00 dan Rp8.517.423.102.082,00. Nilai Beban Barang untuk

Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.201.254.823.569,00 atau 49,32% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut secara signifikan disebabkan adanya penerapan kebijakan Pemerintah untuk mencatat Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang sudah tidak dikuasai namun belum terbit dokumen pemindah tangannya ke Daftar Barangt Persediaan Yang Tidak Dikuasai.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	123.395.000.000	4.979.876.375.002	(4.856.481.375.002)
Beban Barang Fisik dan Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	1.949.614.366.735	1.666.340.482.152	283.273.884.583
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	10.645.668.558.916	1.871.206.244.928	8.774.462.313.988
Jumlah	12.718.677.925.651	8.517.423.102.082	4.201.254.823.569

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	7.643.036.720.501	123.395.000.000	7.519.641.720.501
Belanja/Beban Barang Fisik dan Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	1.949.614.366.735	(1.949.614.366.735)
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	11.436.784.187.850	10.645.668.558.916	791.115.628.934
Jumlah	19.079.820.908.351	12.718.677.925.651	6.361.142.982.700

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel D.8.3 Penjelasan selisih Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Uraian	Nilai
Transfer Keluar	(462.868.859.723)
Transfer Masuk	389.827.932.973
Koreksi Nilai Persediaan	114.497.045.022
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	31.135.708.869
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	596.669.467.360
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.935.401.534.630
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(3.426.251.256.808)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(20.684.679.961)

Uraian	Nilai
Beban Persediaan Rusak/Usang	(642.184.479)
Masih Tercatat persediaan Banpem	(3.235.111.522.426)
Saldo awal	36.418.976.265
RPATA	(4.329.617.990.931)
Piutang Lainnya	(5.239.042.149)
Jurnal Satker Konsol ke piutang lainnya	(8.348.929.125)
Kesalahan pencatatan	23.670.817.783
Jumlah	(6.361.142.982.700)

Berdasarkan tabel di atas, selisih realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO paling signifikan disebabkan sudah ada realisasi belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat melalui transaksi RPATA pada akhir tahun 2025 akan tetapi pelaksanaan kegiatan diberikan kesempatan sampai dengan 31 Maret 2026.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp450.552.506.101,00 dan Rp585.994.707.547,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp135.442.201.446,00 atau 23,11% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan tersebut disebabkan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud lebih banyak yang sudah rusak berat dan dilakukan penghentian guna serta penghapusan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	209.432.125.619	315.443.525.334	(106.011.399.715)
		Gedung dan Bangunan	198.229.615.446	221.090.412.274	(22.860.796.828)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	30.252.464.180	36.931.132.013	(6.678.667.833)
		Aset Tetap Lainnya	612.268.187	629.840.597	(17.572.410)
	Jumlah		438.526.473.432	574.094.910.218	(135.568.436.786)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	163.269.040	121.570.660	41.698.380
		Jumlah	163.269.040	121.570.660	41.698.380
3	ATB	Hak Cipta	400.362	400.362	0
		Paten	8.629.560	23.052.449	(14.422.889)
		Software	3.336.335.331	1.772.996.903	1.563.338.428
		Lisensi	717.735.263	758.048.950	(40.313.687)
		ATB Lainnya	22.770.613	22.770.613	0

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Jumlah		4.085.871.129	2.577.269.277	1.508.601.852
4	Aset Lain- Lain	Aset Tetap Tidak Digunakan	57.275.821	9.177.725.117	(9.120.449.296)
		Aset Tak Berwujud Tidak Digunakan	7.719.616.679	23.232.275	7.696.384.404
	Jumlah		7.776.892.500	9.200.957.392	(1.424.064.892)
Total			450.552.506.101	585.994.707.547	(135.442.201.446)

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp)281.403.486,00 dan Rp1.281.893.404,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.563.296.890,00 atau 121,95% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan tersebut antara lain disebabkan secara signifikan merupakan koreksi atas kesalahan penyajian kualitas Piutang pada periode sebelumnya.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

31 Desember 2025 dan 2024					
No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	561.265.566	(389.476.393)	950.741.959
		Bagian Lancar TP/TGR	174.009.581	453.728.436	(279.718.855)
		Piutang dari Kegiatan BLU	34.016.230	12.560.673	21.455.557
	Jumlah		769.291.377	76.812.716	692.478.661
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	61.561.859	(27.017.441)	88.579.300
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	(1.112.256.722)	1.232.098.129	(2.344.354.851)
	Jumlah		(1.050.694.863)	1.205.080.688	(2.255.775.551)
Total			(281.403.486)	1.281.893.404	(1.563.296.890)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp18.087.362.584.990,00. Nilai defisit tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp3.185.215.542.118,00 atau 21,37% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp14.902.147.042.872,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.11 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(96.786.044.006)	(61.155.343.194)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	264.650.110.870	(3.434.838.138)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	167.864.066.864	(64.590.181.332)

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp96.786.044.006,00) dan (Rp61.155.343.194,00). Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.630.700.812,00 atau 58,26% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.421.012.464,00 dan Rp8.215.529.847,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.205.482.617,00 atau 26,84%.

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp107.207.056.470,00 dan Rp69.370.873.041,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.836.183.429,00 atau 54,54% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Tabel D.12 Beban Pelepasan Aset Non Lancar Kementerian Pertanian Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	1.504.576.721	100.820.385	1.403.756.336
2	Itjen	0	102.669.650	(102.669.650)
3	Ditjen TP	24.811.050	1.300.030.405	(1.275.219.355)
4	Ditjen Horti	35.437.202	5.412.707.863	(5.377.270.661)
5	Ditjen Bun	6.017.397.550	28.447.153.888	(22.429.756.338)
6	Ditjen PKH	15.861.969.935	25.385.139.620	(9.523.169.685)
7	Ditjen PSP	0	824.364	(824.364)
8	BRMP	15.948.008.220	4.756.057.498	11.191.950.722
9	BPPSDMP	4.950.816.536	3.811.781.646	1.139.034.890
10	Barantan	0	53.687.722	(53.687.722)
11	Ditjen LIP	62.864.039.256	0	62.864.039.256
Jumlah		107.207.056.470	69.370.873.041	37.836.183.429

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp275.352.144.509,00 dan (Rp3.434.838.138,00). Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp268.084.949.008,00 atau 7.804,88% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp275.352.144.509,00 dan Rp222.869.182.816,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.482.961.693,00 atau 23,55% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian			Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	Ditjen Bun	560.104.271	258.062.982	302.041.289
				Ditjen Horti	1.995.000	0	1.995.000
				BRMP	1.277.921.437	486.102.576	791.818.861
				Ditjen TP	0	2.630.000	(2.630.000)
				Setjen	0	38.330.000	(38.330.000)
				Ditjen PKH	965.713.267	3.180.000	962.533.267

No.	Uraian			Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)			
				Barantan	0	54.100.000	(54.100.000)			
			Terhadap Bendahara	BRMP	0	145.083.987	(145.083.987)			
				Ditjen TP	0	7.680.000	(7.680.000)			
				Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	Ditjen Bun	860.720.636	13.325.384.624	(12.464.663.988)		
			Itjen		0	395.586.326	(395.586.326)			
			Ditjen Horti		1.879.860.450	52.533.009	1.827.327.441			
			BRMP		305.004.117	28.963.988	276.040.129			
			Ditjen TP		0	103.244.786	(103.244.786)			
			Ditjen PKH		1.502.232.268	185.688.118	1.316.544.150			
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	Ditjen PSP	40.981.247	39.403.478	1.577.769			
				Ditjen Bun	12.685.000	23.256.080	(10.571.080)			
				Ditjen Horti	52.214.650	36.391.050	15.823.600			
				Itjen	370.100	1.540.526	(1.170.426)			
				BRMP	157.284.872	5.581.047.164	(5.423.762.292)			
				Ditjen TP	31.357.949	925.826	30.432.123			
				Setjen	176.759.580	563.752.796	(386.993.216)			
				BPPSDMP	154.028.065	69.299.510	84.728.555			
				Ditjen PKH	95.936.040	108.749.330	(12.813.290)			
				Barantan	0	7.002.420	(7.002.420)			
			Belanja Barang	Ditjen PSP	41.993.427.328	8.490.229.758	33.503.197.570			
				Ditjen Bun	2.166.408.261	2.633.171.263	(466.763.002)			
				Ditjen Horti	423.879.212	1.094.764.508	(670.885.296)			
				Itjen	17.214.580	39.268.972	(22.054.392)			
				BRMP	745.720.001	1.166.561.988	(420.841.987)			
				Ditjen TP	7.697.351.737	26.270.462.605	(18.573.110.868)			
				Setjen	87.611.097	569.214.617	(481.603.520)			
				BPPSDMP	1.835.055.069	1.172.589.634	662.465.435			
				Ditjen LIP	325.471.846	0	325.471.846			
				Ditjen PKH	2.777.543.860	21.011.395.430	(18.233.851.570)			
			Belanja Modal	BRMP	0	156.777.298	(156.777.298)			
				Setjen	0	381.576	(381.576)			
				BPPSDMP	0	12.270.800	(12.270.800)			
				Ditjen PKH	406.005.620	1.138.000	404.867.620			
			Belanja Bantuan Sosial	Ditjen PSP	0	2.000.000	(2.000.000)			
					Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan PNS	BRMP	25.131.990	0	25.131.990	
			3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	Setjen	226.116.000	240.324.836	(14.208.836)
							Ditjen Horti	899.900.000	135.945.500	763.954.500
							BRMP	32.998.572.372	15.099.181.941	17.899.390.431
							Ditjen TP	44.045.000	122.346.600	(78.301.600)
							BPPSDMP	1.074.733.750	603.132.400	471.601.350

No.	Uraian			Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
				Ditjen PKH	173.080.441.050	122.008.368.877	51.072.072.173
				Ditjen Bun	0	48.731.000	(48.731.000)
				Ditjen Horti	0	5.106	(5.106)
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	BRMP	180.568.005	303.558.150	(122.990.145)
				BPPSDMP	0	44.056.900	(44.056.900)
				Ditjen PKH	271.414.420	124.545.600	146.868.820
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	BRMP	364.362	820.881	(456.519)
Jumlah					275.352.144.509	222.869.182.816	52.482.961.693

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.702.033.639,00 dan Rp226.304.020.954,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp215.601.987.315,00 atau 95,27% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian			Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ditjen Bun	0	2.295.000	(2.295.000)
				Ditjen Horti	0	17.624.806	(17.624.806)
				BRMP	167.276.345	1.267.104.368	(1.099.828.023)
				BPPSDMP	0	44.056.900	(44.056.900)
				Ditjen PKH	8.570.975.025	104.835.200	8.466.139.825
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	Ditjen TP	11.200.000	0	11.200.000
				Ditjen Horti	0	256.292.500	(256.292.500)
				Ditjen PKH	1.298.347.780	222.695.899.405	(221.397.551.625)
				BRMP	654.084.479	691.624.124	(37.539.645)
				Barantan	0	1.213.517.683	(1.213.517.683)
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	BRMP	150.010	10.770.968	(10.620.958)
Jumlah					10.702.033.639	226.304.020.954	(215.601.987.315)

Beban Persediaan Rusak/Usang pada Ditjen PKH sebesar Rp1.298.347.780,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel D.14.2 Beban Persediaan Rusak/Usang pada Ditjen PKH

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Jawa Tengah	140.855.680	Pencatatan atas Vaksin LUMPYVAX-LSD yang kadaluarsa
2	Pusvetma	715.190.000	Pencatatan atas Vaksin PMK, antigen ND, antigen AI yang kadaluarsa

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
3	BIB Lembang	431.662.900	Pencatatan atas semen beku yang rusak
4	BPTU HPT Padang Mengatas	10.639.200	Pencatatan atas obat injeksi hewan yang kadaluarsa
	Jumlah	1.298.347.780	

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp167.864.066.864,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp232.454.248.196,00 atau 359,89%, apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar (Rp64.590.181.332,00).

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp17.919.498.518.126,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.952.761.293.922,00 atau 19,73% apabila dibandingkan dengan Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp14.966.737.224.204,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp78.679.371.187.770,00 dan Rp80.516.531.240.504,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.837.160.052.734,00 atau 2,28% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp17.919.498.518.126,00) dan (Rp14.966.737.224.204,00). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.952.761.293.922,00 atau 19,73% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.499.172.050,00 dan Rp2.976.452.651,00. Koreksi Nilai Persediaan yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas yang secara signifikan untuk melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan atas persediaan baik koreksi nilai maupun koreksi kuantitas.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.522.719.399,00 atau 51,16% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp3.673.987.054.045,00 dan Mutasi kurang sebesar Rp3.669.487.881.995,00 dengan rincian pada **Lampiran E.3.1**.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp1.225.086.475,00 merupakan koreksi menambah ekuitas yang secara signifikan untuk melakukan koreksi atas kesalahan pemilihan kodifikasi Aset pada masa lampau, sehingga perlu dilakukan perubahan kodifikasi Aset menjadi kodefikasi yang seharusnya. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp276.630.994.215,00 atau 99,56% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp277.856.080.690,00.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp329.571.814.701,00 dan koreksi kurang sebesar Rp328.346.728.226,00 dengan rincian pada **Lampiran E.3.2**.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp28.364.016.803,00) dan (Rp314.374.396.815,00), mengalami kenaikan sebesar Rp286.010.380.012,00 atau 90,98% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 secara signifikan untuk melakukan koreksi atas nilai bertambah maupun berkurang, koreksi susulan, koreksi manual, dan pencatatan transaksi saldo awal.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp605.569.723.448,00 dan koreksi kurang sebesar Rp633.933.740.261,00 dengan rincian pada **Lampiran E.3.3**.

E.3.4 Koreksi Lain – Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp186.288.448.447,00) dan (Rp77.678.111.000,00).

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp108.610.337.447,00 atau 139,82% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Lain-lain pada Kementerian Pertanian untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 secara signifikan merupakan koreksi atas kesalahan beban penjualan vaksin tahun sebelumnya, koreksi atas kesalahan beban persediaan banpem tahun sebelumnya, koreksi atas pencatatan keluar saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun sebelumnya, dan melakukan pencatatan piutang berupa pengembalian belanja TAYL sebelum tahun 2025 yg disetor pada tahun 2026.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp207.909.160.589,00 dan koreksi kurang sebesar Rp20.482.065.060,00 dengan rincian pada **Lampiran E.3.4**.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp24.970.967.162.661,00 dan

Rp14.187.548.576.691,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.783.418.585.970,00 atau 76,01% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp358.452.939.629,00) dan Rp270.709.790.703,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp87.729.990.926,00 atau 32,41% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp4.620.684.069.753,00) dan Rp2.815.774.979.103,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian dan dari Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.804.909.090.650,00 atau 64,09% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran E.4.3.1**

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.516.230.436.770,00 dan Rp1.768.317.823.937,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp747.912.612.833,00 atau 42,29% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian Transfer Masuk/Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran E.4.3.2**.

Tabel E.4.3. Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar Per Eselon I

Transfer Masuk			Transfer keluar		
No	Eselon I	Nilai	No	Eselon I	Nilai
1	Setjen	4.898.324.583	1	Setjen	(314.940.445.061)
2	Itjen	198.406.829	2	Itjen	(110.813.697)
3	Ditjen Tanaman Pangan	93.143.430	3	Ditjen Tanaman Pangan	(93.143.430)
4	Ditjen Hortikultura	3.960.000	4	Ditjen Hortikultura	0
5	Ditjen Perkebunan	1.551.921.226.551	5	Ditjen Perkebunan	(1.556.819.770.499)
6	Ditjen PKH	104.303.642.886	6	Ditjen PKH	(82.924.518.886)
7	Ditjen PSP	12.500.000	7	Ditjen PSP	(492.519.246.841)

Transfer Masuk			Transfer keluar		
No	Eselon I	Nilai	No	Eselon I	Nilai
8	BRMP	53.527.861.225	8	BRMP	(53.340.655.849)
9	BPPSDMP	316.135.062.955	9	BPPSDMP	(23.002.375.861)
10	Ditjen LIP	485.136.308.311	10	Ditjen LIP	0
			11	Badan Karantina	(2.096.933.099.629)
	Total	2.516.230.436.770			(4.620.684.069.753)

Selisih tersebut sebesar Rp2.104.453.632.983,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer keluar dari Ditjen PSP ke TNI AD dan TNI AL sebesar Rp3.150.332.280,00
2. Transfer keluar dari Ditjen Perkebunan ke Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Sebesar Rp4.735.550.760,00.
3. Transfer keluar dari Badan Karantina ke Badan Karantina Indonesia sebesar Rp2.096.567.549.543,00

Rincian selisih Transfer Masuk/Transfer Keluar pada **Lampiran E.4.3.3**.

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp334.106.974.080,00 dan Rp336.876.125.622,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.769.151.542,00 atau 0,82% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel E.4.4. Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No	Unit Eselon I	Nilai Komitment Hibah (Rp)	Nilai (Rp)	Pemberi Hibah
1	Setjen	3.384.696.592	1.072.057.631	Pertamina dan ACIAR
2	Ditjen Hortikultura	39.270.000.000	25.043.586.924	JICA
3	Ditjen Perkebunan	233.967.528.450	187.298.054.075	"PEA GRASS", "SASCI PLUS", PotSPM, Disbun Provinsi Jawa Timur
4	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.756.542.000	6.211.485.247	FAO Representative for Indonesia and Timor Leste
5	BRMP	123.053.733.020	21.954.870.763	FAO, AFACI, IFPRI, ACIAR, Hirata Corporation, Sakata Seed Cooperation, AVRDC-World Veg Center, UNESCAP, HIMPO Indonesia
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	7.575.300.000	92.526.919.440	Embassy Of The Republic Of Korea/Korea Institute Of Industrial Technology (KITECH)
	J U M L A H	412.007.800.062	334.106.974.080	

Terdapat Penerimaan Hibah Langsung sebesar Rp334.106.974.080,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Setjen mendapatkan hibah langsung dari 2 (dua) lembaga pendonor dengan nilai total sebesar Rp1.072.057.631,00.
2. Ditjen Hortikultura mendapatkan hibah langsung dari lembaga pendonor JICA dengan nilai total sebesar Rp25.043.586.924,00.
3. Ditjen Perkebunan mendapatkan hibah langsung dari 4 (empat) lembaga pendonor dengan nilai total sebesar Rp187.298.054.075,00.
4. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapatkan hibah langsung dari lembaga pendonor FAO Representative for Indonesia and Timor Leste dengan nilai total sebesar Rp6.211.485.247,00.
5. BRMP mendapatkan hibah langsung dari 9 (sembilan) lembaga pendonor dengan nilai total sebesar Rp21.954.870.763,00.
6. BPPSDMP mendapatkan hibah langsung dari lembaga pendonor Embassy Of The Republic Of Korea/Korea Institute Of Industrial Technology (KITECH) dengan nilai total sebesar Rp92.526.919.440,00.

Adapun rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran E.4.4**.

E.4.5 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp319.685.765,00) dan Rp127.847.525,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp191.838.240,00 atau 150,05% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel E.4.5. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	018.09.237217	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Sayuran	AFACI	2EJ26YRA	Development of Vegetable Varieties in Asia Region	38.195
2	018.09.648669	Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	AFACI	2EGMQPNA	Establishment of Asian Food Composition Database (AFCD)	1.114.016
3	018.09.648673	Balai Besar Pengembangan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	AFACI	28CQ4JVA	Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia	180

No.	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
4	018.09.648680	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanah Dan Pupuk	Himpunan Produsen Pupuk Organik (HIMPO) Indonesia	27HX3LEA	Pengujian Mutu Pupuk Organik Subsidi Merek Petroganik	177.000.516
5	018.05	Ditjen Perkebunan	(NPHD/NPHLN) Nomor: LoA-23.06.2023	25J6JL8A	kegiatan United Nations Development Programme (UNDP).	141.532.858
Jumlah						319.685.765

Berikut penjelasan pengesahan pengembalian hibah langsung yang bernilai signifikan.

1. Ditjen Perkebunan

Pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang sebesar Rp141.532.858,00 sesuai surat perjanjian hibah (NPHD/NPHLN) Nomor: LoA-23.06.2023 tanggal 23 Juni 2023 Nomor Register 25J6JL8A kegiatan United Nations Development Programme (UNDP).

2. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

a. Project hibah langsung bentuk uang dari luar negeri yang berada pada Satuan Kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen) dengan judul project yaitu “Establishment Of Asian Food Composition Database (AFCD)” dengan nomor register 2EGMQPNA dengan Donor yaitu AFACI dengan nilai komitmen sebesar USD 90.000 atau setara dengan sebesar Rp1.337.580.000,00 dengan tujuan yaitu pembentukan database komposisi pangan Asia. Project Hibah ini pada pencatatan hibah TA.2024 telah dilakukan pengesahan hibah dengan nomor pengesahan 241400601540001 sebesar Saldo Awal sebesar Rp497.350.652,00, Pendapatan sebesar Rp0, Belanja sebesar Rp496.236.636,00 dan Saldo Akhir sebesar Rp1.114.016,00. Saldo Akhir atau sisa dana kegiatan hibah yang sebesar Rp1.114.016,00 tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2025 dengan nomor NTPN 121796QTC973TUIE.

b. Project hibah langsung bentuk uang dari dalam negeri yang berada pada Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan judul Project yaitu “PENGUJIAN MUTU PUPUK ORGANIK SUBSIDI MEREK PETROGANIK”, dengan nomor register 27HX3LEA, dengan donor yaitu dari pihak Sektor Swasta/ Organisasi Lainnya/ Himpunan Produsen Pupuk Organik Indonesia (Himpo). Nilai komitmen hibahnya yaitu sebesar Rp3.575.000.000,00 dengan tujuan proyek yaitu memberikan jaminan mutu pupuk organik subsidi melalui kegiatan pengujian dan pendampingan mitra produsen, hingga penerbitan hasil pengujian pupuk. Project ini pada pencatatan TA.2025 telah dilakukan pengesahan dengan nomor pengesahan 25230000000001 sebesar Saldo Awal Rp0 (nihil), Pendapatan sebesar Rp3.554.577.596,00 Belanja sebesar Rp3.377.577.080,00 dan Saldo Akhir sebesar Rp177.000.516,00. Saldo akhir atau sisa dana kegiatan hibah sebesar Rp177.000.516,00 dengan nomor NTPN 196946U8F8GAV0OF.

E.4.6 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.163.607.000,00 dan Rp34.667.237.025,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.503.630.025,00 atau 96,64% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel E.4.6. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Eselon I	Kode	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	BRMP	567449	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	Pemerintah Kab. Solok	Hibah Barang Langsung Berupa Gedung Dan Bangunan Dari Pemerintah Kabupaten Solok kepada BRMP Sumatera Barat	586.407.000
2	BRMP	412040	Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	PT Pupuk Kaltim	Hibah Barang Langsung Berupa Peralatan Mesin Dari PT Pupuk Kalimantan Timur Kepada Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	577.200.000
			J U M L A H			1.163.607.000

Terdapat Penerimaan Hibah Langsung bentuk barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp1.163.607.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, dengan judul Hibah yaitu “Hibah Barang Langsung Berupa Gedung Dan Bangunan Dari Pemerintah Kabupaten Solok Kepada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat “, dengan nomor register 2DNK5M9A, pendonor dari Pemerintah Kabupaten Solok. Nilai komitmen hibahnya yaitu sebesar Rp586.407.000,00, untuk keperluan bangunan Gedung Laboratorium Permanen sebesar Rp347.530.000,00 dan Peruntukan Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen sebesar Rp238.877.000,00. Penerimaan Hibah ini untuk pencatatan TA.2025 sudah dilakukan pengesahan dengan nomor 8251707221022207171 total sebesar Rp586.407.000,00.
2. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika, dengan judul hibah yaitu “Hibah Barang Langsung Berupa Peralatan Mesin Dari PT Pupuk Kalimantan Timur Kepada Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Buah Tropika”, dengan nomor register 2VJRUR6A, pendonor dari BUMN (PT Pupuk Kaltim). Nilai komitmen hibahnya yaitu sebesar Rp577.200.000,00 bertujuan dalam rangka menurunkan serapan gas emisi rumah kaca dalam upaya meminimalisir dampak perubahan iklim. Penerimaan hibah ini sudah dilakukan pengesahan pada pencatatan TA.2025 dengan nomor pengesahan 8285606471058347144 sebesar Rp577.200.000,00.

E. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp4.714.584.760.513,00. Nilai kenaikan tersebut lebih tinggi sebesar Rp3.062.109.948.902,00 atau 53,96% apabila dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp1.652.474.811.611,00.

F. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp83.393.955.948.283,00 dan Rp78.679.371.187.770,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.714.584.760.513,00 atau 5,99% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.